

**PENGARUH PEMBIAYAAN SEKTOR
PERTANIAN TERHADAP KEMASLAHATAN
MASYARAKAT DI KAWASAN
BARAT INDONESIA**



Disusun Oleh:

**RISMAINI
NIM. 231008032**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi
Syariah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025/2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN
TERHADAP KEMASLAHATAN MASYARAKAT DI
KAWASAN BARAT INDONESIA**

**RISMAINI
NIM. 231008032
Program Studi Ekonomi Syariah**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

جامعة الرانيري

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A

Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN TERHADAP
KEMASLAHATAN MASYARAKAT DI KAWASAN BARAT INDONESIA

RISMAINI

NIM: 231008032

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 17 April 2026 M
29 Syawal 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Bismi Khalidiz, S.Ag., M.Si

Penguji,

Dr. Saifullah M. Yunus, MA

Penguji,

Dr. Khairul Amri, SE., M.Si

Sekretaris,

Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA

Penguji,

Dr. Safira Mustaqilla, MA

Penguji,

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

Banda Aceh, 25 April 2026 Y
Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D)

NIP: 199702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Rismaini

Tempat Tanggal Lahir : Jongar, 11 Agustus 2001

Nomor mahasiswa : 231008032

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Tesis ini juga tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 25/01/2026

Saya yang menyatakan,



METERA
TEMPEL
133ANX323780628
Rismaini

NIM.231008032

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi yang dimaksud disini adalah sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab-Latin yang telah diatur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut

1. Konsonan

No.	Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	Ş	Te dan Ha
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
7	خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Ż	De dan Ha
10	ر	Ra'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14	ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
15	ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)

No.	Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
16	ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
17	ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
18	ع	'Ain	' -	koma terbalik ke atas
19	غ	Ghain	G	Ge dan Ha
20	ف	Fa'	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	هـ	Ha'	H	Ha
28	ء	Hamzah	' -	Apostrof
29	ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Waḍ'	وضع
'iwaḍ	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

4. diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعاوا
Ulā’ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ى) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مض
kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūṣah (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā' marbūṭah) Bentuk penulisan ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ̣ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ̣ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila ̣ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan "t". Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a” Contoh:

asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبیر
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun di bagi:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al kamāl	با لتمام و الكمال
Abū al-Layth al Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

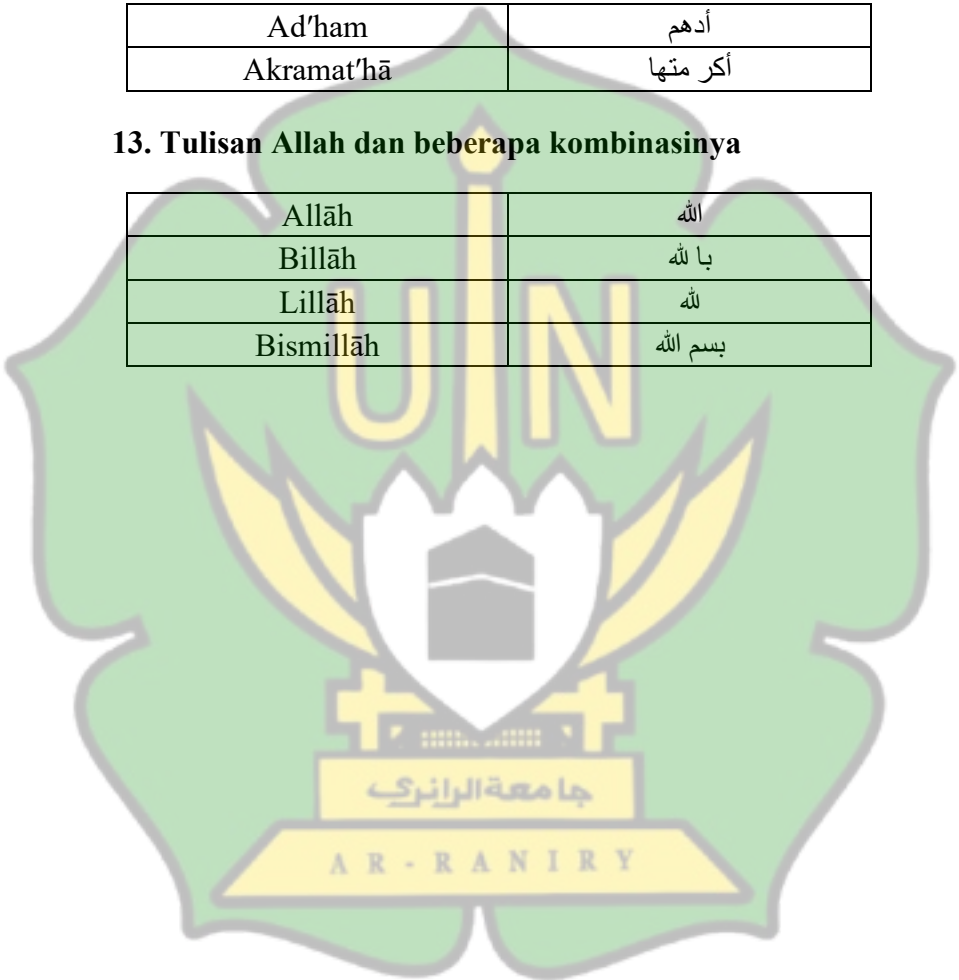
Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

12. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf "ه" (hā') dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتها

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بإله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena atas limpahan berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Sektor Pertanian Terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kawasan Barat Indonesia”**.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman, yang telah menjadi teladan dalam kehidupan serta sumber inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keIslaman.

Penyusunan tesis ini merupakan bagian dari proses akademik yang memerlukan ketekunan, kedisiplinan, dan tanggung jawab ilmiah. Dalam proses tersebut, penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muhammad Zuhlilmi, M.A. selaku Pembimbing I sekaligus Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan akademik sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si. selaku Pembimbing II sekaligus Sekretaris Program Studi yang telah memberikan masukan, arahan metodologis, serta koreksi yang konstruktif dalam penyempurnaan tesis ini, khususnya pada aspek analisis data dan penulisan ilmiah.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Program Studi, beserta seluruh dosen dan civitas akademika Program Pascasarjana yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat berharga selama masa studi.

Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, serta semangat yang tiada henti kepada penulis. Dukungan tersebut menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kebersamaan, bantuan, dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan tesis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan serta kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Keterbatasan tersebut dapat berupa ruang lingkup pembahasan yang masih terbatas, data yang mungkin belum sepenuhnya mewakili kondisi lapangan secara menyeluruh, metode analisis yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut, maupun penyusunan kalimat dan struktur penulisan yang masih memerlukan perbaikan agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam kajian pembiayaan sektor pertanian dan kebijakan yang mendukung kemaslahatan masyarakat, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Banda Aceh, 04 September 2025

Penulis,

Rismaini

NIM. 231008032

ABSTRAK

Judul Tesis : Pengaruh Pembiayaan Sektor Pertanian Terhadap Kemaslahatan Masyarakat di Kawasan Barat Indonesia
Nama Penulis/NIM : Rismaini/231008032
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, M.A
Pembimbing II : Dr. Khairul Amri, SE., M.Si
Kata Kunci (*Keywords*) : *Pembiayaan Sektor Pertanian; Kemaslahatan Masyarakat; Maqāṣid al-syarī'ah*

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya di kawasan Barat Indonesia yang didominasi wilayah perdesaan. Namun, keterbatasan akses pembiayaan, terutama pembiayaan berbasis syariah, masih menjadi kendala dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat tani. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data panel dari 10 provinsi di kawasan Barat Indonesia selama periode 2019–2024. Pembiayaan sektor pertanian oleh lembaga keuangan syariah digunakan sebagai variabel independen, sedangkan kemaslahatan masyarakat diproksikan melalui Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan petani, dan tingkat kemiskinan perdesaan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap peningkatan NTP dan pendapatan petani serta penurunan kemiskinan perdesaan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pembiayaan syariah berperan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan mendorong keadilan sosial. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan pembiayaan syariah sebagai instrumen pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Thesis Title : The Effect of Agricultural Sector Financing on Community Welfare in Western Indonesia
Author / Student ID : Rismaini / 231008032
Supervisor I : Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A
Supervisor II : Dr. Khairul Amri, S.E., M.Si
Keywords : *Agricultural Sector Financing; Community Welfare; Maqāṣid Shariah*

The agricultural sector plays a strategic role in Indonesia's economy, particularly in Western Indonesia where rural and agrarian activities dominate. However, limited access to financing, especially Sharia-based agricultural financing, remains a major constraint to improving farmers' welfare and overall community well-being. This study aims to examine the impact of agricultural sector financing on community welfare (maslahah) by integrating economic indicators and the maqāṣid al-shariah framework. This study employs a quantitative approach using panel data from 10 provinces in Western Indonesia over the period 2019–2024. Sharia-based agricultural financing serves as the independent variable, while Farmers' Terms of Trade, farmers' income, and rural poverty rates are used as proxies for community welfare. Panel data regression techniques, including the Common Effect Model, Fixed Effect Model, and Random Effect Model, are applied. The results indicate that agricultural sector financing has a statistically significant effect on increasing farmers' terms of trade and income and reducing rural poverty. These findings support the objectives of Maqāṣid al-Shariah, particularly the preservation of wealth (ḥifẓ al-māl), protection of life (ḥifẓ al-nafs), and promotion of social justice. This study highlights the importance of strengthening Sharia-based agricultural financing as an inclusive and sustainable policy instrument for rural development in Western Indonesia.

المخلص

عنوان الرسالة: تأثير تمويل القطاع الزراعي على مصلحة المجتمع في غرب إندونيسيا

اسم الباحث / الرقم الجامعي: ريسميني \ ٢٣١٠٠٨٠٣٢

المشرف الأول: د. محمد ذوالحلومي، ماجستير

المشرف الثاني: د. خير الأمري، بكالوريوس في اقتصاد، ماجستير في الاقتصاد

الكلمات المفتاحية: تمويل القطاع الزراعي؛ رفاهية المجتمع؛ مقاصد الشريعة

يُعدّ القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإندونيسي، ولا سيما في منطقة غرب إندونيسيا ذات الطابع الريفي. ومع ذلك، لا تزال محدودية الوصول إلى التمويل، خاصة التمويل الزراعي القائم على الشريعة الإسلامية، تشكل عائقًا أمام تحسين رفاهية المجتمع الزراعي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تمويل القطاع الزراعي على تحقيق مصلحة المجتمع من خلال دمج المؤشرات الاقتصادية ومنهج مقاصد الشريعة الإسلامية. استخدمت الدراسة المنهج الكمي بالاعتماد على بيانات بانل لعشر محافظات في غرب إندونيسيا خلال الفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٤. ويُعدّ التمويل الزراعي المقدم من المؤسسات المالية الإسلامية المتغير المستقل، في حين تمثّل مصلحة المجتمع ومؤشرات نسبة تبادل المزارعين، ودخل المزارعين، ومستوى الفقر الريفي. أظهرت نتائج تحليل بيانات البانل أن التمويل الزراعي يؤثر تأثيرًا معنويًا في رفع نسبة تبادل المزارعين وزيادة دخولهم، إلى جانب خفض معدلات الفقر في المناطق الريفية. وتنسجم هذه النتائج مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا سيما حفظ المال وحفظ النفس وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتؤكد الدراسة أهمية تعزيز التمويل الزراعي الإسلامي بوصفه أداة فاعلة لتحقيق التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.

DAFTAR ISI

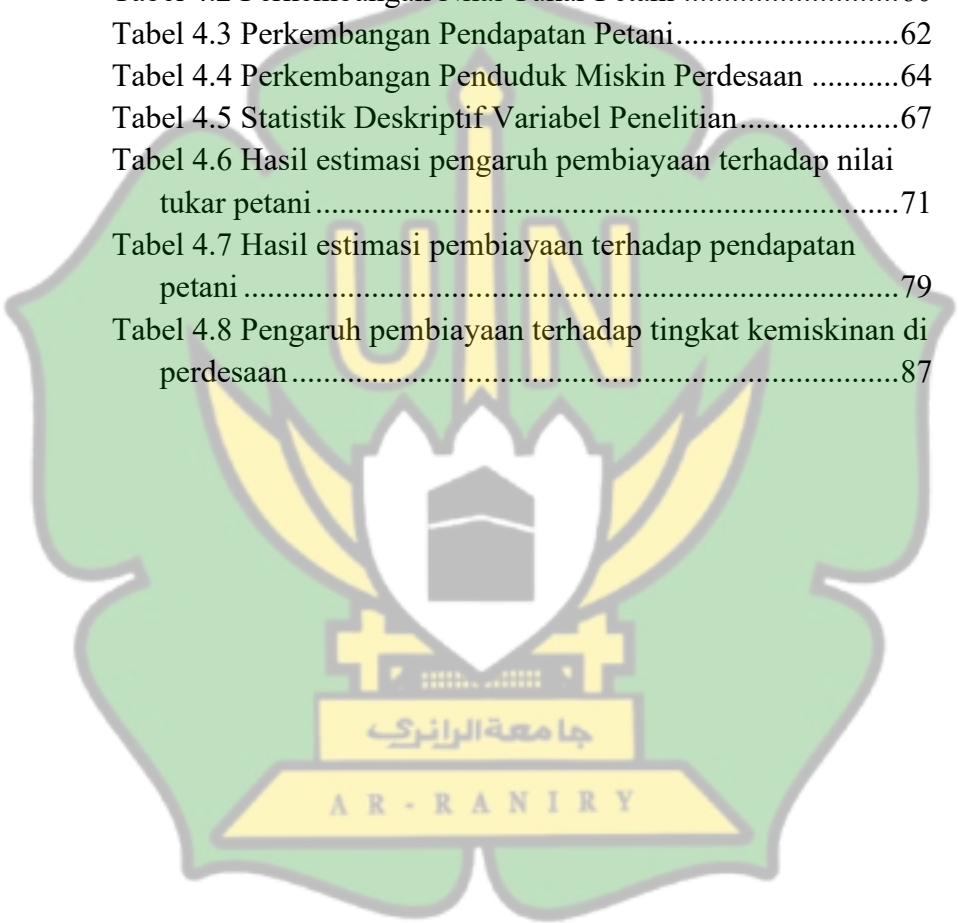
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB.....	v
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
المخلص.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.7. Kajian Pustaka.....	10
BAB II.....	21
LANDASAN TEORI.....	21
2.1. Bank Syariah.....	21
2.2. Pembiayaan Sektor Pertanian.....	23
2.2.1. Definisi dan Karakteristik Pembiayaan Pertanian.....	24
2.2.2. Risiko dan Ketidakpastian dalam Pembiayaan Pertanian.....	26
2.2.3. Permodalan Petani dan Perilaku Ekonomi Mikro.....	28

2.3. Teori Pembiayaan Syariah.....	31
2.3.1. Konsep Dasar Pembiayaan Syariah.....	31
2.3.2. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah dalam Sektor Pertanian	32
a. <i>Mudharabah</i>	33
b. <i>Musyarakah</i>	34
c. <i>Murabahah</i>	34
d. <i>Salam</i>	34
e. <i>Istishna</i>	35
2.3.3. Prinsip Pembiayaan Syariah: Keadilan, Amanah, dan Anti Riba	35
2.3.4. Pembiayaan Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Petani	36
2.4. Kemaslahatan Petani perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	38
2.5 Kemaslahatan Petani dalam Perspektif Ekonomi	40
2.5.1 Nilai Tukar Petani (NTP)	42
2.5.2 Pendapatan Petani	43
2.5.3 Kemiskinan Perdesaan Sebagai Indikator Kemaslahatan Petani.....	44
2.6. Keterkaitan antara Pembiayaan Sektor Pertanian dengan Kemaslahatan Petani.....	46
2.7. Kerangka Berpikir	48
2.8. Hipotesis Penelitian	49
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN.....	50
3.1. Metode Penelitian	50
3.2. Jenis dan Sumber Data	51
3.3. Operasional Variabel	51
3.5. Teknik Pengumpulan Data	53
3.6. Model Analisis Data	53
3.7. Pemilihan Model Regresi Panel	55
BAB IV	58
HASIL PEMBAHASAN.....	58
4.1 Gambaran Umum Data Penelitian.....	58

4.1.1. Perkembangan Pembiayaan Pertanian.....	59
4.1.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)	60
4.1.3. Perkembangan Pendapatan Petani.....	62
4.1.4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan	63
4.2. Hasil Statistik Deskriptif	66
4.3. Hasil Estimasi Variabel Penelitian	70
4.3.1. Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Nilai Tukar Petani.....	71
4.3.2. Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Nilai Tukar Petani dengan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	77
4.3.3. Analisis pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan petani	79
4.3.4. Analisis pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan petani dengan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	84
4.3.5. Analisis pengaruh pembiayaan terhadap tingkat Kemiskinan di perdesaan	87
4.3.6. Analisis pengaruh pembiayaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan dengan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>	92
BAB V	95
PENUTUP	95
Kesimpulan	95
Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	96
Buku & Kitab.....	97
Laporan & Dokumen Resmi.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Kajian Pustaka.....	15
Tabel 4.1 Perkembangan Pembiayaan Sektor Pertanian.....	59
Tabel 4.2 Perkembangan Nilai Tukar Petani	60
Tabel 4.3 Perkembangan Pendapatan Petani.....	62
Tabel 4.4 Perkembangan Penduduk Miskin Perdesaan	64
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	67
Tabel 4.6 Hasil estimasi pengaruh pembiayaan terhadap nilai tukar petani.....	71
Tabel 4.7 Hasil estimasi pembiayaan terhadap pendapatan petani	79
Tabel 4.8 Pengaruh pembiayaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan.....	87



DAFTAR GAMBAR

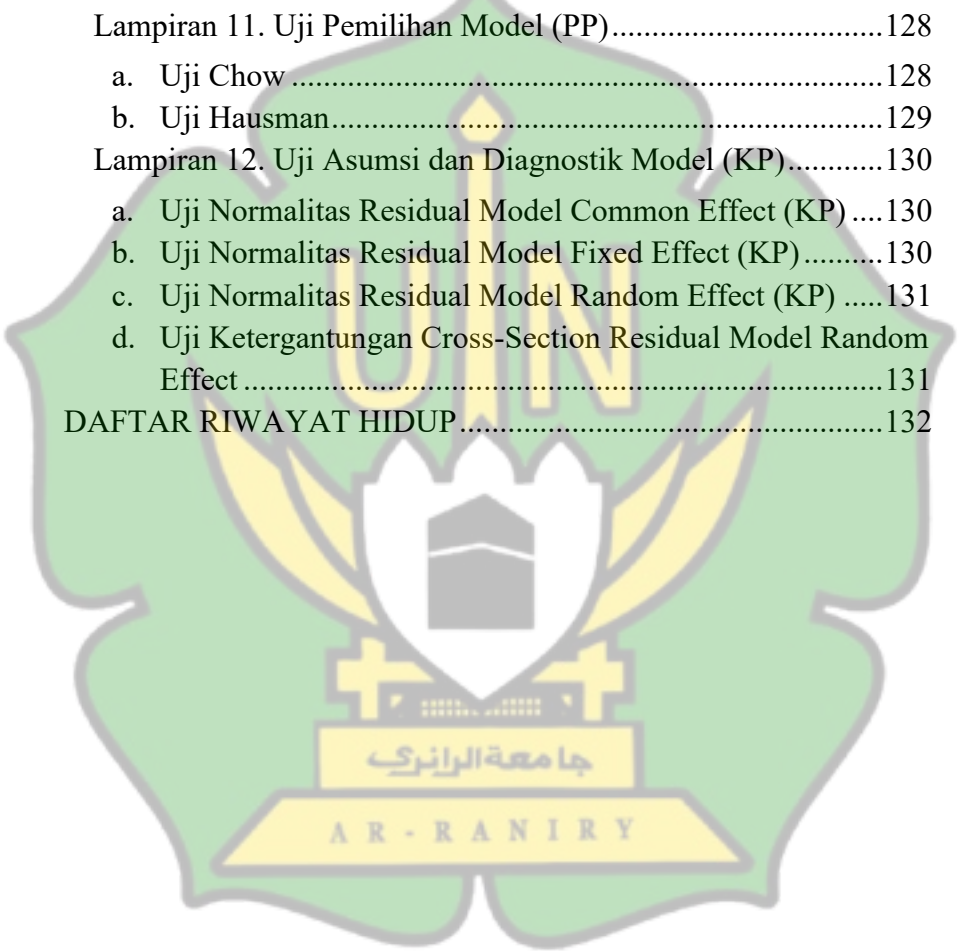
Gambar I. Skema Kerangka Berpikir.....49



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	109
Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian	109
Lampiran 2. Luas Wilayah, Serta Data Lahan Baku Sawah (LBS) dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) per- Provinsi	112
Lampiran 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	113
Lampiran 4. Regresi Panel Nilai Tukar Petani (NTP).....	114
a. Common Effect Model (CEM)	114
b. Fixed Effect Model (FEM).....	114
c. Random Effect Model (REM).....	115
Lampiran 5. Uji Pemilihan Model Nilai Tukar Petani (NTP) ..	116
a. Uji Chow	116
b. Uji Hausman.....	117
Lampiran 6. Uji Asumsi dan Diagnostik Model (NTP)	118
b. Uji Normalitas Residual Model Fixed Effect (NTP)	118
c. Uji Normalitas Residual Model Random Effect (NTP) ...	119
d. Uji Ketergantungan Cross-Section Residual Model Random Effect (LNTP)	119
Lampiran 7. Regresi Pendapatan Petani (PP)	120
a. Common Effect Model (CEM)	120
b. Fixed Effect Model (FEM).....	120
c. Random Effect Model (REM).....	121
Lampiran 8. Uji Pemilihan Model Pendapatan Petani (PP)	122
a. Uji Chow	122
b. Uji Hausman.....	123
Lampiran 9. Uji Asumsi dan Diagnostik Model (PP)	124
a. Uji Normalitas Residual Model Common Effect (PP).....	124
b. Uji Normalitas Residual Model Fixed Effect (PP).....	124
c. Uji Normalitas Residual Model Random Effect (PP)	125

d. Uji Ketergantungan Cross-Section Residual Model Random Effect (PP).....	125
Lampiran 10. Regresi Kemiskinan di Perdesaan (KP)	126
a. Common Effect Model (CEM)	126
b. Fixed Effect Model (FEM).....	126
c. Random Effect Model (REM).....	127
Lampiran 11. Uji Pemilihan Model (PP).....	128
a. Uji Chow	128
b. Uji Hausman.....	129
Lampiran 12. Uji Asumsi dan Diagnostik Model (KP).....	130
a. Uji Normalitas Residual Model Common Effect (KP)	130
b. Uji Normalitas Residual Model Fixed Effect (KP)	130
c. Uji Normalitas Residual Model Random Effect (KP)	131
d. Uji Ketergantungan Cross-Section Residual Model Random Effect	131
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	132



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris dengan sektor pertanian yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan BPS, sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan) terus menjadi kontributor signifikan terhadap PDB nasional.¹ Sektor ini juga menyerap porsi besar tenaga kerja; misalnya, pada Agustus 2025, 28,15% dari total angkatan kerja berada di sektor pertanian.² Sektor pertanian memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai penopang ketahanan pangan, penyerap tenaga kerja, dan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk di wilayah Perdesaan.³

Di kawasan bagian barat Indonesia, sektor pertanian memainkan peran penting dalam pembangunan regional karena karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang berbeda dibanding kawasan lain seperti Jawa atau Kalimantan.⁴ Proses transformasi ekonomi yang terjadi dalam dua dekade terakhir, termasuk pergeseran dari pertanian ke sektor jasa dan industri, membuka peluang baru sekaligus menghadirkan tantangan bagi petani dalam mengakses sumber daya ekonomi, terutama pembiayaan.⁵

Berbagai inisiatif kebijakan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, pembiayaan melalui BPR/BPRS, dan

¹BPS, *Agricultural Indicators* (2020). <https://www.bps.go.id/en/publication/2021/10/08/d87b75366a02dbdbc6df37a0/a-gricultural-indicators-2020>.

² Badan Pusat Statistik. (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025* (Berita Resmi Statistik No. 103/11/Th. XXVIII). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>

³ Badan Pusat Statistik (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.

⁴ The Jakarta Post (2024). "Agricultural Development Takes Priority in Western Indonesia." Diakses dari: <https://jakpost.net>

⁵ Kristriantono, P., & Yuliawati, Y. (2022). Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* (JSEP), Vol.18, No.2, hal. 141–158.

skema syariah oleh lembaga keuangan mikro merupakan upaya nyata untuk meningkatkan akses pembiayaan. Namun, efektivitas pembiayaan tersebut terhadap pencapaian kemaslahatan masyarakat (*public welfare*) yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan kemaslahatan spiritual, belum terukur secara komprehensif. Lebih jauh lagi, distribusi pembiayaan pertanian masih cenderung terpusat di daerah dengan infrastruktur keuangan yang lebih maju, sementara daerah terpencil justru masih tertinggal. Pembiayaan sektor pertanian ialah salah satu instrumen kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian,⁶ pendapatan rumah tangga tani,⁷ dan pencapaian kemaslahatan maupun ketahanan pangan.⁸ Di Indonesia, sejumlah inisiatif (program pembiayaan, peran BPR/BPRS, fasilitas kredit mikro, program kementerian) menargetkan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tani.⁹ Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa penyaluran kredit untuk sektor pertanian masih menjadi komponen substansial dari total kredit regional.¹⁰ Namun, distribusinya tidak merata antar daerah, di mana provinsi dengan infrastruktur keuangan yang lebih baik seperti Sumatera Utara dan Lampung cenderung menikmati porsi kredit lebih besar dibandingkan provinsi lainnya di kawasan barat Indonesia seperti Aceh atau Bengkulu.¹¹ Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan akses pembiayaan berbasis

⁶ Setiawati, R. & Permana, R. (2025). Dampak sistem pembayaran pembiayaan usahatani terhadap produktivitas usahatani padi sawah lahan rawa. *Jurnal Agriovet*, Vol.7 No. 2, hal. 227-244.

⁷ Zuhelmi, Z. et al. (2025). Pengaruh kredit usaha tani dalam pembangunan perdesaan: Studi kasus program PUAP. *Jurnal Niara*, Vol. 17, No. 3, hal. 146-154.

⁸ Hasanawi, M. T. et al. (2021). Peran lembaga keuangan mikro pertanian bagi ketahanan pangan petani Indonesia. *Jurnal AGRIBIS* Vol 14. No. 1 Hal. 1669-1680.

⁹ Yasin, M. (2020). Keragaman sumber pembiayaan usaha tani padi ditinjau dari perspektif Islam. *Jurnal Ekonobis*, Vol. 6, No. 1, hal. 147-167

¹⁰ Badan Pusat Statistik (2023). *Statistik Keuangan Daerah 2023*. Jakarta: BPS.

¹¹ Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2024). *Statistik sarana pertanian 2020–2024 (Statistical Yearbook of Agricultural Facilities 2024)*. Jakarta: Kementerian Pertanian. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Statistik_Sarana_Pertanian_2024_compressed.

sosial dan agraris, yang jika tidak diatasi berpotensi memperkuat kesenjangan kemaslahatan antar wilayah.¹²

Kawasan bagian barat Indonesia yakni menyimpan potensi agraris yang besar dengan komoditas strategis seperti sawit, kakao, kopi, dan tanaman pangan lainnya, potensi ini diakui dalam studi dinamika ekonomi pertanian yang menunjukkan bahwa sektor ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³ Namun, banyak petani di wilayah ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan formal, yang menghambat kemampuan mereka untuk mengadopsi teknologi modern, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat stabilitas pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Akmal dan Wulandari (2022) mencatat bahwa sebagian besar petani masih sulit mengakses permodalan komersial formal dari lembaga keuangan.¹⁴ Selain itu, disparitas pembiayaan masih terjadi: wilayah dengan infrastruktur keuangan lebih maju cenderung mendapat aliran kredit lebih besar dibanding daerah terpencil, ini didukung oleh analisis tentang prinsip pembiayaan pertanian dan realitas di lapangan.¹⁵

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembiayaan untuk sektor pertanian, seperti skema pembiayaan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, yaitu kemudahan akses petani terhadap layanan keuangan formal seperti

¹² Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Surveillance Perbankan Indonesia / Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR–BPRS (RP2B) 2024–2027*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Documents/Laporan%20Surveillance%20Perbankan%20Indonesia%20-%20Triwulan%20III%202023>.

¹³ Fitriadi, et al. (2024). Convergence in The Agricultural Economic Industry in Indonesia: A Dynamic. *JSEP: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, Vol. 17 No. 2 Juli 2024: 217-232.

¹⁴ Akmal dan Wulandari, (2022). Pengetahuan Petani Kentang terhadap Prosedur Pembiayaan Online di Kecamatan Pangalengan. *Jurnal Agrikultura*, Vol. 33, No. 2, hal. 138-146.

¹⁵ Putri, et al, (2025). Penerapan Prinsip Pembiayaan Dalam Penilaian Kredit Kepada Petani Cabai Di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi. *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpa*. Vol. 10, No. 1, hal. 46-55.

kredit, tabungan, dan pembiayaan. Namun demikian, tingkat literasi keuangan petani yang masih rendah menyebabkan akses tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Buono, et al., (2023) di Sukabumi menemukan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan menunjukkan fakta bahwa petani masih sangat bergantung pada permodalan eksternal dan membutuhkan literasi keuangan.¹⁶ Penelitian lain yang dilakukan oleh Hendrarini dan Soedarto (2022) di Madura menunjukkan pengetahuan dan sikap finansial petani masih terbatas, terutama dalam pengelolaan modal usaha tani.¹⁷ Dalam literatur ekonomi Islam, aspek inklusi keuangan syariah juga menjadi penting: penelitian yang dilakukan oleh Buono, et al., (2023) menunjukkan literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah digital di sektor pertanian berpengaruh terhadap akses modal petani.¹⁸ Selain itu, Hariyani (2022), juga menunjukkan dengan pelatihan literasi keuangan pada rumah tangga petani terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman pengelolaan keuangan usaha tani.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan petani dalam mengelola keuangan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pemanfaatan pembiayaan yang diterima.

Lebih jauh, efektivitas pembiayaan tidak hanya dapat diukur dari peningkatan pendapatan atau produktivitas. Dalam pembangunan berkelanjutan, penting mengevaluasi kemaslahatan masyarakat secara multidimensional aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Konsep ini mirip dengan gagasan pembangunan inklusif yang diangkat dalam literatur pertanian berkelanjutan dan ekonomi komunitas.²⁰ Hal ini sejalan dengan

¹⁶ Buono, et al, (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Pada Sektor Pertanian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9, No. 3, hal. 3949-3955.

¹⁷ Hendrarini, H, dan Soedarto, T, (2022). Mengukur Literasi Keuangan Petani Tanaman Pangan di Madura. *Jurnal SEMAGRI*, Vol. 3, No. 1, hal. 71-83.

¹⁸ Buono, et al, (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah Digital Pada Sektor Pertanian.

¹⁹ Hariyani, N, (2022). Efektivitas Pelatihan Literasi Keuangan bagi Rumah Tangga Petani, *Jurnal AgroSainTa*. Vol. 6, No.2, hal. 37-44

²⁰ Syafitri & Sari, (2023). Optimasi Pengelolaan Keuangan Pertanian dan Peternakan Berkelanjutan di Perdesaan, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*. Vol. 4, No. 3, hal. 616-628

kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui *Roadmap Keuangan Berkelanjutan II (2021–2025)* serta peluncuran Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 tahun 2025, yang menempatkan pertanian berkelanjutan sebagai sektor prioritas dalam pembiayaan hijau.²¹

Efektivitas pembiayaan dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat (*public welfare*) membutuhkan kajian yang lebih dari sekedar peningkatan pendapatan. Kemaslahatan terutama dalam perspektif ekonomi Islam, memiliki cakupan yang multidimensi, yakni meliputi dari kemaslahatan material, spiritual, moral, hingga kemasyarakatan. Konsep *maqāṣid al-syariah* memberikan panduan indikator kemaslahatan (*maslahah*) yang sistematis, meliputi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat termasuk menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*)²² dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab khalifah di bumi, Semua aspek tersebut menjadi pedoman utama dalam mengembangkan sistem keuangan syariah agar berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan sosial.²³

Namun, Meskipun penelitian mengenai pembiayaan sektor pertanian dan kemaslahatan petani telah banyak dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Pertama, sebagian besar studi terdahulu masih berfokus pada pengukuran kemaslahatan yang bersifat material, seperti pendapatan dan konsumsi, tanpa mengaitkannya dengan konsep kemaslahatan secara komprehensif dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mencakup dimensi yang lebih luas. Kedua, dari sisi metodologi, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan *cross section* atau *time series*, sehingga belum mampu

²¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap keuangan berkelanjutan II (2021–2025)*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-2021-2025.aspx>

²² Chapra, M. U. (2020). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: Islamic Foundation.

²³ Kamali, M. H. (2021). *Maqasid al-shariah and sustainable development: The environmental dimension*. *Islamic Quarterly*, 65(3), 221–240.

menangkap dinamika perubahan antar wilayah dan antarwaktu secara simultan, khususnya dalam konteks kawasan Barat Indonesia yang memiliki karakteristik agraris dan tantangan pembiayaan yang spesifik.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui dua pendekatan utama. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan konsep kemaslahatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* kedalam analisis ekonomi pertanian, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya menekankan aspek ekonomi. Kedua, penelitian ini menggunakan data panel dari 10 provinsi di Kawasan Barat Indonesia selama periode 2019–2024, yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dinamika pengaruh pembiayaan sektor pertanian baik secara lintas wilayah maupun lintas waktu.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun empiris. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mengkaji kemaslahatan masyarakat. Secara empiris, penelitian ini menyediakan bukti yang lebih komprehensif mengenai pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat di kawasan Barat Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembiayaan sektor pertanian yang lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan, dengan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial yang lebih luas dalam meningkatkan kemaslahatan petani. Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan penelitian atau riset yang menganalisis **pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat di kawasan Barat Indonesia.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Terbatasnya akses pembiayaan bagi petani di kawasan Barat Indonesia, terutama dari lembaga keuangan formal seperti perbankan syariah, disebabkan oleh persyaratan jaminan, literasi keuangan rendah, dan minimnya produk pembiayaan pertanian berbasis syariah.
2. Ketimpangan distribusi pembiayaan sektor pertanian antar-provinsi, di mana provinsi dengan infrastruktur dan akses keuangan yang lebih baik mendapat pembiayaan lebih besar, sehingga meningkatkan ketidakmerataan kemaslahatan.
3. Belum optimalnya penyaluran pembiayaan syariah untuk sektor pertanian, meskipun akad-akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* berpotensi besar mendukung usaha tani sesuai prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.
4. Rendahnya tingkat kemaslahatan masyarakat tani, tercermin dari indikator ekonomi dan sosial seperti rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), tinggi angka kemiskinan perdesaan, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.
5. Minimnya kajian empiris berbasis data panel terbaru (2019–2024) yang menghubungkan pembiayaan pertanian dengan kemaslahatan masyarakat secara komprehensif dan multidimensional, terutama di kawasan Barat Indonesia sebagai wilayah strategis namun relatif kurang terangkat.

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Wilayah: Penelitian hanya mencakup 10 provinsi di kawasan Barat Indonesia, yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, dan Bangka Belitung.
2. Periode Waktu: Analisis pembiayaan sektor pertanian dan indikator kemaslahatan masyarakat dibatasi pada rentang waktu tahun 2019 hingga 2024.
3. Variabel Pembiayaan Pertanian: Pembiayaan sektor pertanian dalam penelitian ini merujuk pada data pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan

syariah, termasuk Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Data diambil dari *Statistik Perbankan Syariah (SPS)* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mencakup pembiayaan modal kerja dan investasi yang dialokasikan untuk sektor pertanian selama periode 2019–2024.

4. Indikator Kemaslahatan: Kemaslahatan masyarakat diukur menggunakan pendekatan ekonomi dan *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan pelaku tani, tingkat kemiskinan perdesaan, pendidikan, kesehatan, serta keamanan pangan.
5. Metode Analisis: Penelitian menggunakan data panel dengan pendekatan kuantitatif dan model ekonometrika (misal: *Fixed Effect* atau *Random Effect Model*), sehingga tidak menyoroti analisis kualitatif mendalam atau studi kasus individual.
6. Sumber Data: Data yang digunakan bersumber dari institusi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Pertanian; sehingga keterbatasan akurasi dan kelengkapan data mengikuti kualitas dan ketersediaan sumber tersebut.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan sektor pertanian di kawasan Barat Indonesia selama periode 2019–2024?
2. Bagaimana kondisi kemaslahatan masyarakat di kawasan Barat Indonesia ditinjau dari indikator ekonomi dan *maqāṣid al-syarī'ah* pada periode yang sama?
3. Apakah terdapat pengaruh signifikan pembiayaan sektor pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat di kawasan Barat Indonesia?
4. Bagaimana variasi pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat antar-provinsi di kawasan Barat Indonesia?
5. Sejauh mana data panel mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibanding studi sebelumnya

terkait hubungan pembiayaan pertanian dan kemaslahatan masyarakat?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perkembangan pembiayaan sektor pertanian di kawasan Barat Indonesia selama periode 2019–2024.
2. Mengukur tingkat kemaslahatan masyarakat tani di kawasan Barat Indonesia berdasarkan indikator ekonomi dan *maqāṣid al-syarī'ah*.
3. Menganalisis pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat di kawasan Barat Indonesia dengan menggunakan pendekatan data panel.
4. Mengidentifikasi perbedaan pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap tingkat kemaslahatan antar provinsi di kawasan Barat Indonesia.
5. Memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based*) untuk optimalisasi pembiayaan syariah dalam peningkatan kemaslahatan masyarakat tani.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi pertanian, ekonomi Islam, dan studi kemaslahatan (kemaslahatan) masyarakat.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan teori mengenai hubungan antara pembiayaan syariah dan kemaslahatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, yang masih relatif jarang dikaji secara empiris.

- c. Menjadi acuan akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji pembiayaan pertanian menggunakan data panel dan pendekatan multidimensi kemaslahatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kepada lembaga keuangan syariah dan pemerintah terkait efektivitas penyaluran pembiayaan di sektor pertanian untuk peningkatan kemaslahatan petani.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi Bank Syariah, BPRS, dan lembaga terkait lainnya dalam merancang produk pembiayaan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
- c. Memberikan gambaran bagi pengambil kebijakan di sektor pertanian mengenai potensi dan hambatan pembiayaan di kawasan Barat Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

3. Manfaat Sosial

- a. Memberikan wawasan bagi masyarakat umum bahwa pembiayaan yang tepat guna berperan penting dalam meningkatkan kemaslahatan petani, bukan hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan spiritual.
- b. Mendorong peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan petani dan pemangku kepentingan di sektor pertanian.

1.7. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang

akan dilakukan. Dibawah ini peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang pernah dilakukan.

1. Aini, R. & Kamilah, K. (2025). Solusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian untuk Mencapai Sustainable Development Goals. *Jurnal Ecoplan*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema keuangan syariah yang efektif sebagai solusi meliputi pembiayaan salam, *mudharabah*, *musyarakah*, dan wakaf. Salam membantu petani memperoleh modal kerja di awal musim tanam, sedangkan *mudharabah* dan *musyarakah* menciptakan kemitraan adil dengan pembagian risiko dan keuntungan. Wakaf produktif mendukung infrastruktur pertanian dan pemberdayaan petani secara jangka panjang tanpa beban finansial tambahan. Pembiayaan syariah ini berdampak positif pada pencapaian SDGs, khususnya dalam meningkatkan ketahanan, produksi dan konsumsi bertanggung jawab, serta perbaikan iklim.

Adapun dari penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pembiayaan pertanian berbasis syariah dan dampaknya terhadap kemaslahatan, serta menempatkan instrumen keuangan syariah sebagai sarana pembangunan agraris. Namun, penelitian mereka bersifat konseptual dan berfokus pada skema ideal akad syariah serta kaitannya dengan SDGs tanpa menggunakan data empiris, tidak membatasi wilayah tertentu, dan tidak menggunakan data resmi maupun analisis ekonometrika. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kuantitatif dengan data panel 2019–2024 pada 10 provinsi di Kawasan Barat Indonesia untuk mengukur secara nyata pengaruh pembiayaan pertanian terhadap kemaslahatan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Sa'diyah, et al.. (2025). Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi Melalui Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Kabupaten Pati. *I-Com: Indonesian Community Journal*, Hasil menunjukkan bahwa dengan penguatan

literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat mampu menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai produk dan layanan perbankan syariah serta membantu perencanaan keuangan pribadi petani menjadi lebih baik.

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada pembahasan mengenai kemaslahatan petani yang terkait dengan keuangan syariah. Perbedaannya, penelitian Sa'diyah et al.. menekankan literasi dan inklusi keuangan di satu wilayah dengan pendekatan deskriptif, sedangkan penelitian ini mengukur secara empiris pengaruh pembiayaan sektor pertanian menggunakan data panel antar provinsi dan dianalisis melalui perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

3. Penelitian oleh Maulana dan Deni Lubis, D. (2025) Determinan Pembiayaan di Sektor Pertanian pada Perbankan Syariah Selama Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, FDR, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan pertanian, sedangkan variabel NPF, Inflasi, dan PUAS berpengaruh negatif terhadap pembiayaan pertanian. Dalam rangka meningkatkan pembiayaan dan produktivitas di sektor pertanian, pemerintah diharapkan memberi insentif kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan di sektor pertanian.

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada pembahasan mengenai sektor pertanian, penggunaan pendekatan kuantitatif, serta penekanan pada pentingnya pembiayaan syariah untuk peningkatan produktivitas petani. Perbedaannya, penelitian Maulana dan Deni Lubis berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pertanian seperti DPK, FDR, NPF, inflasi, dan PDB selama masa Covid-19, sedangkan penelitian ini menilai dampak pembiayaan pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat berbasis *maqāsid al-syarī'ah*. Selain itu, cakupan penelitian mereka bersifat nasional, sementara penelitian ini menggunakan data panel

provinsi di Kawasan Barat Indonesia dan mengintegrasikan analisis multidimensi terhadap kemaslahatan petani, yang tidak dibahas dalam studi mereka.

4. Nur, M. A., et al.. (2022). Agricultural financing risk and ib agricultural financing: A long relationship, *Journal of Islamic Finance and Accounting*. Dengan hasil penelitian menggunakan estimasi ARDL, temuan menunjukkan bahwa dalam hubungan jangka panjang, kemaslahatan petani tidak berpengaruh pada sektor pertanian, sementara variabel-variabel lainnya berpengaruh signifikan. Studi ini menawarkan implikasi berharga yang menunjukkan bahwa keberadaan perbankan Islam dapat dianggap sebagai solusi keuangan yang layak di sektor pertanian.

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada kajian tentang pembiayaan pertanian berbasis keuangan syariah dan hubungannya dengan kemaslahatan atau kemaslahatan petani. Perbedaannya, penelitian Nur et al.. menggunakan model ARDL untuk menganalisis hubungan jangka panjang pada tingkat makro, sedangkan penelitian ini memakai data panel provinsi 2019–2024 untuk mengukur pengaruh langsung pembiayaan pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Temuan mereka menunjukkan bahwa kemaslahatan petani tidak berpengaruh terhadap pembiayaan pertanian dalam jangka panjang, sementara penelitian ini justru fokus melihat bagaimana pembiayaan dapat meningkatkan kemaslahatan, bukan sebaliknya.

5. Nasution, R. A. & Kamilah, K. (2025). Evaluasi Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses modal, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani. Namun, beberapa tantangan seperti rendahnya

literasi keuangan petani, fluktuasi harga hasil pertanian, dan risiko gagal panen masih perlu diatasi. Studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat literasi keuangan, pengembangan produk asuransi syariah, serta peningkatan digitalisasi layanan keuangan untuk mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan.²⁴

Adapun relevansi penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada pembahasan mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan akses modal, produktivitas pertanian, dan kemaslahatan petani. Perbedaannya, penelitian Nasution & Kamilah bersifat evaluatif dan lebih menekankan tantangan seperti literasi keuangan rendah, fluktuasi harga, dan risiko gagal panen, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan layanan keuangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan data panel 2019–2024 di 10 provinsi Kawasan Barat Indonesia dan mengukur secara empiris pengaruh pembiayaan pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat berbasis *maqāṣid al-syarī'a.*, sehingga menekankan hubungan kausal dan analisis multidimensi yang tidak dibahas dalam studi tersebut.

6. Purwanto (2018), Kontribusi Pembiayaan Sektor Pertanian Bank Syariah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Pulau Sumatera Periode 2016-2017. *SHARE Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Hasil dari studi penelitian ini adalah pertama pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani (nilai Prob 0, 6563 > 0,05). Kedua hasil analisis membuktikan jika pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan petani di Sumatera (nilai Prob 0.0004<0,05).

²⁴ Nasution, R. A., & Kamilah, K. (2025). Evaluasi Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 80–89. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.348>

Adapun penelitian Purwanto memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pembiayaan sektor pertanian berbasis perbankan syariah dan dampaknya terhadap kemaslahatan petani di Pulau Sumatera. Namun, penelitian tersebut menggunakan data lama (2016–2017) dan menemukan bahwa pembiayaan oleh BUS/UUS tidak signifikan dan oleh BPRS berpengaruh negatif terhadap kemaslahatan, sedangkan penelitian ini akan menggunakan data panel 2019–2024, mencakup 10 provinsi di Kawasan Barat Indonesia, serta mengukur dampak pembiayaan terhadap kemaslahatan masyarakat secara empiris dengan pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga hasilnya lebih relevan, terkini, dan multidimensi.

Tabel 1.1
Ringkasan Kajian Pustaka

No	Penulis/ Tahun/ Judul	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaannya
1	Aini & Kamilah, (2025). Solusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian untuk Mencapai Sustainable Development Goals.	Menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema keuangan syariah yang efektif sebagai solusi meliputi pembiayaan salam, <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , wakaf. Salam membantu petani memperoleh modal kerja di awal musim tanam, sedangkan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> menciptakan kemitraan adil dengan pembagian risiko dan keuntungan.	Meskipun sama-sama membahas pembiayaan pertanian syariah, penelitian ini berbeda karena fokus utamanya adalah mengukur dampak pembiayaan secara empiris terhadap kemaslahatan masyarakat perdesaan. Penelitian sebelumnya bersifat konseptual dan tidak menggunakan data lapangan,

		<p>Wakaf produktif mendukung infrastruktur pertanian dan pemberdayaan petani secara jangka panjang tanpa beban finansial tambahan. Pembiayaan syariah ini berdampak positif pada pencapaian SDGs, khususnya dalam meningkatkan ketahanan, produksi dan konsumsi bertanggung jawab, serta perbaikan iklim.</p>	<p>sementara penelitian ini memanfaatkan data panel 2019–2024 dari 10 provinsi di Kawasan Barat Indonesia untuk menilai pengaruh nyata pembiayaan terhadap pencapaian <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i></p>
2	<p>Selanjutnya, Sa'diyah, et al. (2025). Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi Melalui Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Kabupaten Pati.</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa dengan penguatan literasi dan inklusi keuangan sehingga masyarakat mampu menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai produk dan layanan perbankan syariah serta membantu perencanaan keuangan pribadi petani menjadi lebih baik.</p>	<p>Penelitian sebelumnya relevan karena membahas kemaslahatan petani dan keuangan syariah, tetapi fokusnya pada literasi dan inklusi keuangan secara deskriptif di satu wilayah, sedangkan penelitian ini mengukur secara empiris pengaruh pembiayaan pertanian antar provinsi dengan pendekatan</p>

			<i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>
3	<p>Penelitian oleh Maulana dan Deni Lubis, (2025). Determinant Pembiayaan di Sektor Pertanian pada Perbankan Syariah Selama Covid-19 di Indonesia.</p>	<p>Menemukan bahwa penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, FDR, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan pertanian, sedangkan variabel NPF, Inflasi, dan PUAS berpengaruh negatif terhadap pembiayaan pertanian. Dalam rangka meningkatkan pembiayaan dan produktivitas di sektor pertanian, pemerintah diharapkan memberi insentif kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan di sektor pertanian.</p>	<p>Penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama-sama membahas sektor pertanian dan pembiayaan syariah secara kuantitatif, tetapi penelitian sebelumnya menitikberatkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan selama masa Covid-19 secara nasional, sedangkan penelitian ini menilai dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat berbasis <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>,</p>

Sambungan Tabel. 1

No	Penulis (Tahun)	Hasil Penelitian	Relevansi & Kesenjangan
4	Adapun penelitian Nur, et al. (2022). Agricultural financing risk and its agricultural financing: A long relationship	Dengan hasil penelitian menggunakan estimasi ARDL, temuan menunjukkan bahwa dalam hubungan jangka panjang, kemaslahatan petani tidak berpengaruh pada sektor pertanian, sementara variabel-variabel lainnya berpengaruh signifikan. Studi ini menawarkan implikasi berharga yang menunjukkan bahwa keberadaan perbankan Islam dapat dianggap sebagai solusi keuangan yang layak di sektor pertanian.	Dengan penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji pembiayaan pertanian syariah dan kemaslahatan petani, tetapi penelitian sebelumnya menggunakan model ARDL pada tingkat makro untuk menganalisis hubungan jangka panjang, sedangkan penelitian ini memanfaatkan data panel provinsi 2019–2024 untuk mengukur pengaruh langsung pembiayaan terhadap kemaslahatan masyarakat berbasis <i>maqāsid al-syarī'ah</i> .
5	Sementara itu, Nasution & Kamilah. (2025). Evaluasi Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses modal, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani.	Penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama-sama menyoroti peran lembaga keuangan syariah dalam produktivitas dan kemaslahatan

	Pangan di Indonesia.	Namun, beberapa tantangan seperti rendahnya literasi keuangan petani, fluktuasi harga hasil pertanian, dan risiko gagal panen masih perlu diatasi. Studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat literasi keuangan, pengembangan produk asuransi syariah, serta peningkatan digitalisasi layanan keuangan untuk mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan nasional..	petani, tetapi penelitian sebelumnya bersifat evaluatif, sedangkan penelitian ini menggunakan data panel 2019–2024 untuk mengukur pengaruh pembiayaan pertanian terhadap kemaslahatan berbasis <i>maqāsid al-syarī'ah</i>
6	Purwanto (2018), Kontribusi Pembiayaan Sektor Pertanian Bank Syariah Terhadap Kesejahteraan Petani Di Pulau Sumatera Periode 2016-2017.	Hasil dari studi penelitian ini adalah pertama pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BUS dan UUS di pulau Sumatera tahun 2016-2017 tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan petani (nilai Prob 0,6563 > 0,05). Kedua hasil analisis membuktikan jika pembiayaan sektor pertanian oleh BPRS di pulau Sumatera tahun 2016-2017	Penelitian Purwanto dan penelitian ini sama-sama mengkaji pembiayaan pertanian syariah dan kemaslahatan petani di Sumatera, tetapi Purwanto menggunakan data 2016–2017 dan menemukan pengaruh tidak signifikan atau negatif,

		<p>berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan petani di Sumatera (nilai Prob $0.0004 < 0,05$).</p>	<p>sedangkan penelitian ini memanfaatkan data panel 2019–2024 di 10 provinsi untuk mengukur dampak pembiayaan terhadap kemaslahatan berbasis <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> secara empiris dan multidimensi.</p>
--	--	--	--

Sumber data: diolah, 2025



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dalam operasional, produk, serta tata kelolanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya kaidah muamalah yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Esensi dari perbankan syariah adalah menghindari praktik yang dilarang syariah seperti riba (tambahan yang bersifat eksploitatif), *gharar* (ketidakjelasan dalam akad), dan *maisir* (spekulasi atau perjudian), serta menegakkan keadilan melalui mekanisme kerja sama (*syirkah*), bagi hasil (*profit and loss sharing*), serta akad jual beli yang halal.²⁵ Perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional adalah paradigma bahwa keuntungan tidak semata-mata menjadi tujuan akhir, melainkan harus diiringi dengan keberkahan, keadilan, dan distribusi kemaslahatan.²⁶

Dalam perspektif ekonomi Islam, perbankan syariah memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.²⁷ Kedua, sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan dengan tetap berlandaskan nilai moral dan etika Islam.²⁸ Posisi ini menjadikan perbankan syariah bukan hanya instrumen ekonomi,

²⁵Antonio, M. S. (2021). *Islamic finance and sustainability*. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 101–115.

²⁶ Chapra, M. U. (2019). *The future of economics: An Islamic perspective*. Markfield: Islamic Foundation

²⁷ Ascarya. (2022). *Maqashid al-shariah in Islamic finance*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.

²⁸ Hasan, Z., & Haron, S. (2021). Green banking practices in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 512–529.

tetapi juga instrumen sosial yang berkontribusi pada terwujudnya kemaslahatan.

Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang menjadi tonggak awal sistem keuangan Islam modern di tanah air.²⁹ Kemudian diperkuat oleh kerangka hukum dengan terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang secara eksplisit menegaskan dual fungsi perbankan syariah, yaitu:

1. Fungsi komersial, yakni berorientasi pada keuntungan dengan tetap mematuhi prinsi *maqāṣid al- syarī'ah*, prinsip-prinsip syariah.
2. Fungsi sosial, yakni mendukung kemaslahatan masyarakat melalui penyaluran dana pada sektor produktif, termasuk pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).³⁰

Selain itu, perbankan syariah di Indonesia juga diatur dalam *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menekankan pentingnya inovasi produk, penguatan tata kelola, serta kontribusi terhadap keuangan berkelanjutan.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah bukan hanya bagian dari sistem keuangan nasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

²⁹ Bank Muamalat Indonesia. (2020). *Annual report*. Jakarta: BMI.

³⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Roadmap Perbankan Syariah 2021–2025*. Jakarta: OJK.

2.2. Pembiayaan Sektor Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, terutama karena kontribusinya dalam menyediakan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas sosial.³² Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 sektor pertanian menyumbang sekitar 12,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 29% tenaga kerja.³³ Hal ini menunjukkan bahwa pertanian tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan lingkungan yang luas.

Namun, sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya teknologi produksi, fluktuasi harga komoditas, serta dampak perubahan iklim.³⁴ Keterbatasan akses pembiayaan menjadi isu sentral, sebab mayoritas petani kecil tidak memiliki jaminan yang cukup atau rekam jejak kredit yang memadai untuk mengakses dana dari lembaga keuangan konvensional.³⁵ Akibatnya, banyak petani masih bergantung pada tengkulak atau lembaga informal dengan bunga tinggi, yang justru menjerat mereka pada siklus kemiskinan.

Dalam konteks inilah perbankan, termasuk perbankan syariah, memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian melalui skema pembiayaan yang inklusif dan

³² Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *The state of food and agriculture 2021: Making agri-food systems more resilient to shocks and stresses*. Rome: FAO.

³³ Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian 2022*. Jakarta: BPS.

³⁴ Rahman, A., & Susanto, H. (2021). Climate change and agricultural challenges in Indonesia. *Journal of Environmental and Agricultural Studies*, 6(3), 145–160.

³⁵ Nugroho, A. (2020). Access to finance for smallholder farmers in Indonesia. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 17(1), 87–104.

berkelanjutan.³⁶ Perbankan syariah dapat menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis akad, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan modal), *murabahah* (jual beli dengan margin), serta *salam* (jual beli dengan pembayaran di muka) yang secara khusus sesuai untuk pembiayaan pertanian.³⁷ Skema-skema ini lebih fleksibel dibandingkan kredit konvensional, karena didasarkan pada prinsip bagi hasil dan keterlibatan bank dalam risiko usaha, sehingga lebih adil bagi petani.

Dalam perspektif Islam, sektor pertanian memiliki kedudukan yang sangat penting. Rasulullah SAW menekankan keutamaan bercocok tanam dengan sabdanya: “*Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, kecuali itu menjadi sedekah baginya*” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁸ Hadis ini menunjukkan bahwa pertanian tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah karena memberikan manfaat luas bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, pembiayaan pertanian melalui perbankan syariah merupakan bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) melalui ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan.³⁹

2.2.1. Definisi dan Karakteristik Pembiayaan Pertanian

Pembiayaan sektor pertanian merupakan seluruh bentuk penyediaan dana, fasilitas kredit, atau instrumen keuangan kepada pelaku usaha tani dengan tujuan meningkatkan produktivitas,

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2021–2025*. Jakarta: OJK.

³⁷ Yusuf, M., & Karim, A. (2022). Islamic banking and agricultural finance: A sustainable development approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 221–239.

³⁸ Al-Bukhari, M. I. (2019). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.

³⁹ Chapra, M. U. (2020). *Islamic economics and sustainable development*. London: Routledge.

pendapatan, dan keberlanjutan usaha pertanian, konsep ini mencakup pembiayaan untuk input, modal kerja, investasi, dan pembiayaan pasca panen yang menjadi siklus integral dalam aktivitas pertanian.⁴⁰ Dalam konteks ekonomi pembangunan, pembiayaan pertanian memiliki fungsi strategis karena sektor ini menyediakan pangan, lapangan kerja, dan menyumbang terhadap stabilitas ekonomi nasional.⁴¹

Karakteristik utama pembiayaan pertanian berbeda dari pembiayaan sektor non-pertanian karena adanya ketergantungan pada siklus musim, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian iklim.⁴² Ketergantungan pada cuaca menyebabkan pendapatan pertanian lebih fluktuatif dibandingkan sektor lainnya, sehingga lembaga keuangan menghadapi risiko lebih besar dalam penyaluran kredit kepada petani kecil.⁴³ Oleh karena itu, pembiayaan pertanian memerlukan desain skema khusus seperti *grace period*, tenor fleksibel, dan mekanisme bagi hasil untuk menyesuaikan dengan siklus produksi.⁴⁴

⁴⁰ Wahyuni, Sri., et al., (2020). Dinamika Kredit Program Dan Perspektif Skema Baru Kredit Usaha Rakyat Untuk Pembiayaan Pertanian 2020-2024. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume. 38 No. 2, hal. 103-117. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/fae/article/view/1098>

⁴¹ Aidah, Q., & Yusrani Anugrah, Y. D. (2021). Pembiayaan Bank Syariah dalam Sektor Pertanian. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, Volume. 3 No.1, hal. 27–40. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1090>

⁴² Brar, Jabdeep Kaur. et al., (2021). A Case Study of the Impact of Climate Change on Agricultural Loan Credit Risk. *Mathematics*, Volume. 9 No.23, hal. 3058; <https://doi.org/10.3390/math9233058>

⁴³ Abay,Kibom A. et al.,(2021). Does rainfall variability explain low uptake of agricultural credit? Evidence from Ethiopia. *European Review of Agricultural Economics*, Volume 49, Issue 1, Hal. 182–207, <https://doi.org/10.1093/erae/jbab013>

⁴⁴ Rosida, I. N., et al., (2022). Model Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian. *EL DINAR: Jurnal Ilmu Ekonomi & Perbankan Syariah*, volume. 10 No. 1. Hal.16-31. <https://doi.org/10.18860/ed.v10i1.13303>

Di Indonesia, pembiayaan pertanian mencakup berbagai instrumen seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian, pembiayaan syariah melalui BPRS dan BUS, serta pembiayaan mikro oleh lembaga keuangan non-bank.⁴⁵ Keberagaman instrumen ini bertujuan memperluas akses petani terhadap modal yang selama ini menjadi masalah struktural, terutama bagi petani kecil dan buruh tani.⁴⁶ Namun, tingkat akses masih rendah karena hambatan seperti kurangnya agunan, rendahnya literasi keuangan, dan keterbatasan lembaga keuangan di daerah pedesaan.⁴⁷

2.2.2. Risiko dan Ketidakpastian dalam Pembiayaan Pertanian

Sektor pertanian identik dengan berbagai bentuk risiko produksi, risiko harga, risiko iklim, dan risiko kelembagaan.⁴⁸ Risiko produksi muncul akibat ketidakpastian hasil panen yang dipengaruhi oleh kondisi tanah, serangan hama, dan perubahan cuaca.⁴⁹ Ketidakpastian ini menyebabkan pendapatan petani tidak stabil dan menurunkan kemampuan mereka mengelola risiko secara

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Laporan Profil Industri Perbankan Indonesia – Triwulan II 2023*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Documents/LSPI%20TW%20II%202023.pdf>

⁴⁶ Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal PSP, Kementerian Pertanian RI. (2025). *KUR Sektor Pertanian 2025*. <https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/SFocFu24m909EKo17IloVP2Ba4QzuqOKgzROlyYy.pdf>

⁴⁷ Info Literasi: Lembaga Keuangan Mikro: Kunci Pembiayaan Petani Perdesaan. (2025). *BPPPSDMP Kementerian Pertanian*. <https://pustaka.bppsdp.pertanian.go.id/info-literasi/info-literasi-lembaga-keuangan-mikro-kunci-pembiayaan-petani-perdesaan>

⁴⁸ Humairoh, Latifah., et al.,(2024). Pengelolaan Manajemen Resiko Dalam Sektor Agrabisnis. *Jurnal Agro Nusantara*. Vol. 4, No. 1, Hal. 18-25. <https://doi.org/10.32696/jan.v4i1.2893>

⁴⁹ Usni, Maulida., (2025). Systematic Literature Review (SLR): Analisis risiko pertanian di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian*. Vol. 6. No. 1, hal. 1459-1472. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v6i1.1886>

mandiri.⁵⁰ Ketika pendapatan tidak stabil, risiko kredit meningkat dan lembaga keuangan cenderung membatasi penyaluran pembiayaan.⁵¹

Risiko harga juga menjadi tantangan utama karena volatilitas pasar global, fluktuasi permintaan, dan struktur pasar yang tidak seimbang antara petani kecil dan pelaku pasar besar.⁵² Harga komoditas pertanian, terutama komoditas pangan, sering berubah secara drastis dalam waktu singkat sehingga meningkatkan ketidakpastian pendapatan.⁵³ Ketidakpastian harga memperbesar kemungkinan gagal bayar sehingga lembaga keuangan cenderung memberikan pinjaman dengan persyaratan ketat.⁵⁴

Selain risiko produksi dan harga, risiko iklim semakin penting dalam 10 tahun terakhir. Perubahan iklim global, seperti curah hujan ekstrem dan kekeringan berkepanjangan, terbukti meningkatkan kerentanan usaha tani.⁵⁵ Risiko kelembagaan, seperti

⁵⁰ Osiemo, Jamleck., et al., (2021). Farmer Perceptions of Agricultural Risks; Which Risk Attributes Matter Most for Men and Women *Journals Sustainability* Volume 13, Issue 23, hal.12978; <https://doi.org/10.3390/su132312978>

⁵¹ Usni, Maulida., (2025). Systematic Literature Review (SLR): Analisis risiko pertanian di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian*. Vol. 6. No. 1, hal. 1459-1472. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v6i1.1886>

⁵² Sholihah, F., & Kurnadi, N. (2019). Dampak pengembangan biofuels terhadap volatilitas harga beberapa komoditas pangan di pasar dunia. *Jurnal Agro Ekonomi*. Vol. 37 No.2, Hal. 157-170. <http://dx.doi.org/10.21082/jae.v37n2.2019.157-170>

⁵³ Sari, L. K., et al., (2023). Dinamika harga pangan dunia dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. *IPB University Repository*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116909>

⁵⁴ Subekti, S., Rondhi, M., & Utami, A. Y. (2025). Preferensi risiko dan faktor penentu keputusan pembiayaan usahatani cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Agribest*, Vol. 9, No. (2), Hal. 47-58. <https://doi.org/10.32528/agribest.v9i2.4002>

⁵⁵ Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability* (AR6 WGII). <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2>

ketidaktepatan data pertanian, lemahnya koordinasi lembaga, dan keterbatasan infrastruktur keuangan juga memperberat akses pembiayaan petani.⁵⁶ Semua bentuk risiko ini secara langsung mempengaruhi pola pembiayaan pertanian, tingkat bunga, dan model risiko yang digunakan lembaga keuangan.⁵⁷

2.2.3. Permodalan Petani dan Perilaku Ekonomi Mikro

Modal merupakan faktor produksi utama dalam usaha pertanian, terutama bagi rumah tangga petani kecil yang mengandalkan input tenaga kerja keluarga dan modal terbatas.⁵⁸ Kekurangan modal menyebabkan keterbatasan penggunaan input produktif seperti benih unggul, pupuk berkualitas, dan teknologi mekanisasi yang dapat meningkatkan produktivitas.⁵⁹ Teori ekonomi mikro menjelaskan bahwa petani kecil memiliki perilaku rasional dalam penggunaan input, namun kekurangan akses terhadap modal menyebabkan mereka berada pada kondisi underinvestment.⁶⁰

⁵⁶ World Bank. (2023). *Agriculture finance & financial risk in agriculture*.

<https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/agriculture-finance>

⁵⁷ Widi, R. H., et.al., (2025). Innovative agricultural financing models to enhance farmers' access to sustainable credit and investment. *Journal of International Finance*, Vol. 13 No. (5), Hal. 3791-3802.

<https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3577>

⁵⁸ Khanal, A. R., & Omobitan, O. (2020). Rural finance, capital constrained small farms, and financial performance: Findings from a primary survey. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, Vol. 52, No.(2), Hal. 288–307. <https://doi.org/10.1017/aae.2019.45>

⁵⁹ Khan, Farman Ullah., et.al., (2024). Constraints to agricultural finance in underdeveloped and developing countries: A systematic literature review. *International Journal of Agricultural Sustainability*. Vol. 22, NO. 1, Hal. 2329388. <https://doi.org/10.1080/14735903.2024.2329388>

⁶⁰ Khanal, A. R., & Omobitan, O. (2020). Rural finance, capital constrained small farms, and financial performance: Findings from a primary survey. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, Vol. 52, No.(2), Hal. 288–307. <https://doi.org/10.1017/aae.2019.45>

Dalam model perilaku rumah tangga petani modal tidak hanya mempengaruhi produksi tetapi juga konsumsi dan keputusan alokasi tenaga kerja.⁶¹ Ketika akses pembiayaan meningkat, petani dapat meningkatkan luas tanam, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.⁶² Namun, keterbatasan lembaga keuangan yang memahami karakter petani kecil menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan modal dan penawaran pinjaman.⁶³

2.2.4. Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Pertanian

Pembiayaan syariah memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian karena berbasis pada prinsip keadilan, bagi hasil, dan keberlanjutan sosial.⁶⁴ Dalam konteks Indonesia, lembaga keuangan syariah seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS menjadi penyedia utama pembiayaan sektor pertanian melalui skema murabahah, *musyarakah*, dan *mudharabah*.⁶⁵ Dalam bank syariah, pembiayaan tidak menggunakan bunga tetap sebagaimana sistem perbankan konvensional, tetapi menggunakan margin pada akad jual-beli atau bagi hasil usaha yang telah disepakati di awal antara bank dan nasabah, sehingga

⁶¹ Maredia, Mywish K., et.al., (2022). COVID-19's impacts on incomes and food consumption in urban and rural areas are surprisingly similar: Evidence from five African countries. *Journal Global Food Security*. Volume 33. Hal. 100633. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2022.100633>

⁶² Gopinath, Gita and Stein, Jeremy c., (2021). Banking, Trade, and the Making of a Dominant Currency. *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 136, Issue 2, May 2021, Pages 783–830. <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa036>

⁶³ World Bank, (2022). *Agriculture Finance & Agriculture Insurance*. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/agriculture-finance>

⁶⁴ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.

⁶⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Statistik Perbankan Syariah — Desember 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2024>

profit bank bukan merupakan bunga atas pinjaman uang tetapi merupakan bagian dari keuntungan transaksi atau usaha yang dibiaya.⁶⁶

Skema *musyarakah* dan *mudharabah* dianggap lebih sesuai untuk usaha tani karena risiko dibagi antara petani sebagai *mudharib* dan bank sebagai *shahibul maal*.⁶⁷ Skema salam dan *istishna* juga digunakan untuk pembiayaan pertanian berbasis akad pemesanan hasil panen.⁶⁸ Lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan akses modal bagi petani kecil, terutama di wilayah yang belum terjangkau lembaga konvensional.⁶⁹

Namun tantangan tetap besar, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah, risiko gagal panen, dan keterbatasan kapasitas lembaga dalam melakukan pendampingan usaha.⁷⁰ Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa

⁶⁶ Pratama, G., Inayah, I., & Haida, N. (2023). *Penetapan Margin dan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah*. *EcoBankers: Journal of Economy and Banking*. Vol. 4, No. 1, Hal. 70-77. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v4i1.1147>

⁶⁷ Setiawan, R. (2022). *Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam*. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, Vol.2, No. 2 Hal. 133-143. <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>

⁶⁸ Setiawan, B., Astina, R., & Pramita, C. (2025). Sosialisasi Penerapan Akad *Istishna* sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah Bagi Petani Padi di Desa Sugih Waras. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, *ejournal.seaninstitute*. Volume 4, No 02, hal. 115-119. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm/article/view/7117/5426>

⁶⁹ Aini, R., dan K., Kamilah, (2025). Solusi Keuangan Syariah Terhadap Pembiayaan Sektor Pertanian untuk Mencapai Sustainable Development Goals. *Ecoplan*, Vol.8, No. (1), Hal. 51–60. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v8i1.1117>

⁷⁰ Nasrullah, A. (2023). Tantangan Implementasi Pembiayaan Syariah pada Sektor Pertanian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 10, No. (2), Hal. 145–158. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/38152>

pembiayaan syariah mampu meningkatkan pendapatan petani, produktivitas lahan, dan stabilitas ekonomi lokal.⁷¹

2.3. Teori Pembiayaan Syariah

2.3.1. Konsep Dasar Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan larangan riba serta praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak.⁷² Sistem keuangan syariah menekankan pada pembiayaan yang berbasis aset (*asset-backed financing*) sehingga transaksi harus terkait dengan kegiatan ekonomi yang nyata.⁷³ Prinsip ini membuat pembiayaan syariah lebih stabil karena tidak spekulatif dan tidak berbasis bunga.⁷⁴

Salah satu konsep utama dalam pembiayaan syariah adalah pembagian risiko (*risk sharing*), yaitu risiko usaha ditanggung bersama antara lembaga keuangan dan nasabah sesuai proporsi akad yang digunakan.⁷⁵ Dalam akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung berdasarkan porsi

⁷¹ Yusuf, M., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Pendapatan dan Produktivitas Petani. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol.14, No. (1), Hal. 85–102. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/21234>

⁷² Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.

⁷³ AIMS Education. (2025). *Asset-Backed Financing in Islamic Banking: Top 6 Principles*. <https://aims.education/asset-backed-financing-in-islamic-banking>

⁷⁴ Hasmawati, H. (2025). Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, Vol. 6, No. (2), Hal. 250-257. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.1077>

⁷⁵ Ismail. (2020). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana (Prenada Media Group). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1239956>

modal.⁷⁶ Prinsip ini dinilai lebih adil dan humanis karena tidak membebani nasabah dengan kewajiban bunga tetap meskipun usaha mengalami kerugian.⁷⁷

Sistem pembiayaan syariah juga bertujuan menciptakan keberlanjutan sosial melalui distribusi kekayaan yang merata, pengurangan kemiskinan, dan perlindungan kelompok rentan termasuk petani kecil.⁷⁸ Karena itu, pembiayaan syariah banyak digunakan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan di berbagai negara Muslim.⁷⁹

2.3.2. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah dalam Sektor Pertanian

Pembiayaan syariah memiliki beragam akad yang dapat digunakan untuk mendukung sektor pertanian. Akad-akad tersebut memiliki karakteristik berbeda sehingga lembaga keuangan dapat memilih struktur pembiayaan sesuai kebutuhan petani.⁸⁰

⁷⁶ Setiawan, R. (2022). *Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam*. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, Vol.2, No. 2 Hal. 133-143. <https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>

⁷⁷ Hasmawati, H. (2025). Principles of Justice and Riba-Free Practice in Islamic Financial Management. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, Vol. 6, No. (2), Hal. 250-257. <https://doi.org/https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.1077>

⁷⁸ Rahman, F., & Rochman, C. (2022). Peran Keuangan Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. (1), Hal. 45–60. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/25687>

⁷⁹ Yusuf, M., & Anwar, M. K. (2022). Islamic Financing and Rural Economic Empowerment: Evidence from Muslim Countries. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 14, No.(1), Hal. 85–102. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/21234>

⁸⁰ Karim, A. A. (2021). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi terbaru). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.⁸¹ Dalam konteks pertanian, *mudharabah* cocok digunakan untuk pembiayaan modal kerja seperti pembelian benih, pupuk, dan biaya operasional.⁸² Namun risiko tinggi menyebabkan bank syariah cenderung berhati-hati menggunakan akad ini.⁸³

b. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan modal, dan keuntungan serta kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal.⁸⁴ Pada sektor pertanian, *musyarakah* cocok untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan irigasi, alat mekanisasi, dan pengembangan lahan.⁸⁵

⁸¹ Hidayat, R., & Nurhasanah, N. (2022). Implementasi Akad Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.14, No.(2), Hal. 101–112. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/elmashlahah/article/view/5643>

⁸² Rahman, A., & Widodo, T. (2021). Pembiayaan Mudharabah pada Sektor Pertanian: Peluang dan Tantangan. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No.(1), Hal. 1–15. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-muzaraah/article/view/20148>

⁸³ Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, Musyarakah, Financing Risk, and Performance of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 11, No. (1), Hal. 131–142. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss1.art9>

⁸⁴ Ardiarta, Nayla., et. Al., (2025). Penerapan Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Usaha di Bank Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.10, No.(1). Hal. 1-10. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24993>

⁸⁵ Mas'ut, M., & Soim, S. (2025). Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Perdagangan dan Pertanian di LKMA Syariah Barokah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 7, No.(2),Hal.193-204. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.88>

Musyarakah dianggap lebih aman bagi lembaga keuangan karena kedua pihak memiliki kontribusi modal.⁸⁶

c. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual-beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal.⁸⁷ Akad ini menjadi yang paling populer dalam pembiayaan pertanian Indonesia karena lebih sederhana dan risiko dapat dikendalikan.⁸⁸ *Murabahah* umumnya digunakan untuk pembelian alat pertanian, pupuk, benih, dan sarana produksi lainnya.⁸⁹

d. *Salam*

Salam adalah akad pembelian barang yang penyerahannya di masa depan sementara pembayaran dilakukan di muka.⁹⁰ *Salam* sangat relevan untuk sektor pertanian karena cocok untuk pembiayaan hasil panen.⁹¹ Dalam akad *salam*, lembaga keuangan membayar harga panen di muka sebagai modal bagi petani, lalu petani

⁸⁶ Munawar, Tazkia AL., (2025). Risk Analysis Of Musyarakah Financing At Bank Aceh Syariah, Indonesia. *AL-MUDHARABAH: Journal of Islamic Economics and Finance* Vol.6 No.1, Hal. 113-131. <http://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v6i1.7748>

⁸⁷ DSN-MUI. (2020). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/fatwa-ekonomi-syariah/>

⁸⁸ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Pedoman produk pembiayaan murabahah*. <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah>.

⁸⁹ Cameila A. Yahya, et.al., (2023). Implementasi akad *murabahah* dalam pengadaan alat-alat pertanian. *Journal of Social and Economics Research*, Vol.5, No. (2). Hal. 1046-1057. <https://doi.org/10.54783/jsr.v5i2.206>

⁹⁰ Usmani, M. T. (2020). *An Introduction to Islamic Finance* (Revised ed.). Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an. <https://kalamullah.com/introduction-to-islamic-finance.html>

⁹¹ Karim, A. A. (2021). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

menyerahkan hasil panen sesuai kesepakatan.⁹² Akad ini efektif untuk membantu petani mengatasi kekurangan modal sebelum masa tanam.⁹³

e. *Istishna*

Istishna adalah akad pemesanan barang yang dibuat secara khusus sesuai spesifikasi yang disepakati⁹⁴ Meskipun lebih umum digunakan untuk proyek industri dan konstruksi, akad *istishna* juga relevan untuk produksi berbasis pesanan, termasuk komoditas pertanian tertentu yang ditanam sesuai kontrak pembeli.⁹⁵

2.3.3. Prinsip Pembiayaan Syariah: Keadilan, Amanah, dan Anti Riba

Sistem pembiayaan syariah dibangun atas prinsip keadilan ekonomi (*al-'adl*), yaitu tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional dalam transaksi.⁹⁶ Keadilan diwujudkan melalui larangan riba yang menuntut penghapusan bunga tetap karena bunga dianggap menciptakan ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi.⁹⁷ Larangan riba membuat

⁹² Ismail. (2020). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group). <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1239956>

⁹³ Rahman, A., & Widodo, T. (2022). Pembiayaan Salam sebagai Instrumen Penguatan Modal Petani. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.10, No.(2), Hal. 145–158. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-muzaraah/article/view/25987>

⁹⁴ DSN–MUI. (2020). *Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/fatwa-ekonomi-syariah/>

⁹⁵ Rahman, A., & Rochman, F. (2023). Akad *Istishna* sebagai Alternatif Pembiayaan Produksi Berbasis Pesanan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.15 No.(1), Hal.41–54. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/19876>

⁹⁶ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.

⁹⁷ Karim, A. A. (2021). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

pembiayaan syariah menekankan mekanisme bagi hasil yang lebih fleksibel terhadap risiko usaha.⁹⁸

Prinsip amanah mengharuskan kedua belah pihak menjalankan akad sesuai kesepakatan, sehingga pembiayaan syariah mendorong transparansi dan akuntabilitas.⁹⁹ Selain itu, prinsip anti *maisir* (perjudian), anti *gharar* (ketidakjelasan), dan *antibathil* (pemanfaatan yang tidak sah) melindungi konsumen dari transaksi yang merugikan dan mencegah ketidakpastian berlebihan.¹⁰⁰

Bagi petani kecil, prinsip keadilan dan tanpa bunga dalam pembiayaan syariah memberikan kemudahan karena tidak terbebani pembayaran bunga yang tetap meskipun panen gagal.¹⁰¹ Kondisi ini membuat pembiayaan syariah lebih berorientasi pada pemberdayaan, bukan semata profit.¹⁰²

2.3.4. Pembiayaan Syariah sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Petani

Pembiayaan syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi petani karena struktur akadnya memungkinkan petani memperoleh modal tanpa beban bunga

⁹⁸ Fahamsyah, M.Hatta., et.al., (2023). Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.4, No. 2, Hal. 175-203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>

⁹⁹ Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). *A contemporary survey of Islamic banking literature*. *Journal of Financial Stability*, Vol.34, Hal. 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>

¹⁰⁰ Usmani, M. T. (2020). *An Introduction to Islamic Finance* (Revised Edition). Karachi: Maktaba Ma'arifur Qur'an.

¹⁰¹ Ali, Fatima. (2024). *Islamic microfinance for sustainable rural development*. <https://agrieconomist.com/islamic-microfinance-for-sustainable-rural-development>

¹⁰² Abubakar Muhammad, A., et.al., (2025). The Role of Islamic Finance in Promoting Economic Justice and Financial Inclusion among Marginalised Communities. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, Vol.37, No.(1), Hal. 58–68. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.10167>

dan dalam kerangka kerja sama yang adil.¹⁰³ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kemaslahatan petani di berbagai daerah di Indonesia.¹⁰⁴

Peran pembiayaan syariah meliputi:

1. Meningkatkan akses petani kecil terhadap modal.¹⁰⁵
2. Mendorong penggunaan input produktif seperti benih unggul dan pupuk berkualitas.¹⁰⁶
3. Meningkatkan adopsi teknologi pertanian modern¹⁰⁷
4. Mengurangi ketergantungan pada rentenir¹⁰⁸
5. Mengurangi risiko gagal bayar karena skema syariah lebih fleksibel¹⁰⁹

¹⁰³ Aini, R., & Kamilah, K. (2025). Solusi keuangan syariah terhadap pembiayaan sektor pertanian untuk mencapai Sustainable Development Goals. *Ecoplan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 8 No. 1, Hal. 51-60. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v8i1.1117>

¹⁰⁴ Hardana, Ali., et.al., (2025). Syariah-Compliant Financing Models and Their Strategic Contribution to the Agricultural Sector and the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Perspectives on Advanced New Generations of Global and Local Economic Horizons*, Vol. 1, No.(2), Hal.12–20. <https://doi.org/10.69855/panggaleh.v1i1.250>

¹⁰⁵ Amalia, E., & Nugroho, L. (2021). The role of Islamic microfinance institutions in improving farmers' access to capital. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 7, No.(2), Hal. 255–274. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1362>

¹⁰⁶ Aini, R., & Kamilah, K. (2025). Solusi keuangan syariah terhadap pembiayaan sektor pertanian untuk mencapai Sustainable Development Goals. *Ecoplan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 8 No. 1, Hal. 51-60. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v8i1.1117>

¹⁰⁷ Hardana, Ali., et.al., (2025). Syariah-Compliant Financing Models and Their Strategic Contribution to the Agricultural Sector and the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Perspectives on Advanced New Generations of Global and Local Economic Horizons*, Vol. 1, No.(2), Hal.12–20. <https://doi.org/10.69855/panggaleh.v1i1.250>

¹⁰⁸ Ramadhani, N. F. (2025). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 23–38.

¹⁰⁹ Khasanah, U. (2022). Innovation and Islamic financial fatwa improving agricultural productivity. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan*

Pembiayaan syariah juga mampu memperkuat ketahanan pangan karena peningkatan produktivitas petani berkontribusi pada ketersediaan pangan regional.¹¹⁰ Dalam konteks pembangunan nasional, pembiayaan syariah berperan sebagai instrumen redistribusi ekonomi dan pengurangan kesenjangan antar wilayah.¹¹¹

2.4. Kemaslahatan Petani Perspektif *Maqāṣid al-syarī'ah*

Konsep kemaslahatan (*al-maslahah*) merupakan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menegaskan bahwa syariah diturunkan untuk mewujudkan kebaikan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak keburukan (*dar' al-mafāsid*) bagi manusia.¹¹² Imam al-Ghazali mendefinisikan kemaslahatan sebagai segala sesuatu yang menjaga lima tujuan pokok: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).¹¹³ Al-Syatibi kemudian memperkuat konsep ini dalam *al-Muwāfaqāt*, dengan menyatakan bahwa semua hukum syariah bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia.¹¹⁴ Ibn 'Ashur mengembangkan lebih lanjut dengan menekankan dimensi kemaslahatan publik (*maṣlahah 'āmmah*), sehingga menempatkan

Syariah, Vol. 10 No.(2), Hal.143–158. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/17434>

¹¹⁰ Nasution, R. A., & Kamilah, K. (2025). Evaluasi Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 80–89. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.348>

¹¹¹ Nabil, M., & Herianingrum, S. (2022). Financial Inclusion of Sharia Banking and Poverty 33 Province in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1549–1554. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5755>

¹¹² Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

¹¹³ Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah.

¹¹⁴ Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

syariah sebagai sistem yang tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga sosial dan peradaban.¹¹⁵

Dalam konteks ekonomi Islam, kemaslahatan tidak dapat dipisahkan dari dimensi keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan kolektif.¹¹⁶ Aktivitas ekonomi yang sesuai syariah harus mampu menghadirkan manfaat luas, distribusi yang adil, serta keberlanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.¹¹⁷ Di sinilah tiga komponen *maqāṣid al-syarī'ah* berperan: *darūriyyāt* (kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi), yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar petani seperti pangan, kesehatan, dan penghidupan layak; *ḥājjiyyāt* (kebutuhan pendukung yang memudahkan kehidupan), yang berkaitan dengan akses modal, sarana produksi, dan pelatihan yang mendukung produktivitas usaha tani; serta *tahsīniyyāt* (kebutuhan penyempurnaan yang meningkatkan kualitas hidup), yang mencakup kesempatan untuk pendidikan, inovasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penerapan ketiga komponen ini menunjukkan bahwa kemaslahatan petani tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan generatif, sehingga keberlanjutan dan keadilan dapat tercapai secara menyeluruh.¹¹⁸

Sejalan dengan itu, konsep keberlanjutan (*sustainability*) dalam literatur modern dipopulerkan melalui *Brundtland Report* (1987), yang mendefinisikannya sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan

¹¹⁵ Ibn 'Ashur, M. T. (2001). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is

¹¹⁶ Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation

¹¹⁷ Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

¹¹⁸ Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The framework of maqasid al-shariah and its implication for Islamic finance*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI). Retrieved from <https://iri.edu.sa>

generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.¹¹⁹ Keberlanjutan mencakup tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sering disebut sebagai *triple bottom line*.¹²⁰ Islam sendiri memiliki landasan yang kuat tentang keberlanjutan. Al-Qur'an menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi (QS. Al-Baqarah: 30) dengan kewajiban memakmurkan bumi, serta melarang segala bentuk kerusakan lingkungan (QS. Ar-Rum: 41).¹²¹ Hadis Nabi juga menyebut bahwa menanam pohon atau tanaman yang bermanfaat bagi makhluk hidup bernilai sedekah.¹²² sehingga memperlihatkan bahwa Islam menekankan keberlanjutan ekologi sebagai bagian dari ibadah. Secara global, integrasi kemaslahatan dan keberlanjutan selaras dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹²³ Hal ini menunjukkan titik temu antara ajaran Islam dan tujuan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan kemaslahatan berkelanjutan.¹²⁴

2.5 Kemaslahatan Petani dalam Perspektif Ekonomi

Kemaslahatan petani dalam perspektif ekonomi dipahami sebagai kondisi kemaslahatan yang tercermin dari kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup secara layak, menjaga keberlanjutan usaha tani, serta berkontribusi terhadap perekonomian wilayah. Kemaslahatan tersebut tidak hanya diukur

¹¹⁹ World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford: Oxford University Press. Retrieved from <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

¹²⁰ Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone.

¹²¹ QS. Al-Baqarah: 30; QS. Ar-Rum: 41.

¹²² HR. Bukhari dan Muslim.

¹²³ United Nations. (2022). *The sustainable development goals report 2022*. New York: United Nations. Retrieved from <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/>

¹²⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Roadmap keuangan berkelanjutan tahap II (2021–2025)*. Jakarta: OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-2021-2025.aspx>

dari peningkatan pendapatan nominal, tetapi juga dari stabilitas daya beli, efisiensi usaha tani, dan peran sektor pertanian dalam menopang perekonomian daerah¹²⁵.

Dalam teori ekonomi kemaslahatan (*welfare economics*), kemaslahatan masyarakat termasuk petani diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya ekonomi mampu menghasilkan manfaat optimal bagi individu dan masyarakat secara berkelanjutan.¹²⁶ Dalam konteks pertanian, kemaslahatan petani sangat dipengaruhi oleh akses terhadap modal, harga output pertanian, biaya input produksi, serta kebijakan pemerintah yang mendukung stabilitas sektor pertanian.¹²⁷

Lebih lanjut, dalam kajian ekonomi pertanian, kemaslahatan petani tidak dapat dilepaskan dari struktur pasar hasil pertanian dan kerentanan petani terhadap fluktuasi harga. Ketimpangan antara harga yang diterima petani dan harga yang harus dibayar untuk kebutuhan konsumsi maupun input produksi sering kali menjadi penyebab rendahnya kemaslahatan petani, meskipun produksi meningkat.¹²⁸ Oleh karena itu, indikator kemaslahatan petani harus

¹²⁵ Ayu, C., Wuryantoro, W., & Sari, N. M. W. (2024). Kinerja ekonomi usaha tani tanaman pangan dan kontribusinya pada kesejahteraan petani di Desa sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol.29, No.(4), Hal. 633–641. <https://doi.org/10.18343/jipi.29.4.633>

¹²⁶ Investopedia. (2025). *Welfare economics: Theory, key assumptions, and critical analysis* https://www.investopedia.com/terms/w/welfare_economics.asp

¹²⁷ Novel, T. A., Zarlioni, W. O. A., & Ajo, A. (2025). *Pengaruh Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani di Desa Lakapera, Kabupaten Buton Tengah*. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 24, No. (2), Hal. 225-398. <https://doi.org/10.35965/eeco.v24i2.4000>

¹²⁸ Deras, S., & Luju, M. T. (2024). Perbandingan produktivitas dan pendapatan usahatani padi sawah berdasarkan status kepemilikan lahan. *Jurnal Agriuma*, Vol. 6, No. (1), hal. 1–9. <https://doi.org/10.31289/agri.v6i1.11633>

mampu menangkap kondisi ekonomi petani secara komprehensif, baik pada tingkat mikro maupun makro.¹²⁹

Berdasarkan pendekatan empiris dalam ekonomi pertanian, kemaslahatan petani dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui indikator-indikator ekonomi yang dapat diukur secara kuantitatif dan tersedia secara konsisten dalam bentuk data panel.¹³⁰ Indikator tersebut meliputi Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan petani, serta tingkat kemiskinan perdesaan menurut provinsi dan daerah. Pemilihan indikator ini bertujuan untuk merepresentasikan kemaslahatan petani secara individual sekaligus kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah.

2.5.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator kemaslahatan petani yang menunjukkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Secara konseptual, NTP mencerminkan kemampuan daya beli petani terhadap barang konsumsi rumah tangga dan input produksi pertanian. Nilai NTP di atas 100 menunjukkan bahwa petani berada pada kondisi surplus, sedangkan nilai di bawah 100 menunjukkan kondisi defisit.¹³¹

Dalam kajian ekonomi pertanian, NTP digunakan sebagai indikator utama kemaslahatan karena mampu menangkap dinamika

¹²⁹ Rizali, M., & Kamalia, S. N. (2025). Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi di Desa Pasar Jati, Kalimantan Selatan. *urplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. (2), Hal.114–125. <https://doi.org/10.71456/sur.v1i2.372>

¹³⁰ Syaputri, F. D., et.al. (2024). Determinants of the Level of Farmer Welfare in Indonesia. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, vol. 8, No.. 3, hal. 954-96. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v8i3.22846>

¹³¹ Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Nilai Tukar Petani Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.

harga output dan input secara simultan.¹³² Fluktuasi NTP mencerminkan perubahan struktur biaya produksi, perubahan harga hasil pertanian, serta dampak kebijakan ekonomi terhadap petani.¹³³ Oleh karena itu, NTP sering digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan pertanian di tingkat nasional dan regional.

Dalam perspektif maqāsid syariah, NTP mencerminkan aspek ḥifz al-māl, karena menunjukkan kemampuan petani dalam menjaga nilai ekonomi dari hasil usahanya.¹³⁴ NTP yang stabil dan meningkat menunjukkan bahwa petani memperoleh nilai tukar yang adil atas hasil produksinya, sehingga mendukung tercapainya kemaslahatan ekonomi secara berkelanjutan.¹³⁵

2.5.2 Pendapatan Petani

Pendapatan petani merupakan hasil bersih yang diperoleh dari kegiatan usaha pertanian dalam satu periode tertentu setelah dikurangi seluruh biaya produksi.¹³⁶ Pendapatan menjadi indikator utama kemaslahatan karena secara langsung menentukan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.¹³⁷

¹³² Tiasa, I. T., Sudrajat, I. S., & Astuti, A. (2020). Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Bawang Merah Di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiah Agritas*, Vol. 3 No.(2), Hal.21–32. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/agritas/article/view/7180>

¹³³ Satriani, R., et.al., (2021). Nilai Tukar Petani Padi di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pertanian Peradaba*. Vol. 01, No. 02, Hal. 28-35. <https://doi.org/10.30812/jpp.v1i2.974>

¹³⁴ Al-Qaradawi, Y. (2019). *Fiqh al-Maqasid: Understanding the Objectives of Islamic Law*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

¹³⁵ Syaputri, F. D., et.al. (2024). Determinants of the Level of Farmer Welfare in Indonesia. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Vol. 8, No.. 3, hal. 954-96. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v8i3.22846>

¹³⁶ Deras, S., & Luju, M. T. (2024). Perbandingan produktivitas dan pendapatan usahatani padi sawah berdasarkan status kepemilikan lahan. *Jurnal Agriuma*, Vol. 6, No. (1), hal. 1–9. <https://doi.org/10.31289/agri.v6i1.11633>

¹³⁷ Dina, F. (2025). Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Pertanian Dan Produksi Padi Terhadap Nilai Tukar Petani Subsektor Tanaman Pangan Di

Dalam teori ekonomi mikro, pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat utilitas dan kemaslahatan individu.¹³⁸ Bagi petani, pendapatan tidak hanya berfungsi sebagai sumber konsumsi, tetapi juga sebagai modal untuk menjaga keberlanjutan usaha tani. Rendahnya pendapatan petani dapat menyebabkan keterbatasan akses terhadap teknologi, modal, dan input produksi yang berkualitas.¹³⁹

Dalam kerangka *maqāsid syariah*, pendapatan petani berkaitan erat dengan *hiḥẓ al-māl* dan *hiḥẓ an-naḥs*, pendapatan yang memadai memungkinkan petani mempertahankan kelangsungan hidup keluarga, meningkatkan kualitas hidup, serta menghindarkan petani dari praktik ekonomi yang merugikan, seperti jeratan utang yang tidak produktif.¹⁴⁰ Dengan demikian, peningkatan pendapatan petani merupakan salah satu indikator penting terwujudnya kemaslahatan petani dalam perspektif ekonomi Islam.

2.5.3 Kemiskinan Perdesaan Sebagai Indikator Kemaslahatan Petani

Kemiskinan perdesaan merupakan indikator penting dalam mengkaji kemaslahatan petani karena pertanian dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan ketahanan pangan bagi 80% penduduk miskin dunia yang tinggal di daerah perdesaan dan sebagian besar bekerja di

Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, Vol.5, No. (3), hal. 1049–1062. <https://doi.org/10.53625/juremi.v5i3.11675>

¹³⁸ Varian, H. R. (2020). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (10th ed.). W. W. Norton & Company

¹³⁹ Rizali, M., & Kamalia, S. N. (2025). Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani padi di Desa Pasar Jati, Kalimantan Selatan. *urplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. (2), Hal.114–125. <https://doi.org/10.71456/sur.v1i2.372>

¹⁴⁰ Kamali, M. H. (2020). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IB Tauris.

bidang pertanian.¹⁴¹ Tingkat kemiskinan perdesaan mencerminkan keterbatasan pendapatan, akses ekonomi, serta kerentanan masyarakat agraris terhadap risiko produksi dan fluktuasi harga.¹⁴² Secara konseptual, kemiskinan perdesaan didefinisikan sebagai ketidakmampuan rumah tangga di perdesaan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.¹⁴³

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi bahwa tingkat kemiskinan perdesaan selalu lebih tinggi dari perkotaan (11,03% vs 6,73% per Maret 2025), tetapi persentase kemiskinan perdesaan menurun mulai September 2024 (11,34%), sementara perkotaan justru naik (6,66% menjadi 6,73%). Fenomena ini menunjukkan gambaran yang konsisten, dipengaruhi oleh ketidakmerataan pembangunan, ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan, dan meningkatnya kemiskinan akibat inflasi kebutuhan dasar.¹⁴⁴

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan perdesaan mencerminkan belum optimalnya kemaslahatan, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap keberlangsungan hidup (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, kemiskinan perdesaan relevan digunakan sebagai indikator kemaslahatan petani dalam perspektif ekonomi.

¹⁴¹ World Bank. (2020). *Agriculture and rural development*. <https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture>

¹⁴² FAO. (2021). *The State of Food and Agriculture 2021: Making agrifood systems more resilient*. <https://www.fao.org/3/cb4476en/cb4476en.pdf>

¹⁴³ Putri. Lisa Aulia dan Mukramin. Sam'un. (2023). Kemiskinan Masyarakat Petani di Desa Bone. Kec. Bajeng Kab. Gowa. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*. Vol. 1, No. 3. Hal. 102-121. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.171>

¹⁴⁴ Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>

2.6. Keterkaitan antara Pembiayaan Sektor Pertanian dengan Kemaslahatan Petani

Pembiayaan sektor pertanian merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kemaslahatan petani, terutama dalam mengatasi keterbatasan modal yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha tani. Akses terhadap pembiayaan memungkinkan petani memperoleh modal kerja untuk pembelian sarana produksi, adopsi teknologi pertanian, serta pengelolaan usaha tani yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penelitian Puryantoro et al., menunjukkan bahwa akses kredit pertanian tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan produksi petani, tetapi juga mempengaruhi pola pengambilan keputusan dalam kelompok tani, termasuk keputusan investasi dan pengelolaan risiko usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan kemaslahatan petani kecil, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal.¹⁴⁵

Selanjutnya, keterkaitan antara pembiayaan sektor pertanian dan kemaslahatan petani juga terlihat dari aspek stabilitas pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga petani. Gelata dan Han dalam penelitian meta-analisisnya menemukan bahwa petani yang memiliki akses pembiayaan formal cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih stabil dan daya tahan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan petani yang mengalami keterbatasan kredit (*credit constrained farmers*). Akses pembiayaan memungkinkan petani mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan informal yang berbiaya tinggi, sehingga risiko kerugian dan tekanan ekonomi dapat diminimalkan. Dengan

¹⁴⁵ Puryantoro et al. (2024), "Does Credit Access Affect Decision-Making within Farmer Groups? Evidence from Smallholder Coffee Farmers in Indonesia," *Asian Journal of Dairy and Food Research*, Vol. 43, No. 3, hal. 594–599.

<https://arccjournals.com/journal/asian-journal-of-dairy-and-food-research/DRF-380>

demikian, pembiayaan pertanian berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi petani dan meningkatkan kemaslahatan secara berkelanjutan.¹⁴⁶

Dalam konteks Indonesia, Sandy et al., menegaskan bahwa akses petani terhadap lembaga keuangan dan pembiayaan pertanian memiliki pengaruh signifikan terhadap kemaslahatan petani, baik secara langsung melalui peningkatan modal usaha maupun secara tidak langsung melalui penguatan keberlanjutan usaha tani. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa petani yang memiliki akses pembiayaan yang memadai cenderung mampu mengelola usaha taninya dengan lebih baik, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani di wilayah perdesaan. Hal ini menegaskan bahwa pembiayaan pertanian merupakan instrumen penting dalam mendorong peningkatan kemaslahatan petani dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan perdesaan.¹⁴⁷

Lebih lanjut, perkembangan inovasi pembiayaan juga turut memperkuat keterkaitan antara pembiayaan sektor pertanian dan kemaslahatan petani. Penelitian yang dilakukan oleh Asante et al. (2025), menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan pembiayaan berbasis digital memberikan kontribusi positif terhadap kemaslahatan petani melalui peningkatan akses terhadap layanan keuangan, adopsi teknologi pertanian yang adaptif, serta peningkatan produktivitas usaha tani. Kemudahan akses pembiayaan tersebut mendorong petani untuk mengoptimalkan kegiatan produksi dan meningkatkan pendapatan secara

¹⁴⁶ Gelata & Han (2024), "Rural credit access and contract farming nexus in Ethiopia: A meta-analysis," *Heliyon*, Vol. 10, No. 1, e23154, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23154>

¹⁴⁷ Sandy et al. (2025). Farmer Welfare Factors and Access to Financial Institutions Influence Green Financing. *AGRIBIOS: Jurnal Agribisnis*, 23(2), hal. 447–455. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/agribios/article/view/6636>

berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi petani terhadap risiko perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas.¹⁴⁸

Berdasarkan berbagai temuan empiris tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sektor pertanian memiliki keterkaitan yang kuat dan multidimensional dengan kemaslahatan petani. Pembiayaan tidak hanya berperan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, tetapi juga dalam memperkuat stabilitas ekonomi, daya beli, serta ketahanan rumah tangga petani terhadap berbagai risiko usaha. Oleh karena itu, penguatan akses dan kualitas pembiayaan sektor pertanian menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan kemaslahatan dan kemaslahatan petani secara berkelanjutan.

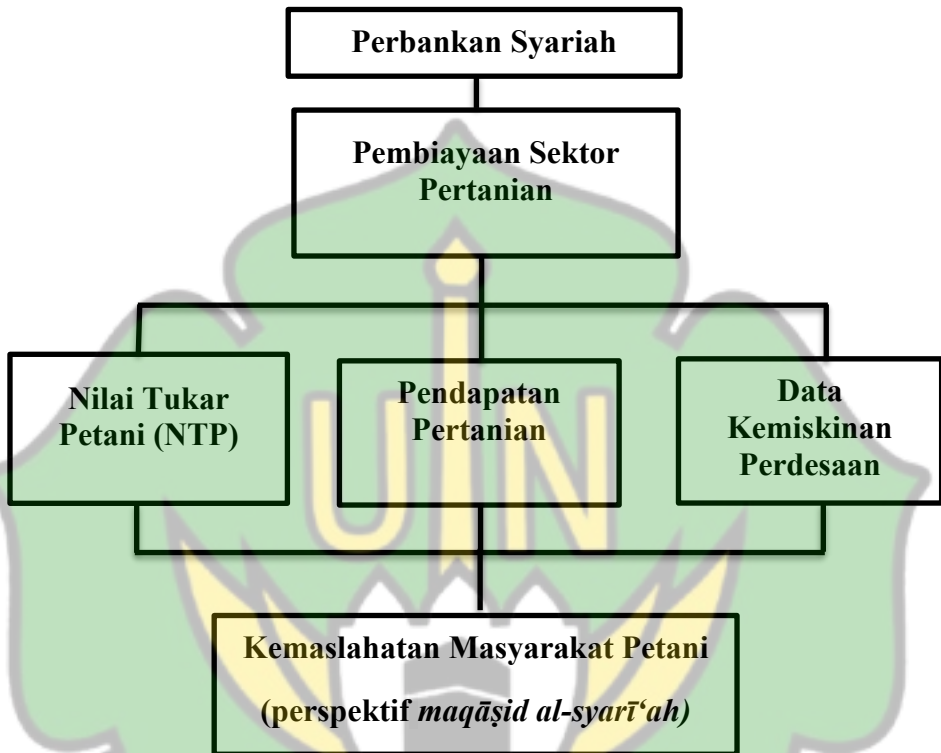
2.7. Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori di atas, pembiayaan sektor pertanian dipandang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan petani. Peningkatan tersebut tercermin melalui indikator NTP, pendapatan petani, dan kemiskinan perdesaan. Selanjutnya, peningkatan indikator-indikator tersebut dipandang sebagai bentuk kemaslahatan petani dalam perspektif maqāṣid syariah, khususnya *ḥifz al-māl* dan *ḥifz an-nafs*.

¹⁴⁸ Asante et al. (2025) Climate Resilience at Your Fingertips: Digital Financial Inclusion and Farmers' Adoption of Climate-Smart Agricultural Technologies. *Journal of Future Business*. Vol. 11, No. 1, hal 1–18. <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00624-5>

Gambar 1

Skema Kerangka Berpikir



Sumber : Diolah pada tahun, 2025

2.7. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis kuantitatif dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif terhadap kemaslahatan petani.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat guna menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menjelaskan pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat di Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung). Pendekatan kuantitatif dianggap tepat karena fenomena pembiayaan dan kemaslahatan (kemaslahatan) dapat diukur secara objektif menggunakan indikator numerik dan dianalisis melalui model statistik yang baku.¹⁴⁹

Metode yang digunakan adalah analisis data panel karena data memiliki dimensi *waktu (time series)* sekaligus wilayah (*cross-section*). Pendekatan panel tidak hanya meningkatkan jumlah observasi, tetapi juga mampu menangkap heterogenitas spesifik tiap provinsi yang penting mengingat perbedaan struktur ekonomi, basis pertanian, dan kapasitas fiskal antar wilayah.¹⁵⁰ Dalam konteks ekonomi Islam, khususnya *maqāṣid al-syarī'ah* pendekatan empiris seperti ini berfungsi menilai sejauh mana pembiayaan pertanian berkontribusi pada masalah dalam bentuk peningkatan pendapatan, data kemiskinan perdesaan, dan nilai tukar petani.¹⁵¹

¹⁴⁹ Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). *Basic Econometrics* (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

¹⁵⁰ Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.

¹⁵¹ Asy-Syātibī, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Jilid II). Beirut: Dār al-Ma'rifah.

3.2. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder kuantitatif berbentuk data panel, yaitu gabungan data runtut waktu (*time series*) dan data antar wilayah (*cross section*). Data penelitian difokuskan pada wilayah kawasan barat Indonesia, khususnya Pulau Sumatera yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Periode penelitian mencakup tahun 2019–2024 yang mewakili enam tahun terakhir.

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi dan terpercaya, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sumber data pembiayaan sektor pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan petani, dan tingkat kemiskinan perdesaan, serta Kementerian Pertanian sebagai sumber data pendukung terkait sektor pertanian.

3.3. Operasional Variabel

3.3.1. Variabel independen (PSP) pembiayaan sektor pertanian

Pembiayaan sektor pertanian (PSP) adalah total pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada sektor pertanian di wilayah Indonesia bagian barat dalam periode tertentu. Variabel ini diukur dalam satuan moneter (Rp per-kelompok tani/Poktan) dan mencerminkan tingkat dukungan permodalan terhadap sektor pertanian.

3.3.2. Variabel dependen ialah kemaslahatan petani

Kemaslahatan petani dalam penelitian ini diukur berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ an-nafs* (kelangsungan hidup yang layak). Pendekatan ini merupakan

konsep kemaslahatan multidimensi yang bersifat laten dan tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kemaslahatan petani direpresentasikan melalui tiga indikator ekonomi utama, yaitu:

- a. Nilai Tukar Petani (NTP). NTP diukur menggunakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (I_t) dan Indeks Harga yang Dibayar Petani (I_b). Indeks harga yang diterima petani mencerminkan nilai jual hasil produksi pertanian, sedangkan indeks harga yang diterima petani mencerminkan pengeluaran petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. NTP digunakan sebagai indikator kemaslahatan petani dan daya beli rumah tangga tani. Satuan pengukuran NTP adalah indeks (tanpa satuan), dengan nilai $NTP > 100$ menunjukkan bahwa pendapatan petani relatif lebih besar dibandingkan pengeluarannya, sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kondisi sebaliknya. Dalam praktik pelaporan, perubahan nilai NTP sering dinyatakan dalam poin indeks.
- b. Pendapatan Petani. Pendapatan petani diukur berdasarkan rata-rata pendapatan rumah tangga tani dalam satu periode tertentu, yang diperoleh dari selisih antara total penerimaan usaha pertanian dan total biaya produksi yang dikeluarkan petani. Variabel ini mencerminkan tingkat kemaslahatan ekonomi petani pada level mikro. Satuan pengukuran pendapatan petani adalah rupiah (Rp) per rumah tangga tani per periode, umumnya dinyatakan dalam Rp/bulan.
- c. Kemiskinan perdesaan. Kemiskinan perdesaan didefinisikan sebagai persentase penduduk miskin yang tinggal di wilayah perdesaan pada setiap provinsi. Data bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel ini diukur dalam persentase (%), semakin tinggi tingkat kemiskinan perdesaan menunjukkan semakin rendahnya tingkat kemaslahatan petani secara makro. Variabel ini

digunakan bersama NTP dan pendapatan petani dalam analisis data panel.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data sekunder yang telah dipublikasikan oleh lembaga resmi dan terpercaya. Metode dokumentasi dipilih karena penelitian ini tidak menggunakan survei lapangan, melainkan memanfaatkan data statistik yang tersedia secara terbuka dan sistematis.

Data yang dikumpulkan meliputi pembiayaan sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP), pendapatan petani, serta data kemiskinan perdesaan menurut Provinsi dan daerah. data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dalam bentuk data panel dan diolah menggunakan perangkat lunak EViews.

3.6. Model Analisis Data

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup sejumlah provinsi di wilayah bagian Barat Indonesia, khususnya pulau Sumatera, selama periode enam tahun terakhir yaitu 2019-2024. Oleh karena itu, metode analisis yang digunakan untuk mengestimasi pengaruh pembiayaan syariah terhadap kemaslahatan petani adalah regresi data panel.

Mengingat kemaslahatan petani dalam penelitian ini diprosikan melalui tiga indikator utama, yaitu nilai tukar petani (NTP), pendapatan petani (PP), dan tingkat kemiskinan perdesaan (KP). Dengan demikian, model regresi panel yang diterapkan terdiri dari tiga persamaan struktural yang merepresentasikan masing-masing indikator kemaslahatan tersebut.

Persamaan pertama menjelaskan hubungan fungsional antara nilai tukar petani dan pembiayaan syariah, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NTP_{it} = \alpha + \beta PSP_{it} + \mu_{it}$$

Dimana, NTP_{it} merupakan nilai tukar petani di provinsi (i) pada tahun (t), PSP_{it} merepresentasikan realisasi pembiayaan syariah sektor pertanian di provinsi (i) pada tahun (t), (α *alpha*) adalah konstanta, dan (β *beta*) merupakan koefisien regresi yang menunjukkan arah serta besaran pengaruh pembiayaan syariah terhadap nilai tukar petani. Sementara itu, (μ_{it} *mu*) adalah error term komposit yang mencakup pengaruh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, baik yang bersifat spesifik provinsi maupun gangguan acak.

Persamaan kedua digunakan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan syariah sektor pertanian terhadap pendapatan petani, yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

$$PP_{it} = \alpha + \beta PSP_{it} + \mu_{it}$$

Dimana PP_{it} menunjukkan pendapatan petani di provinsi (i) pada tahun (t). PP_{it} merepresentasikan realisasi pembiayaan syariah sektor pertanian di provinsi (i) pada tahun (t), (α) adalah konstanta, dan (β *beta*) merupakan koefisien regresi yang menunjukkan arah serta besaran pengaruh pembiayaan syariah terhadap pendapatan petani. Sementara itu, (μ_{it} *mu*) adalah error term komposit yang mencakup pengaruh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, baik yang bersifat spesifik provinsi maupun gangguan acak

Selanjutnya, persamaan ketiga diformulasikan untuk menguji pengaruh pembiayaan syariah sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan perdesaan, sebagai berikut:

$$KP_{it} = \alpha + \beta PSP_{it} + \mu_{it}$$

Dimana KP_{it} merupakan persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan pada Provinsi (i) dan tahun (t). KP_{it} merepresentasikan realisasi pembiayaan syariah sektor pertanian di provinsi (i) pada tahun (t), (α) adalah konstanta, dan (β) merupakan koefisien regresi yang menunjukkan arah serta besaran pengaruh pembiayaan syariah terhadap tingkat kemiskinan perdesaan. Sementara itu, (μ_{it}) adalah error term komposit yang mencakup pengaruh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model, baik yang bersifat spesifik provinsi maupun gangguan acak. Dalam persamaan ini, koefisien secara teoritis diharapkan bernilai negatif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan syariah sektor pertanian berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan.

3.7. Pemilihan Model Regresi Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui beberapa tahap pengujian, yaitu: uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM), untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM). Setelahnya, dilakukan pengujian hipotesis dan evaluasi kelayakan model.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Uji *Chow* ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas *Cross-section Chi-square*. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha < 0,05$), maka

model *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model*.¹⁵²

b. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas *Breusch-Pagan (Both)*. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM).¹⁵³

c. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas statistik *Chi-Square* dengan tingkat signifikansi 5 persen. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih, sedangkan apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan.¹⁵⁴

3.8. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai

¹⁵² Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). *Basic Econometrics* (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

¹⁵³ Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Cham: Springer.

¹⁵⁴ Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7th ed.). Boston: Cengage Learning.

probabilitas *t-statistic* dengan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha < 0,05$). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.¹⁵⁵

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas *F-statistic* dengan tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha < 0,05$). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.¹⁵⁶

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi. Nilai R^2 yang digunakan dalam penelitian ini adalah Adjusted R-squared, karena dinilai lebih mampu menggambarkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). *Basic Econometrics* (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

¹⁵⁶ Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7th ed.). Boston: Cengage Learning.

¹⁵⁷ Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Cham: Springer.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup seluruh provinsi di Kawasan Barat Indonesia selama periode 2019–2024. Data panel merupakan kombinasi antara data runtun waktu (*time series*) dan data antar wilayah (*cross-section*), sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam menangkap dinamika pembiayaan sektor pertanian dan kemaslahatan masyarakat. Penggunaan data panel memungkinkan pengendalian terhadap perbedaan karakteristik antar-provinsi yang bersifat tidak teramati serta pengamatan perubahan kondisi ekonomi antar waktu secara simultan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembiayaan sektor pertanian, yang merepresentasikan besarnya alokasi pembiayaan yang disalurkan kepada sektor pertanian di masing-masing provinsi. Pembiayaan sektor pertanian dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, pendapatan petani, serta kemaslahatan masyarakat perdesaan. Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemaslahatan masyarakat, yang dikonstruksikan berdasarkan indikator ekonomi dan perspektif maqāsid syariah. Pada aspek ekonomi, kemaslahatan masyarakat diukur melalui nilai tukar petani (NTP), pendapatan pertanian berusaha sendiri menurut pekerjaan utama, serta persentase penduduk miskin di perdesaan menurut provinsi dan daerah. Ketiga indikator tersebut dipilih karena mampu merepresentasikan kondisi kemaslahatan masyarakat pertanian secara lebih komprehensif.

4.1.1. Perkembangan Pembiayaan Pertanian

Berdasarkan data pembiayaan sektor pertanian selama periode 2019–2024, secara umum terlihat adanya kecenderungan peningkatan pembiayaan di Kawasan Barat Indonesia, meskipun dengan tingkat dan pola yang berbeda antar-provinsi.

Tabel 4.1
Perkembangan Pembiayaan Sektor Pertanian
Pembiayaan Sektor Pertanian (Ribu Rupiah per Poktan)

Provinsi	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	536,52	2.384,15	1.644,78	1.983,55	2.780,59	3.971,03
Sumatera Utara	1.630,23	1.360,69	499,99	691,77	843,42	1.006,48
Sumatera Barat	1.101,75	816,67	303,44	565,68	842,30	1.158,85
Riau	1.670,93	2.173,14	1.676,22	8.411,25	9.426,08	10.321,29
Jambi	1.291,57	775,14	873,80	1.052,97	1.342,78	1.883,02
Sumatera Selatan	610,41	445,23	617,97	930,64	1.499,43	2.421,70
Bengkulu	627,38	608,13	711,44	950,04	1.182,45	1.331,59
Lampung	382,43	273,25	58,72	161,31	282,62	324,77
Kepulauan Bangka Belitung	1.137,49	1.419,84	1.343,27	2.888,04	2.804,36	2.564,89
Kepulauan Riau	268,85	231,96	216,33	2.338,73	4.011,34	951,94

Sumber : Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) OJK, 2025

Dari data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi mengalami peningkatan pembiayaan setelah tahun 2021, yang mengindikasikan adanya penguatan dukungan pembiayaan terhadap sektor pertanian pada periode tersebut. Beberapa provinsi, seperti Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, menunjukkan peningkatan pembiayaan yang relatif bertahap dan konsisten. Sementara itu, Sumatera Utara dan Sumatera Barat

mengalami fluktuasi pembiayaan pada awal periode penelitian, sebelum kembali menunjukkan tren peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Provinsi Lampung menunjukkan tingkat pembiayaan yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain, dengan fluktuasi yang cukup tajam. Sedangkan provinsi Riau menunjukkan pola yang paling menonjol, dengan lonjakan pembiayaan sektor pertanian yang sangat signifikan sejak tahun 2022 hingga 2024. Selain itu, Kepulauan Bangka Belitung juga menunjukkan nilai pembiayaan yang relatif tinggi dan stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan pada akhir periode penelitian. Kepulauan Riau mengalami lonjakan pembiayaan pada tahun 2022–2023, namun kembali menurun pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya volatilitas pembiayaan di provinsi tersebut.

4.1.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kawasan Barat Indonesia selama periode 2019–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat pada sebagian besar provinsi. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan daya beli dan kemaslahatan petani, meskipun laju pertumbuhan NTP berbeda-beda antar provinsi. Beberapa provinsi mengalami pertumbuhan NTP yang relatif stabil setiap tahunnya, sementara provinsi lain menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi harga komoditas, produktivitas pertanian, serta faktor eksternal seperti perubahan iklim dan kebijakan pemerintah terkait sektor pertanian. Secara keseluruhan, tren peningkatan NTP ini menandakan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kemaslahatan petani dan penguatan sektor pertanian di Kawasan Barat Indonesia.

Tabel 4.2
Perkembangan Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Provinsi (Poin)						
Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	98,38	98,74	101,20	107,46	114,35	119,26
Sumatera Utara	104,39	109,83	119,06	121,73	125,32	136,23
Sumatera Barat	100,05	100,59	107,61	110,37	110,28	123,74
Riau	106,39	118,79	138,72	144,19	152,93	173,22
Jambi	101,75	107,62	126,89	135,08	138,11	156,14
Sumatera Selatan	98,92	95,37	107,80	107,70	105,10	120,84
Bengkulu	104,83	114,10	132,60	134,01	146,91	181,90
Lampung	96,96	94,73	101,23	104,30	109,36	124,98
Kepulauan Bangka Belitung	102,35	103,95	125,71	125,95	118,32	133,80
Kepulauan Riau	101,11	99,19	104,38	106,79	104,49	104,81

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Berdasarkan data diatas bahwa peningkatan NTP mengindikasikan adanya perbaikan daya beli petani, yang mencerminkan bahwa harga yang diterima petani relatif lebih baik dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan produksi dan konsumsi. Provinsi Riau dan Bengkulu menunjukkan peningkatan NTP yang relatif signifikan selama periode penelitian. Kondisi ini mencerminkan performa sektor pertanian yang cukup kuat serta perbaikan struktur harga yang menguntungkan petani.

Sementara itu, provinsi seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Lampung juga mengalami peningkatan NTP secara bertahap, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Di sisi lain, Kepulauan Riau menunjukkan pergerakan NTP yang relatif stabil dengan peningkatan yang tidak terlalu besar dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika sektor pertanian di wilayah tersebut cenderung lebih terbatas, sejalan dengan karakteristik struktur ekonomi daerah yang tidak sepenuhnya bertumpu pada sektor pertanian. Secara

keseluruhan, perkembangan NTP di Kawasan Barat Indonesia selama periode penelitian memberikan gambaran awal bahwa kemaslahatan relatif petani mengalami perbaikan. Temuan deskriptif ini menjadi dasar penting bagi analisis lanjutan menggunakan metode regresi data panel untuk menguji pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat secara empiris.

4.1.3. Perkembangan Pendapatan Petani

Pendapatan Petani dari sektor pertanian di Kawasan Barat Indonesia Tahun 2019–2024 (Ribuan Rupiah) menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun disertai fluktuasi pada beberapa tahun dan provinsi.

Tabel 4.3
Perkembangan Pendapatan Petani
Rata-Rata Pendapatan Petani (Ribuan Rupiah)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	1.490,24	1.407,50	1.348,60	1.691,20	1.372,50	2.078,60
Sumatera Utara	1.277,73	1.347,30	1.224,10	1.556,30	1.439,00	1.604,00
Sumatera Barat	1.268,57	1.156,90	1.165,60	1.379,40	1.490,10	1.370,40
Riau	1.821,78	1.784,90	1.863,10	2.174,30	1.621,40	2.358,20
Jambi	1.702,78	1.456,30	1.564,30	2.069,10	1.432,40	2.433,60
Sumatera Selatan	1.387,02	1.325,00	1.467,50	1.807,00	1.379,00	2.120,10
Bengkulu	1.255,89	1.217,30	1.216,60	1.584,70	1.367,00	1.944,00
Lampung	1.254,64	1.195,10	1.177,50	1.473,30	1.391,70	1.591,20
Bangka Belitung	1.747,66	1.586,40	1.650,10	2.111,00	1.688,50	2.360,70
Kepulauan Riau	1.764,01	1.719,40	1.548,50	1.976,50	2.400,30	2.198,70

Sumber: Data diolah dari BPS, 2025

Dari data diatas menunjukkan secara umum, peningkatan pendapatan petani mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga petani serta meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau menunjukkan tingkat pendapatan petani yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, khususnya pada periode akhir penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi pertanian di wilayah tersebut relatif lebih produktif dan didukung oleh aktivitas ekonomi yang berkembang.

Sementara itu, provinsi seperti Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung mengalami kenaikan pendapatan yang lebih bertahap, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu. Fluktuasi tersebut dapat mencerminkan pengaruh faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas, kondisi iklim, serta dinamika kebijakan ekonomi dan pertanian.

Secara keseluruhan, perkembangan pendapatan petani di Kawasan Barat Indonesia memberikan gambaran awal bahwa kemaslahatan ekonomi petani cenderung mengalami perbaikan selama periode penelitian. Temuan deskriptif ini selanjutnya menjadi dasar penting dalam analisis regresi data panel untuk menguji secara empiris pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat.

4.1.4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan

Persentase penduduk miskin di Kawasan Barat Indonesia selama periode 2019–2024 secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kemaslahatan masyarakat secara bertahap di sebagian besar provinsi, meskipun tingkat penurunan tidak selalu seragam di

seluruh wilayah. Beberapa provinsi mengalami fluktuasi pada tahun-tahun tertentu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika ekonomi lokal, perubahan harga komoditas pertanian, maupun faktor eksternal seperti bencana alam dan pandemi. Misalnya, ada provinsi yang menunjukkan penurunan signifikan dalam satu atau dua tahun, tetapi mengalami sedikit peningkatan kembali di tahun berikutnya sebelum akhirnya kembali menurun. Secara keseluruhan, tren menurun ini tetap mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemaslahatan masyarakat perdesaan di Kawasan Barat Indonesia.

Tabel 4.4
Perkembangan Penduduk Miskin Perdesaan

Provinsi	Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi (Persen)					
	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aceh	18,03	17,46	17,78	16,87	16,92	16,75
Sumatera Utara	9,14	8,77	8,84	7,98	8,03	8,08
Sumatera Barat	7,88	7,43	7,91	6,86	7,23	7,28
Riau	7,62	7,29	7,51	7,08	6,65	6,61
Jambi	6,53	6,23	6,42	6,19	6,28	5,90
Sumatera Selatan	13,02	12,96	13,12	12,31	12,21	11,53
Bengkulu	15,49	15,16	15,28	14,49	13,96	13,56
Lampung	14,27	13,83	14,18	13,14	12,65	11,97
Bangka Belitung	6,79	6,33	6,63	6,26	5,85	6,17
Kepulauan Riau	11,04	10,43	11,10	10,68	10,69	9,94

Sumber: Data diolah dari BPS, 2025

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan kondisi kemaslahatan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Penurunan ini menandakan bahwa sebagian besar keluarga tani berhasil

meningkatkan pendapatan dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, meskipun masih terdapat variasi antar provinsi . Provinsi Aceh dan Bengkulu, misalnya, secara konsisten tercatat memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lain sepanjang periode penelitian. Meskipun demikian, kedua provinsi ini menunjukkan tren penurunan secara bertahap, yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan kemaslahatan. Kondisi ini juga mencerminkan tantangan struktural yang masih dihadapi, seperti keterbatasan produktivitas pertanian, terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap pasar dan modal, serta kendala infrastruktur yang mempengaruhi distribusi hasil pertanian.

Di sisi lain, provinsi seperti Jambi, Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah, dengan kecenderungan menurun pada periode akhir penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, baik melalui sektor pertanian maupun sektor pendukung lainnya, mampu secara efektif meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan faktor-faktor seperti diversifikasi sumber pendapatan, penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien, serta akses yang lebih baik terhadap pasar lokal dan regional. Selain itu, peran program pemerintah, lembaga keuangan mikro, dan inisiatif masyarakat juga berkontribusi dalam memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, perkembangan persentase penduduk miskin di Kawasan Barat Indonesia memberikan gambaran bahwa kemaslahatan masyarakat perdesaan cenderung membaik selama periode penelitian. Temuan ini sejalan dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) serta rata-rata pendapatan petani yang menunjukkan adanya surplus ekonomi dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selanjutnya, kondisi kemaslahatan ini akan dianalisis lebih mendalam melalui pendekatan regresi data panel untuk memahami pengaruh pembiayaan pertanian terhadap kemaslahatan masyarakat tani secara lebih komprehensif. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung perbaikan kemaslahatan masyarakat perdesaan di masa mendatang.

4.2. Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan analisis inferensial lebih lanjut. Analisis statistik deskriptif ini mencakup ukuran pemusatan data, seperti nilai rata-rata (mean) dan nilai tengah (median), serta ukuran penyebaran data yang meliputi nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Selain itu, statistik deskriptif juga memberikan informasi mengenai bentuk distribusi data melalui indikator *skewness* dan *kurtosis*, sehingga dapat diketahui kecenderungan sebaran data apakah mendekati distribusi normal atau tidak.

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk membantu peneliti memahami pola, tingkat variasi, serta karakteristik awal dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Informasi ini menjadi penting sebagai dasar dalam menentukan pendekatan analisis yang tepat, mengidentifikasi potensi penyimpangan data, serta memastikan kelayakan data sebelum digunakan dalam estimasi model regresi data panel.

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik	Nilai Tukar Petani (Poin)	Kemiskinan Perdesaan (Persen)	Pendapatan Petani (Ribu Rupiah per bulan)	Pembiayaan Sektor Pertanian (Ribu Rupiah per Poktan)
Mean	117,015	10,4098	1.614,275	1.643,611
Median	109,595	9,540	1.552,400	1.077,361
Maximum	181,900	18,030	2.433,600	10.321,290
Minimum	94,730	5,850	1.156,900	58,717
Standar Deviasi	19,006	3,751	345,209	2.006,450
Skewness	1,367	0,470	0,799	3,012
Kurtosis	4,728	1,908	2,727	12,293
Jarque-Bera	26,166	5,228	6,575	306,684
Probabilitas	0,000	0,073	0,037	0,000
Observasi	60	60	60	60

Sumber: Data diolah dari EViews, 2026

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 4.5, Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 117,02, dengan nilai minimum 94,73 dan maksimum 181,90. Nilai ini menggambarkan bahwa secara umum kondisi kemaslahatan petani berada di atas titik impas ($NTP > 100$), yang menandakan adanya surplus pendapatan dan kemampuan petani untuk menutupi biaya produksi. Namun demikian, variasi yang cukup signifikan antar periode dan antar wilayah pengamatan tercermin dari nilai standar deviasi sebesar 19,00, menunjukkan bahwa tidak semua petani menikmati kemaslahatan secara merata. Beberapa wilayah masih berada dekat atau bahkan di bawah ambang impas, sehingga menuntut perhatian kebijakan yang lebih spesifik untuk wilayah dengan NTP rendah agar ketimpangan kemaslahatan petani dapat diminimalkan.

Variabel kemiskinan perdesaan (KP) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 10,41 persen, dengan rentang nilai antara 5,85 persen hingga 18,03 persen. Standar deviasi sebesar 3,75 mencerminkan adanya variasi tingkat kemiskinan yang relatif moderat, baik antar wilayah maupun antar periode pengamatan. Distribusi data KP cenderung mendekati normal, sebagaimana ditunjukkan oleh probabilitas uji *Jarque-Bera* yang lebih besar dari 0,05, yang menandakan bahwa sebagian besar data berkumpul di sekitar rata-rata. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat variasi antar wilayah, tingkat kemiskinan perdesaan masih terkonsentrasi pada kisaran menengah, dan sebagian kecil wilayah mengalami kemiskinan ekstrem yang perlu ditangani melalui intervensi kebijakan spesifik, seperti peningkatan akses pembiayaan, pendidikan, dan infrastruktur pertanian.

Pendapatan petani dari sektor pertanian (PP) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.614,28 ribu rupiah per bulan, dengan nilai minimum 1.156,90 dan maksimum mencapai 2.433,60 ribu rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 345,21 mengindikasikan adanya perbedaan pendapatan yang cukup signifikan antar wilayah dan antar periode pengamatan. Distribusi data variabel ini cenderung miring ke kanan (*right-skewed*), yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki pendapatan di bawah rata-rata, sedangkan sebagian kecil petani memperoleh pendapatan yang relatif jauh lebih tinggi. Fenomena ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan di sektor pertanian, yang dapat berasal dari perbedaan akses terhadap input produksi, teknologi, modal, maupun skala usaha. Oleh karena itu, analisis pendapatan petani tidak hanya perlu mempertimbangkan nilai rata-rata, tetapi juga distribusi dan disparitas antar wilayah sebagai indikator ketidakmerataan ekonomi perdesaan.

Sementara itu, pembiayaan sektor pertanian (PSP) menampilkan nilai rata-rata sebesar 643,61 ribu rupiah per poktan, dengan rentang nilai yang sangat luas, yakni antara 58,72 hingga 10.321,29 ribu rupiah. Standar deviasi yang tinggi, sebesar 2.006,45, menunjukkan adanya variasi besar dalam penyaluran pembiayaan sektor pertanian antar wilayah. Analisis distribusi lebih lanjut mengungkapkan bahwa data PSP tidak berdistribusi normal, tercermin dari nilai *skewness* dan *kurtosis* yang tinggi. Hal ini

menandakan adanya pencilan (*outliers*), yaitu beberapa wilayah yang menerima pembiayaan sangat besar dibandingkan rata-rata nasional, sementara sebagian besar wilayah hanya menerima pembiayaan rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan penyaluran pembiayaan, yang dapat mempengaruhi kemampuan wilayah tertentu dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Fenomena ini juga menegaskan perlunya mekanisme alokasi pembiayaan yang lebih merata, berbasis kebutuhan riil petani, serta monitoring yang ketat untuk meminimalkan disparitas antar wilayah.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif ini menunjukkan adanya heterogenitas yang cukup tinggi pada variabel-variabel kunci dalam penelitian, baik dari sisi kemaslahatan petani, kemiskinan, pendapatan, maupun pembiayaan sektor pertanian. Perbedaan ini menjadi indikator bahwa intervensi kebijakan tidak dapat bersifat seragam dan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Misalnya, wilayah dengan NTP rendah, tingkat kemiskinan tinggi, atau pembiayaan terbatas memerlukan perhatian khusus melalui program pembiayaan terarah, pelatihan peningkatan produktivitas, dan penguatan infrastruktur pertanian.

Selain itu, adanya pencilan dalam data pembiayaan sektor pertanian menekankan pentingnya analisis lebih lanjut mengenai efektivitas alokasi dana. Wilayah yang menerima pembiayaan tinggi tidak selalu menghasilkan peningkatan pendapatan petani yang proporsional, sehingga evaluasi kinerja penggunaan pembiayaan menjadi aspek penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Hasil ini sejalan dengan literatur ekonomi pertanian yang menekankan bahwa alokasi modal yang tepat sasaran lebih berpengaruh terhadap kemaslahatan petani dibandingkan jumlah pembiayaan secara nominal.

Distribusi pendapatan yang miring ke kanan juga memiliki implikasi penting bagi pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani masih berada pada kelompok berpendapatan rendah, sehingga peningkatan pembiayaan harus diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan

tersebut agar pengurangan kemiskinan dapat lebih efektif. Strategi peningkatan produktivitas melalui pembiayaan sebaiknya dikombinasikan dengan transfer teknologi, akses pasar, dan pelatihan manajemen usaha tani untuk memastikan dampak yang maksimal terhadap pendapatan dan kemaslahatan.

Hasil deskriptif ini juga menegaskan perlunya mempertimbangkan heterogenitas antar periode pengamatan. Nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi yang signifikan menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, yang bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas, iklim, kebijakan subsidi, dan kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, analisis data panel yang mempertimbangkan variasi lintas waktu menjadi sangat relevan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap karakteristik statistik deskriptif setiap variabel penelitian menjadi landasan penting sebelum melanjutkan ke analisis regresi panel. Informasi ini membantu mengidentifikasi pola distribusi, potensi outlier, tingkat disparitas antar wilayah, serta heterogenitas temporal yang perlu diperhitungkan dalam model ekonometrika. Analisis ini sekaligus memberikan dasar empiris untuk menyusun strategi intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kemaslahatan petani dan menurunkan kemiskinan perdesaan secara berkelanjutan.

4.3. Hasil Estimasi Variabel Penelitian

Hasil estimasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen disajikan berdasarkan model regresi yang telah ditetapkan sebelumnya. Estimasi dilakukan menggunakan pendekatan regresi data panel, yang memungkinkan analisis terhadap data yang bersifat lintas-individu dan lintas-waktu secara simultan. Dengan pendekatan ini, setiap variabel independen dapat dianalisis untuk melihat arah pengaruhnya apakah positif atau negatif serta besarnya kontribusi terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Analisis parsial memungkinkan peneliti menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah, sementara analisis simultan menunjukkan pengaruh gabungan semua variabel terhadap variabel dependen, sehingga

memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai interaksi antar variabel.

Hasil estimasi ini diharapkan tidak hanya memberikan bukti empiris mengenai hubungan antar variabel penelitian, tetapi juga menjadi dasar yang kuat dalam pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, informasi yang diperoleh dari estimasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang memiliki pengaruh signifikan, menentukan prioritas kebijakan atau intervensi yang relevan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika yang terjadi dalam konteks penelitian. Dengan demikian, hasil regresi data panel ini memiliki peran penting dalam menafsirkan fenomena yang diamati secara kuantitatif sekaligus mendukung validitas dan reliabilitas kesimpulan penelitian.

4.3.1. Analisis pengaruh pembiayaan terhadap nilai tukar petani

Analisis pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana peran pembiayaan dalam meningkatkan kemaslahatan petani. Nilai Tukar Petani digunakan sebagai indikator kemaslahatan karena mencerminkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani.

Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan tiga spesifikasi model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan pembiayaan sektor pertanian sebagai variabel independen utama. Perbandingan antar spesifikasi model dilakukan melalui uji pemilihan model untuk menentukan model yang paling sesuai dalam analisis lanjutan.

Tabel 4.6
Hasil estimasi pengaruh pembiayaan terhadap nilai tukar petani

Variabel dependen: nilai tukar petani						
Pendekatan regresi panel						
	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
	Koefisien	p-value	Koefisien	p-value	Koefisien	p-value
	estimasi		estimasi		estimasi	
C	4,227	0,000	4,219	0,000	4,222	0,000
	[34,237]		[26,506]		[30,013]	
Pembiayaan	0,075	0,001	0,076	0,015	0,076	0,003
	[4,278]		[5,353]		[3,839]	
R ²	0,239		0,555		0,205	
Adjusted R ²	0,266		0,464		0,191	
F-stat	18,308		6,118		14,999	
Prob(F-stat)	0,007		0,006		0,027	
DW-stat	0,517		0,891		0,763	
Normality test						
Jarque-Bera	6,120		0,175		6,031	
P-value	0,046		0,915		0,049	
Chow-test			Hausman Test			
	Effects Test	Stat	p-value	Test Summary	X Stat	p-value
	Cross-section F	3.860	0,009	Cross-section random	0,019	0,964
	Cross-section X	32.157	0,002			
Residual Cross-Section Dependence Test						
	Breusch-Pagan LM	152,631	0,000			
	Pesaran scaled LM	11,345	0,000			
	Pesaran CD	9,571	0,000			

Sumber: Data diolah dari EViews, 2026

Keterangan: Angka dalam [] menunjukkan nilai t-statistik

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel data pada tabel 4.6, menunjukkan bahwa variabel pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Tukar

Petani (NTP) pada seluruh spesifikasi model yang digunakan, yang menegaskan peran strategis pembiayaan dalam meningkatkan kemaslahatan ekonomi petani, yaitu pada *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Koefisien pembiayaan pada model CEM sebesar 0,075 dengan nilai probabilitas 0,001 menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembiayaan di sektor pertanian secara statistik berpengaruh nyata terhadap peningkatan NTP pada tingkat signifikansi 1 persen. Hasil yang relatif konsisten juga ditunjukkan pada FEM dan REM dengan koefisien masing-masing sebesar 0,076 dan tingkat signifikansi yang kuat ($p\text{-value} < 0,01$). Konsistensi tanda dan signifikansi koefisien pada ketiga model tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara pembiayaan dan NTP bersifat stabil dan tidak sensitif terhadap perbedaan spesifikasi model.

Secara ekonomi, nilai koefisien pembiayaan yang positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan pembiayaan sektor pertanian akan mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani. Hal ini dapat dijelaskan melalui mekanisme peningkatan kapasitas produksi, kemudahan akses input pertanian, serta perbaikan efisiensi usaha tani akibat tersedianya modal yang memadai. Dengan meningkatnya pembiayaan, petani memiliki peluang yang lebih besar untuk mengadopsi teknologi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas skala usaha, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan relatif terhadap pengeluaran produksi.

Dari sisi kemampuan model dalam menjelaskan variasi Nilai Tukar Petani, nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan hasil yang bervariasi antara pendekatan. Model CEM memiliki nilai R^2 sebesar 0,239, yang berarti bahwa sekitar 23,9 persen variasi Nilai Tukar Petani dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan sektor pertanian. Nilai ini relatif rendah, namun masih

dapat diterima mengingat kemaslahatan petani dipengaruhi oleh berbagai faktor lain diluar model, seperti harga komoditas, kondisi iklim, kebijakan subsidi, dan fluktuasi biaya input produksi. Sementara itu, FEM menunjukkan nilai R^2 yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,555, yang mengindikasikan bahwa perbedaan karakteristik antar wilayah mampu menjelaskan variasi NTP secara lebih komprehensif.

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji *Chow* dan uji *Hausman*. Hasil uji *Chow* menghasilkan nilai *Cross-section F* sebesar 3,860 dengan probabilitas 0,009 serta nilai *Cross-section Chi-square* sebesar 32,157 dengan probabilitas 0,002. Temuan ini mengindikasikan bahwa model dengan efek tetap lebih tepat dibandingkan model tanpa efek individu, karena terdapat perbedaan karakteristik antar wilayah yang signifikan. Namun, hasil uji *Hausman* menunjukkan nilai statistik sebesar 0,019 dengan probabilitas 0,964, yang mengindikasikan bahwa perbedaan estimasi antara FEM dan REM tidak bersifat sistematis. Oleh karena itu, *Random Effect Model* dipilih sebagai model yang paling efisien dan konsisten untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan terhadap NTP.

Nilai Adjusted R^2 pada CEM tercatat sebesar 0,266, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai R^2 . Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena jumlah variabel independen yang terbatas serta struktur data panel yang digunakan. Meskipun secara umum Adjusted R^2 diharapkan lebih kecil dari R^2 , perbedaan ini tidak mengindikasikan kesalahan estimasi yang serius dan masih dapat ditoleransi dalam analisis data panel sederhana. Pada FEM dan REM, nilai Adjusted R^2 masing-masing sebesar 0,464 dan 0,191, yang menunjukkan bahwa FEM tetap menjadi model dengan daya jelaskan tertinggi.

Hasil uji signifikansi simultan melalui uji *F-statistik* menunjukkan bahwa variabel pembiayaan sektor pertanian secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Nilai Tukar Petani pada seluruh model. Hal ini tercermin dari nilai *Prob(F-stat)* yang masing-masing berada di bawah tingkat signifikansi 5 persen, yaitu sebesar 0,007 pada CEM, 0,006 pada FEM, dan 0,027 pada REM. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara pembiayaan sektor pertanian dan Nilai Tukar Petani.

Dari sisi hasil uji normalitas *Jarque–Bera* menunjukkan bahwa residual pada *Random Effect Model* (REM) memiliki p-value sebesar 0,049, yang mengindikasikan adanya penyimpangan ringan dari asumsi normalitas. Namun, penyimpangan ini masih dapat ditoleransi mengingat karakteristik estimator data panel yang bersifat asimtotik. Residual pada *Common Effect Model* (CEM) memiliki p-value 0,046, juga menunjukkan penyimpangan kecil, sedangkan *Fixed Effect Model* (FEM) memiliki p-value 0,915, yang jauh di atas 5 persen dan menunjukkan distribusi residual normal. Mengingat jumlah observasi panel yang relatif kecil ($10 \text{ provinsi} \times 6 \text{ tahun} = 60 \text{ observasi}$) dan sifat asimtotik dari estimator data panel, penyimpangan kecil pada REM dan CEM masih dapat diterima dan tidak menurunkan validitas inferensi statistik.

Hasil uji statistik *Durbin–Watson* menunjukkan adanya perbedaan tingkat autokorelasi antar spesifikasi model, di mana model REM dengan nilai 0,763 dan model CEM sebesar 0,571 sama-sama menunjukkan adanya autokorelasi positif, bahkan pada CEM terlihat lebih kuat. Sementara itu, model FEM memiliki nilai 0,891 yang relatif lebih tinggi dibandingkan kedua model lainnya, namun masih berada di bawah nilai ideal (sekitar 2), sehingga tetap menunjukkan adanya autokorelasi positif meskipun dalam tingkat yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika Nilai Tukar Petani (NTP) cenderung dipengaruhi oleh nilai pada periode sebelumnya (persistensi), khususnya pada model yang kurang mampu mengendalikan heterogenitas individu. Selain itu, hasil uji

ketergantungan penampang silang menggunakan *uji Breusch-Pagan LM test*, *Pesaran scaled LM test*, dan *Pesaran CD test* menunjukkan seluruh statistik uji signifikan pada taraf 1 persen ($p\text{-value} = 0,000$), yang berarti terdapat ketergantungan antar wilayah dalam dinamika NTP, sehingga perubahan kemaslahatan petani di suatu wilayah tidak bersifat independen, melainkan dipengaruhi oleh kondisi wilayah lain, seperti integrasi pasar pertanian, arus distribusi komoditas, serta kebijakan lintas daerah.

Secara keseluruhan, hasil estimasi ini menegaskan bahwa pembiayaan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) di kawasan penelitian. Temuan ini memperkuat argumen bahwa perluasan akses pembiayaan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam meningkatkan kemaslahatan petani. Oleh karena itu, hasil penelitian ini relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pembiayaan sektor pertanian yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kemaslahatan petani di tingkat regional. Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel pada Tabel 4.6, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap NTP dinyatakan diterima. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien pembiayaan sektor pertanian yang bernilai positif dan signifikan secara statistik pada seluruh pendekatan model yang digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), dengan nilai probabilitas di bawah taraf signifikansi 5 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan sektor pertanian secara nyata mampu mendorong kenaikan NTP di wilayah penelitian. Penerimaan hipotesis tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berperan penting dalam meningkatkan kemaslahatan petani, yang tercermin dari NTP yang cenderung berada di atas titik impas. Akses pembiayaan yang lebih luas memungkinkan petani meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi usaha tani, serta kualitas penggunaan input

pertanian, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan relatif petani. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan pembiayaan sektor pertanian sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan peningkatan kemaslahatan petani.

4.3.2. Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Nilai Tukar Petani dengan *Maqāsid al-syarī'ah*

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Tukar Petani (NTP), mencerminkan perbaikan posisi tukar petani melalui peningkatan pendapatan relatif terhadap pengeluaran. Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam), peningkatan NTP dapat dianalisis melalui tiga komponen utama. Pertama, *darūriyyāt* (kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi) tercermin dari terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga petani, seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan ini memastikan keberlangsungan hidup rumah tangga perdesaan, sekaligus mengurangi risiko kemiskinan dan kerentanan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berperan langsung dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan, sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pemeliharaan kehidupan (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*).

Kedua, *hājiyyāt* (kebutuhan pendukung yang memudahkan kehidupan) tampak dari akses yang lebih baik terhadap modal, pupuk, dan alat pertanian modern. Fasilitas pembiayaan ini membantu petani meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi risiko kegagalan usaha, dan memperkuat efisiensi ekonomi rumah tangga. Dengan dukungan tersebut, petani dapat mengelola sumber daya secara lebih optimal, memaksimalkan produktivitas, dan menstabilkan pendapatan mereka. Dampak ini menunjukkan bagaimana pembiayaan sektor pertanian tidak hanya meningkatkan kemaslahatan materi, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan keberlanjutan ekonomi.

Ketiga, *taḥsīniyyāt* (kebutuhan penyempurnaan yang meningkatkan kualitas hidup) tercermin dari peluang bagi petani dan keluarganya untuk berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan inovasi pertanian. Peningkatan NTP dan pendapatan memberikan ruang bagi rumah tangga perdesaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mendukung produktivitas jangka panjang dan inovasi di sektor pertanian. Selain itu, kondisi ekonomi yang lebih stabil memungkinkan pemenuhan kebutuhan anak dan akses pendidikan yang lebih baik, yang berkaitan dengan perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, pembiayaan sektor pertanian tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan sosial masyarakat perdesaan.

Lebih jauh, penguatan *ḥifẓ al-māl* melalui peningkatan NTP dan pendapatan petani memungkinkan pengelolaan harta yang lebih produktif dan adil, sehingga mendorong distribusi manfaat yang merata. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian yang efektif mampu menurunkan kemiskinan perdesaan secara nyata, meningkatkan daya beli, dan menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan masyarakat. Selain itu, keterkaitan antara stabilitas ekonomi dengan peningkatan akses *maqāṣid al-syarī‘ah* pendidikan dan keterampilan memperkuat sinergi antarkomponen, sehingga dampak pembiayaan dapat dirasakan lintas generasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian yang tepat sasaran tidak hanya menurunkan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga mendukung pencapaian *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dengan kebijakan yang terintegrasi, adil, dan disertai pendampingan usaha, sektor pertanian dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kemaslahatan berkeadilan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kemaslahatan masyarakat perdesaan. Temuan ini juga memberikan dasar empiris bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam merancang program pembiayaan yang efektif untuk pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan.

4.3.3. Analisis pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan petani

Estimasi pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap pendapatan petani dilakukan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh pembiayaan dalam meningkatkan kemaslahatan ekonomi petani. Pendapatan petani dipandang sebagai indikator penting karena mencerminkan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan hidup serta keberlanjutan usaha pertanian yang dijalankan. Oleh karena itu, analisis ini menjadi relevan untuk menilai efektivitas pembiayaan sektor pertanian dalam mendorong peningkatan pendapatan petani di wilayah penelitian.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan regresi data panel yang mengkombinasikan dimensi waktu dan wilayah, sehingga mampu menangkap dinamika perubahan pendapatan petani antar periode serta perbedaan karakteristik antar provinsi. Penggunaan regresi data panel dipilih karena dinilai sebagai metode yang paling sesuai untuk mengakomodasi heterogenitas data dan meningkatkan efisiensi estimasi. Melalui pendekatan ini, hubungan antara pembiayaan sektor pertanian dan pendapatan petani dapat dianalisis secara lebih komprehensif dan akurat.

Hasil estimasi yang diperoleh diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai peran pembiayaan sektor pertanian dalam meningkatkan pendapatan petani. Temuan ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian akademik di bidang ekonomi pertanian dan ekonomi syariah, tetapi juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan yang lebih efektif dan berpihak pada peningkatan kemaslahatan petani.

Tabel 4.7
Hasil estimasi pembiayaan terhadap pendapatan petani

Variabel dependen: pendapatan petani						
Pendekatan regresi panel						
	<i>Common Effect</i>		<i>Fixed Effect</i>		<i>Random Effect</i>	
	Koefisien estimasi	p-value	Koefisien estimasi	p-value	Koefisien estimasi	p-value
C	6,54 [41,317]	0,000	6,536 [32,941]	0,000	6,538 [36,626]	0,000
Pembiayaan	0,118 [5,259]	0,000	0,119 [4,194]	0,001	0,119 [4,751]	0,000
R ²	0,322		0,625		0,283	
Adjusted R ²	0,311		0,549		0,271	
F-stat	27,666		8,183		22,972	
Prob(F-stat)	0,002		0,000		0,012	
DW-stat	1,346		2,435		2,093	
<i>Normality test</i>						
Jarque-Bera	2,186		1,600		2,179	
p-value	0,335		0,449		0,033	
<i>Chow-test</i>			<i>Hausman Test</i>			
	Effects Test	Stat	p-value	Test Summary	X Stat	p-value
	Cross-section F	4,397	0,003	Cross-section random	0,030	0,986
	Cross-section X	35.525	0,000			
<i>Residual Cross-Section Dependence Test</i>						
	Breusch-Pagan LM	98.813	0,000			
	Pesaran scaled LM	5,672	0,000			
	Pesaran CD	7,447	0,000			

Sumber: Data diolah menggunakan EViews, 2026

Keterangan: Angka dalam [] menunjukkan nilai t-statistik

Hasil analisis regresi data panel diatas, menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani pada seluruh spesifikasi model yang digunakan. Pada *Common Effect Model*, koefisien pembiayaan tercatat sebesar 0,118 dengan nilai t-statistik 5,259 dan p-value 0,000, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan secara statistik meningkatkan pendapatan petani pada tingkat signifikansi

1 persen. Hasil yang konsisten juga diperoleh pada *Fixed Effect Model*, di mana koefisien pembiayaan sebesar 0,119 dengan *t*-statistik 4,194 dan *p-value* 0,001. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun perbedaan karakteristik antar wilayah telah dikendalikan, pembiayaan tetap memiliki pengaruh yang kuat terhadap pendapatan petani. Pada *Random Effect Model*, koefisien pembiayaan tetap bernilai positif sebesar 0,119 dengan *t*-statistik 4,751 dan *p-value* 0,000. Konsistensi tanda positif dan tingkat signifikansi pada ketiga model menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan dan pendapatan petani bersifat stabil dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan pendekatan estimasi yang digunakan.

Secara konseptual, hasil temuan ini sejalan dengan teori ekonomi pertanian yang menempatkan pembiayaan sebagai faktor penting dalam meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi usaha tani. Ketersediaan pembiayaan memungkinkan petani untuk mengakses input produksi yang lebih berkualitas, seperti benih unggul, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian yang lebih modern. Selain itu, pembiayaan juga berperan dalam memperlancar siklus produksi dan mengurangi keterbatasan modal kerja yang sering menjadi kendala utama petani skala kecil. Dengan demikian, peningkatan pembiayaan sektor pertanian berimplikasi langsung terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pendapatan petani dapat diterima.

Ditinjau dari sisi statistik nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi pendapatan petani relatif cukup baik. Pada *Fixed Effect Model* menunjukkan nilai R^2 yang lebih tinggi, yaitu sebesar 0,625 dengan *adjusted R²* sebesar 54,9 persen variasi pendapatan petani dapat dijelaskan oleh pembiayaan sektor pertanian serta perbedaan karakteristik tetap antar provinsi selama periode pengamatan. Pada

Fixed Effect Model ini lebih tinggi menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan penjelasan yang relatif kuat dibandingkan dengan *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Sehingga mengindikasikan bahwa pengendalian heterogenitas antar wilayah memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi pendapatan petani. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor spesifik wilayah, seperti kondisi agroklimat, struktur komoditas unggulan, tingkat infrastruktur pertanian, dan kebijakan daerah, memiliki peran dalam mempengaruhi pendapatan petani dan perlu diperhitungkan secara eksplisit dalam analisis.

Hasil uji simultan (uji F) semakin memperkuat kelayakan model yang digunakan. Pada *Fixed Effect Model*, nilai *F-statistic* sebesar 8,183 dengan probabilitas sebesar 0,000 menunjukkan bahwa secara simultan variabel pembiayaan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak secara statistik dan memiliki kemampuan inferensial yang memadai. Meskipun uji F pada *Common Effect Model* dan *Random Effect Model* juga menunjukkan signifikansi, namun kombinasi antara daya jelaskan yang lebih tinggi dan pengendalian heterogenitas wilayah menjadikan *Fixed Effect Model* lebih representatif dalam menjelaskan hubungan antar variabel penelitian.

Pemilihan model regresi panel dalam penelitian ini dilakukan melalui *uji Chow* dan *uji Hausman*. Hasil *uji Chow* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,003 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen, sehingga menolak hipotesis nol dan mengindikasikan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model*. Sementara itu, hasil *uji Hausman* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,986, yang secara statistik mengarah pada pemilihan *Random Effect Model*. Namun demikian, pemilihan model dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada hasil uji Hausman semata, melainkan juga

mempertimbangkan pemenuhan asumsi klasik dan kualitas estimasi yang dihasilkan masing-masing model.

Berdasarkan uji asumsi klasik, uji normalitas residual menggunakan uji *Jarque–Bera* menunjukkan bahwa residual pada *Random Effect Model* tidak berdistribusi normal, dengan nilai p-value sebesar 0,033 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5 persen. Sebaliknya, residual pada *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* menunjukkan distribusi normal, masing-masing dengan nilai p-value sebesar 0,335 dan 0,449. Selain itu, hasil pengujian autokorelasi melalui statistik *Durbin–Watson* menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* memiliki nilai sebesar 2,435, yang mendekati nilai ideal dan mengindikasikan tidak adanya masalah autokorelasi yang serius. Sementara itu, nilai *Durbin–Watson* pada *Random Effect Model* menunjukkan adanya potensi autokorelasi. Dengan mempertimbangkan pemenuhan asumsi normalitas dan autokorelasi, *Fixed Effect Model* dinilai sebagai model yang paling memenuhi kriteria ekonometrika dalam penelitian ini.

Selain itu, hasil pengujian autokorelasi melalui statistik *Durbin–Watson* menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* memiliki nilai sebesar 2,435, yang mendekati nilai ideal dan mengindikasikan tidak adanya masalah autokorelasi yang serius. Sebaliknya, nilai *Durbin–Watson* pada *Common Effect Model* dan *Random Effect Model* relatif lebih rendah, yang menunjukkan adanya indikasi autokorelasi positif pada residual. Temuan ini semakin memperkuat argumentasi bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model yang paling memenuhi asumsi ekonometrika dalam penelitian ini.

Hasil uji ketergantungan penampang (*cross-section dependence*) menunjukkan bahwa seluruh statistik uji, yaitu *Breusch–Pagan LM*, *Pesaran scaled LM*, dan *Pesaran CD*, signifikan pada tingkat 1 persen. Temuan ini mengindikasikan

adanya keterkaitan yang kuat antar wilayah dalam data panel, di mana kondisi ekonomi pertanian di suatu provinsi berpotensi mempengaruhi provinsi lainnya melalui mekanisme perdagangan antar wilayah, distribusi komoditas pertanian, serta kebijakan ekonomi regional. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang terintegrasi antar wilayah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kemaslahatan petani.

Secara keseluruhan, berdasarkan nilai koefisien pembiayaan yang stabil pada kisaran 0,118–0,119, tingkat signifikansi yang konsisten pada seluruh spesifikasi model, hasil uji simultan yang signifikan, serta pemenuhan asumsi ekonometrika yang lebih baik pada *Fixed Effect Model*, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sektor pertanian secara empiris terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, hipotesis penelitian (H_1) diterima, dan pembiayaan sektor pertanian dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam mendorong peningkatan kemaslahatan petani di kawasan penelitian.

4.3.4. Analisis pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan petani dengan *Maqāsid al-syarī'ah*

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani, yang tercermin dalam peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) dan daya beli rumah tangga. Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam), peningkatan pendapatan ini dapat dianalisis melalui tiga komponen utama: *darūriyyāt* (kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi), *ḥājiyyāt* (kebutuhan pendukung yang memudahkan kehidupan), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan penyempurnaan yang meningkatkan kualitas hidup). Pada level *darūriyyāt*, pembiayaan sektor pertanian memungkinkan petani memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, seperti pangan yang layak, sandang, papan, dan layanan kesehatan, sehingga

kualitas hidup keluarga terjaga dan risiko kemiskinan dapat ditekan secara signifikan.

Di sisi *ḥājiyyāt*, pembiayaan berperan dalam menyediakan akses modal, pupuk, benih unggul, dan alat pertanian yang lebih modern. Fasilitas ini membantu petani meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi usaha tani, serta mengurangi risiko kerugian. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, petani dapat mengelola usaha pertanian secara lebih optimal, meningkatkan pendapatan, dan menjaga keberlanjutan ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian bukan sekadar alat konsumtif, tetapi instrumen strategis yang mendorong produktivitas dan pengelolaan harta secara berkelanjutan, terkait langsung dengan *ḥifz al-māl* (perlindungan dan pengembangan harta).

Lebih lanjut, pada level *taḥsīniyyāt*, stabilitas ekonomi yang dihasilkan dari peningkatan pendapatan membuka peluang bagi petani dan keluarganya untuk berinvestasi dalam pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan inovasi pertanian. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan produktivitas sektor pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan pendapatan memperkuat *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena kebutuhan dasar seperti gizi, kesehatan, dan tempat tinggal dapat terpenuhi, sehingga kualitas hidup dan kemaslahatan masyarakat perdesaan meningkat secara menyeluruh.

Dari perspektif *ḥifz al-‘aql* (perlindungan akal), peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi memungkinkan rumah tangga perdesaan mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan dan pengembangan keterampilan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas intelektual, kemampuan inovasi, dan daya saing tenaga kerja pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian tidak hanya berdampak ekonomi,

tetapi juga berperan dalam pembangunan manusia (*human capital*) dan penguatan kualitas akal masyarakat perdesaan.

Peningkatan pendapatan juga berkaitan dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan pendapatan yang lebih stabil, keluarga petani mampu menjamin keberlangsungan hidup dan masa depan generasi berikutnya melalui pemenuhan kebutuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi keluarga lintas generasi, sehingga tujuan fundamental *maqāṣid al-syarī'ah* dapat tercapai secara komprehensif.

Selain itu, pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan petani juga berimplikasi pada pengentasan kemiskinan perdesaan. Dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli, petani dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, memperluas jaringan usaha, dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Kondisi ini menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih luas dan memungkinkan tercapainya kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan, selaras dengan prinsip syariah yang menekankan pemeliharaan harta, jiwa, akal, dan keturunan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendorong kemaslahatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pembiayaan yang tepat sasaran tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pemenuhan kebutuhan pada tingkat *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Dengan adanya akses pembiayaan yang memadai, petani mampu meningkatkan produktivitas, mengadopsi inovasi, serta memperbaiki kualitas hidup keluarga, sehingga tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat tercapai secara terpadu, mencakup perlindungan harta, jiwa, akal, dan keturunan.

Oleh karena itu, optimalisasi pembiayaan sektor pertanian perlu diarahkan pada kebijakan yang terintegrasi, adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa manfaat pembiayaan tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi juga menjangkau petani kecil dan masyarakat rentan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pembiayaan yang efektif dan berdaya guna, sehingga dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan dapat berlangsung secara luas dan berjangka panjang di wilayah perdesaan.

4.3.5. Analisis pengaruh pembiayaan terhadap tingkat Kemiskinan di perdesaan

Hasil analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan sektor pertanian terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan beberapa spesifikasi model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), agar diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara pembiayaan dan tingkat kemiskinan perdesaan. Dengan pendekatan ini, setiap variasi antar provinsi maupun antar periode dapat diperhitungkan secara tepat, sehingga estimasi yang dihasilkan lebih akurat dan representatif.

Hasil analisis diharapkan memberikan bukti empiris tentang peran pembiayaan sektor pertanian dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat perdesaan. Temuan ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan pembiayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis pertanian.

Tabel 4.8

Pengaruh pembiayaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan

Variabel dependen: kemiskinan di perdesaan

Pendekatan regresi panel

	<i>Common Effect</i>		<i>Fixed Effect</i>		<i>Random Effect</i>	
	Koefisien estimasi	p-value	Koefisien estimasi	p-value	Koefisien estimasi	p-value
C	3,065 [9,548]	0,000	2,530 [37,774]	0,000	2,533 [18,896]	0,000
Pembiayaan	-0,113 [2,471]	0,016	-0,036 [-3,759]	0,005	-0,036 [-3.817]	0,003
R ²	0,095		0,986		0,201	
Adjusted R ²	0,079		0,983		0,187	
F-stat	6,109		348,471		14,649	
Prob(F-stat)	0,016		0,000		0,032	
DW-stat	0,047		1,228		1,045	
Normality test						
Jarque-Bera	3,974		0,283		4,754	
p-value	0,137		0,867		0,092	
Chow-test						
Effects Test	Stat	p-value	Test Summary		X Stat	p-value
Cross-section F	349,772	0,000	Cross-section random		0,696	0,403
Cross-section X	250,687	0,000				
Residual Cross-Section Dependence Test						
Breusch-Pagan LM	99,489	0,000				
Pesaran scaled LM	5,743	0,000				
Pesaran CD	7,802	0,000				

Sumber: Data diolah menggunakan EViews, 2026

Keterangan: Angka dalam [] menunjukkan nilai t-statistik

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel pada Tabel 4.8, pengaruh pembiayaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan dianalisis melalui tiga pendekatan model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pada CEM, koefisien pembiayaan tercatat sebesar -0,113 dengan *p-value* 0,016, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan sektor pertanian secara signifikan

menurunkan tingkat kemiskinan di perdesaan pada tingkat signifikansi 5 persen. Nilai negatif koefisien ini sejalan dengan teori ekonomi pembangunan yang menyatakan bahwa ketersediaan pembiayaan meningkatkan akses petani terhadap input produksi dan modal kerja, sehingga mendorong produktivitas dan pendapatan yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan.

Hasil analisis pada FEM juga menunjukkan arah koefisien negatif, yakni sebesar $-0,036$ dengan p -value $0,005$. Temuan ini mengindikasikan bahwa setelah mengendalikan karakteristik tetap masing-masing provinsi, peningkatan pembiayaan tetap berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan perdesaan. Konsistensi tanda negatif antara CEM dan FEM menegaskan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap pengentasan kemiskinan bersifat robust dan tidak tergantung pada metode analisis yang digunakan, sekaligus menegaskan pentingnya memperhitungkan heterogenitas antar wilayah dalam analisis data panel.

Pada REM sebagai model yang mempertimbangkan efek acak antar unit cross-section, koefisien pembiayaan juga negatif sebesar $-0,036$ dengan p -value $0,003$, yang lebih kecil dari $0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa secara statistik, peningkatan pembiayaan sektor pertanian berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan. Dengan demikian, hipotesis alternatif H_1 , yang menyatakan bahwa pembiayaan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan perdesaan, diterima. Koefisien negatif pada REM menegaskan konsistensi hasil parsial dan dapat dijadikan dasar untuk rekomendasi kebijakan pengembangan sektor pertanian berbasis pembiayaan.

Analisis koefisien determinasi menunjukkan variasi kemampuan model dalam menjelaskan tingkat kemiskinan perdesaan. Nilai R^2 pada CEM tercatat $0,095$, FEM $0,986$, dan

REM 0,201, dengan Adjusted R^2 masing-masing 0,079, 0,983, dan 0,187. Hasil ini mengindikasikan bahwa *Fixed Effect Model* memiliki daya jelaskan paling tinggi, yakni sekitar 98,3 persen variasi kemiskinan perdesaan dapat dijelaskan oleh pembiayaan dan karakteristik tetap antar provinsi. Sebaliknya, R^2 yang relatif rendah pada CEM dan REM menunjukkan bahwa faktor-faktor lain diluar model juga berperan signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan, seperti struktur pasar, kualitas pendidikan, akses infrastruktur, dan kondisi sosial-ekonomi lokal.

Uji *F-statistik* dan *Prob(F-stat)* pada ketiga model menunjukkan signifikansi simultan variabel independen. Pada FEM, nilai *F-statistik* sebesar 348,471 dengan *p-value* 0,000 menegaskan bahwa secara simultan, pembiayaan sektor pertanian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan perdesaan. Temuan serupa diperoleh pada CEM dan REM dengan *F-statistik* masing-masing 6,109 dan 14,649. Hasil ini menunjukkan bahwa model secara keseluruhan layak digunakan untuk menguji hubungan antar variabel dan mendukung inferensi statistik dalam penelitian ini.

Analisis uji normalitas residual dilakukan melalui *Jarque-Bera*, yang pada REM menunjukkan *p-value* 0,092, lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis nol diterima dan residual dapat dianggap mendekati normal. Sementara pada CEM dan FEM, nilai *p-value* masing-masing 0,137 dan 0,867 menunjukkan residual berdistribusi normal, yang berarti estimasi parameter pada ketiga model tidak terdistorsi secara signifikan akibat pelanggaran asumsi normalitas. Dengan demikian, validitas inferensi statistik model REM tetap dapat diterima, terutama karena jumlah observasi yang cukup besar.

Uji *Durbin-Watson* pada ketiga model menunjukkan adanya perbedaan tingkat autokorelasi. Nilai DW-statistik sebesar 0,047 pada CEM mengindikasikan adanya autokorelasi positif yang

kuat, sedangkan FEM dengan nilai 1,228 relatif lebih mendekati nilai ideal 2, menunjukkan autokorelasi rendah. REM dengan nilai DW 1,045 menunjukkan adanya autokorelasi positif ringan. Temuan ini menekankan perlunya perhatian terhadap korelasi serial pada data panel dan menegaskan bahwa FEM lebih sesuai untuk analisis robust dalam konteks ini.

Uji ketergantungan antar unit cross-section menggunakan *Breusch-Pagan LM*, *Pesaran scaled LM*, dan *Pesaran CD* menunjukkan nilai *p-value* 0,000 pada ketiga statistik, yang mengindikasikan adanya keterkaitan antar provinsi. Artinya, kondisi ekonomi dan tingkat kemiskinan pada suatu wilayah dapat mempengaruhi wilayah lain melalui mekanisme perdagangan, mobilitas tenaga kerja, dan kebijakan regional. Hal ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan efek spillover dalam analisis data panel lintas wilayah.

Secara konseptual, hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan perdesaan. Peningkatan modal usaha tani memungkinkan petani mengakses input yang lebih berkualitas, memperluas kapasitas produksi, dan meningkatkan efisiensi pertanian. Implikasi empiris ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan pembiayaan harus diperkuat, baik melalui lembaga formal maupun non-formal, guna memastikan distribusi yang merata dan tepat sasaran bagi kelompok petani yang paling rentan.

Dengan demikian, analisis ini secara keseluruhan menegaskan bahwa pembiayaan sektor pertanian memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan perdesaan. Model FEM menunjukkan daya jelaskan paling tinggi, sementara REM tetap layak digunakan meskipun memiliki keterbatasan pada autokorelasi. Hasil ini secara empiris mendukung penerimaan H_1 , sehingga kebijakan peningkatan pembiayaan sektor

pertanian dapat menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan perdesaan di kawasan penelitian.

4.3.6. Analisis pengaruh pembiayaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan dengan *maqāsid al-syarī'ah*

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan. Koefisien negatif dan signifikan secara statistik pada seluruh spesifikasi model menegaskan bahwa peningkatan pembiayaan di sektor pertanian berkontribusi dalam menurunkan persentase penduduk miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya meningkatkan akses modal, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi perdesaan melalui peningkatan produktivitas usaha tani, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan pendapatan rumah tangga, sehingga secara langsung berdampak pada pengurangan kemiskinan.

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam), pengaruh pembiayaan terhadap penurunan kemiskinan mencerminkan pencapaian *ḥifz al-māl* (perlindungan dan pengembangan harta). Pembiayaan yang efektif memungkinkan masyarakat perdesaan mengakses modal usaha secara produktif, mengembangkan aset ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme pembiayaan informal yang berisiko merugikan. Dengan meningkatnya kapasitas ekonomi dan berkurangnya kemiskinan, pembiayaan berfungsi sebagai instrumen distribusi harta yang adil dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip syariah yang menekankan perlindungan dan pengelolaan harta secara produktif.

Selain itu, penurunan kemiskinan perdesaan juga berkaitan erat dengan *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Berkurangnya kemiskinan meningkatkan kemampuan masyarakat perdesaan

dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan yang cukup dan bergizi, akses layanan kesehatan, serta tempat tinggal yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor pertanian tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia, yang merupakan tujuan utama syariat Islam.

Dari perspektif *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), pembiayaan sektor pertanian yang menurunkan kemiskinan menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan rumah tangga perdesaan mengakses pendidikan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan keterampilan. Stabilitas ini juga membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar anak dan menjamin keberlanjutan generasi berikutnya. Dengan meningkatnya kemaslahatan ekonomi, masyarakat perdesaan memiliki peluang lebih luas untuk berinvestasi dalam pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan inovasi pertanian, yang mendorong efisiensi dan pertumbuhan sektor pertanian.

Pengaruh pembiayaan terhadap kemiskinan juga dapat dianalisis melalui integrasi indikator ekonomi lainnya, seperti Nilai Tukar Petani (NTP) dan pendapatan rumah tangga. Peningkatan NTP menunjukkan perbaikan posisi tukar petani melalui peningkatan pendapatan relatif terhadap pengeluaran, yang memperkuat kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu, peningkatan pendapatan petani mendukung pemeliharaan aset ekonomi, mendorong pengelolaan harta secara produktif, serta mengurangi kerentanan terhadap kejadian ekonomi yang tidak terduga. Hal ini menunjukkan sinergi antara indikator ekonomi dan tujuan *hifz al-māl* dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pengaruh pembiayaan terhadap penurunan kemiskinan dapat dijelaskan melalui tiga komponen *maqāṣid al-syarī'ah*: *darūriyyāt* (kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi), karena pembiayaan memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan mencegah kerentanan hidup; *hājiyyāt* (kebutuhan pendukung yang memudahkan kehidupan), karena akses modal, pupuk, dan sarana produksi meningkatkan kapasitas usaha tani dan stabilitas ekonomi; serta *taḥsīniyyāt* (kebutuhan penyempurnaan yang meningkatkan kualitas hidup), karena stabilitas ekonomi memberi peluang bagi masyarakat berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan inovasi pertanian, sehingga meningkatkan kualitas hidup serta produktivitas lintas generasi.

Penurunan kemiskinan perdesaan melalui pembiayaan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Dengan kesejahteraan yang meningkat, rumah tangga memiliki daya beli lebih tinggi, mampu mengembangkan usaha, dan terlibat dalam jaringan ekonomi yang lebih luas, sehingga tercipta stabilitas sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pembiayaan sektor pertanian yang tepat sasaran tidak hanya menurunkan kemiskinan, tetapi juga mendukung pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan yang terintegrasi, adil, inklusif, dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat perdesaan lintas generasi.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, perkembangan pembiayaan sektor pertanian di Kawasan Barat Indonesia selama periode 2019–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan secara umum, meskipun terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan antar provinsi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh variasi kapasitas fiskal daerah, tingkat produktivitas sektor pertanian, serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan yang tersedia di masing-masing wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dan perkembangan pembiayaan belum sepenuhnya merata di seluruh provinsi penelitian.

Kedua, kondisi kemaslahatan masyarakat perdesaan pada periode yang sama mengalami perbaikan yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan petani, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), serta kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan di beberapa wilayah. Perubahan ini menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan sektor pertanian dengan kondisi kemaslahatan masyarakat perdesaan di Kawasan Barat Indonesia.

Ketiga, berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, pembiayaan sektor pertanian terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani dan Nilai Tukar Petani (NTP), serta berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan sektor pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan kemaslahatan petani di 10 provinsi Kawasan Barat Indonesia selama periode penelitian.

Keempat, hasil penelitian juga menunjukkan adanya variasi pengaruh pembiayaan antar provinsi, yang mengindikasikan bahwa efektivitas pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana

yang disalurkan, tetapi juga oleh karakteristik wilayah, struktur komoditas, serta kondisi sosial ekonomi masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembiayaan yang lebih adaptif dan berbasis pada kondisi spesifik wilayah agar dampaknya lebih optimal.

Kelima, penggunaan pendekatan data panel dalam penelitian ini memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan satu periode waktu, karena mampu menangkap dinamika perubahan antar waktu (2019–2024) dan perbedaan antar provinsi secara simultan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris yang lebih kuat mengenai hubungan antara pembiayaan sektor pertanian dan kemaslahatan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah disarankan untuk meningkatkan pemerataan pembiayaan sektor pertanian dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi lokal masing-masing wilayah, khususnya daerah dengan kapasitas fiskal dan infrastruktur yang masih terbatas, agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara lebih merata oleh petani. Optimalisasi pembiayaan tidak hanya difokuskan pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kemaslahatan petani secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan dasar (*daruriyyat*) seperti perlindungan harta, jiwa, akal, dan keturunan, yang didukung oleh kemudahan akses modal, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan (*hājiyyat*), dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan, inovasi teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (*tahsiniyyāt*). Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan dapat merancang skema pembiayaan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan sosial-ekonomi serta keberlanjutan usaha tani, sementara penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif lanjutan dengan variabel yang lebih beragam seperti akses pasar, inovasi teknologi, dan faktor lingkungan guna menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Kitab

- Al-Bukhari, M. I. (2019). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah.
- Al-Syatibi, A. (2003). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Jilid II). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- (2020). *Islamic economics and sustainable development*. London: Routledge.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). *Basic econometrics* (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Ibn 'Ashur, M. T. (2001). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā'is.
- Ismail. (2020). *Perbankan syariah*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia  Group).
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1239956>
- Kamali, M. H. (2020). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: IB Tauris.
- Karim, A. A. (2021). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (Edisi terbaru). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usmani, M. T. (2020). *An introduction to Islamic finance* (Revised ed.). Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an.
<https://kalamullah.com/introduction-to-Islamic-finance.html>
- Varian, H. R. (2020). *Intermediate microeconomics: A modern approach* (10th ed.). W. W. Norton & Company.

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford: Oxford University Press. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>

Laporan & Dokumen Resmi

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Agricultural indicators 2020*. <https://www.bps.go.id/en/publication/2021/10/08/d87b75366a02dbdb6c6df37a0/agricultural-indicators-2020>

----- (2022). *Produk domestik bruto sektor pertanian 2022*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/05/31/ea145f324f198e80194043cd/produk-domestik-bruto-indonesia-menurut-pengeluaran--2019-2023>.

----- (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/02/28/18018f9896f09f03580a614b/statistik-indonesia-2023>.

----- (2023). *Statistik Keuangan Daerah 2023*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/21/64368d768c8e41ce119aabda/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2022-2023>.

----- (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025* (Berita Resmi Statistik No. 103/11/Th. XXVIII). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>

Bank Muamalat Indonesia. (2020). *Annual report*. Jakarta: BMI. https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2020.pdf

Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal PSP, Kementerian Pertanian RI. (2025). *KUR sektor pertanian 2025*. <https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/SFocFu24m909EKoI7lloVP2Ba4QzuqOKgzROIyYy.pdf>

Food and Agriculture Organization (FAO). (2021). *The state of food and agriculture 2021: Making agri-food systems more resilient to shocks and stresses*. Rome: FAO. <https://www.fao.org/3/cb4476en/cb4476en.pdf>

Info Literasi: Lembaga Keuangan Mikro: Kunci Pembiayaan Petani Perdesaan. (2025). BPPSDMP Kementerian Pertanian.

<https://pustaka.bppsdmp.pertanian.go.id/info-literasi/info-literasi-lembaga-keuangan-mikro-kunci-pembiayaan-petani-perdesaan>

- Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2024). *Statistik sarana pertanian 2020–2024 (Statistical Yearbook of Agricultural Facilities 2024)*. Jakarta: Kementerian Pertanian. <https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Statistik Sarana Pertanian 2024 compressed>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Roadmap keuangan berkelanjutan 2021–2025*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-2021-2025.aspx>
- (2023). *Laporan profil industri perbankan Indonesia – Triwulan II 2023*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-profil-industri-perbankan/Documents/LSPI%20TW%20II%202023.pdf>
- (2023). *Pedoman produk pembiayaan murabahah*. <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Murabahah>
- (2024). *Statistik perbankan syariah — Desember 2024*. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2024>
- The Jakarta Post. (2024). *Agricultural development takes priority in western Indonesia*. <https://jakpost.net>
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- World Bank. (2022). *Agriculture finance & agriculture insurance*. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsektor/brief/agriculture-finance>
- (2023). *Agriculture finance & financial risk in agriculture*. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsektor/brief/agriculture-finance>
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability (AR6 WGII)*. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2>

- DSN-MUI. (2020). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/fatwa-ekonomi-syariah/>
- (2020). *Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Istishna*. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/fatwa-ekonomi-syariah/>

Jurnal dan Artikel Akademik

- Abay, K. A., et al.. (2021). Does rainfall variability explain low uptake of agricultural credit? Evidence from Ethiopia. *European Review of Agricultural Economics*, 49(1), 182–207. <https://doi.org/10.1093/erae/jbab013>
- Abubakar Muhammad, A., et al.. (2025). The role of Islamic finance in promoting economic justice and financial inclusion among marginalised communities. *Suhuf: International Journal of Islamic Studies*, 37(1), 58–68. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i1.10167>
- Aidah, Q., & Yusrani Anugrah, Y. D. (2021). Pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1090>
- Akmal, & Wulandari. (2022). Pengetahuan petani kentang terhadap prosedur pembiayaan online di Kecamatan Pangalengan. *Jurnal Agrikultura*, 33(2), 138–146.
- Aini, R., & Kamilah, K. (2025). Solusi keuangan syariah terhadap pembiayaan sektor pertanian untuk mencapai Sustainable Development Goals. *Ecoplan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 8(1), 51–60. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v8i1.1117>
- Ali, F. (2024). Islamic microfinance for sustainable rural development. <https://agrieconomist.com/Islamic-microfinance-for-sustainable-rural-development>
- Amalia, E., & Nugroho, L. (2021). The role of Islamic microfinance institutions in improving farmers' access to capital. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 255–274. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1362>

- Andriatmoko, et al.. (2024). Nilai tukar petani (NTP) Kabupaten Trenggalek Tahun 2022. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 8(3/2), 1222–1237.
- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah, musyarakah, financing risk, and performance of Islamic banks: Empirical evidence from Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1), 131–142.
<https://doi.org/10.20885/JEKL.vol11.iss1.art9>
- Antonio, M. S. (2021). Islamic finance and sustainability. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 101–115.
- Ardiarta, N., et al.. (2025). Penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan usaha di bank syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.24993>
- Asante, B. O., et al.. (2025) Climate Resilience at Your Fingertips: Digital Financial Inclusion and Farmers' Adoption of Climate-Smart Agricultural Technologies. *Journal of Future Business*. 11(1), 1–18.
<https://doi.org/10.1186/s43093-025-00624-5>
- Ayu, C., Wuryantoro, W., & Sari, N. M. W. (2024). Kinerja ekonomi usaha tani tanaman pangan dan kontribusinya pada kemaslahatan petani di Desa sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 29(4), 633–641.
<https://doi.org/10.18343/jipi.29.4.633>
- Brar, J. K., et al.. (2021). A case study of the impact of climate change on agricultural loan credit risk. *Mathematics*, 9(23), 3058. <https://doi.org/10.3390/math9233058>
- Buono, et al.. (2023). Pengaruh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah digital pada sektor pertanian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3949–3955.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.11355>
- Cameila A. Yahya, et al.. (2023). Implementasi akad murabahah dalam pengadaan alat-alat pertanian. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 1046–1057.
<https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.206>
- Deras, S., & Luju, M. T. (2024). Perbandingan produktivitas dan pendapatan usahatani padi sawah berdasarkan status

- kepemilikan lahan. *Jurnal Agriuma*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.31289/agri.v6i1.11633>
- Dina, F. (2025). Pengaruh tenaga kerja sektor pertanian dan produksi padi terhadap nilai tukar petani subsektor tanaman pangan di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 5(3), 1049–1062. <https://doi.org/10.53625/juremi.v5i3.11675>
- Fitriadi, et al.. (2024). Convergence in the agricultural economic industry in Indonesia: A dynamic. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 17(2), 217–232.
- Fahamsyah, M. H., et al.. (2023). Profit-loss sharing in Islamic banking: Global insights from a systematic review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>
- Febrilia, B. R. A., et al.. (2024). Perkembangan dan determinan nilai tukar petani tanaman pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (2017–2021). *Jurnal Agribisnis Unisi*, 12(1), 37–45. <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v12i1.2499>
- Gelata, T. F., and Han, J. (2024). Rural credit access and contract farming nexus in Ethiopia: A meta-analysis. *Heliyon*, 10(1): e23154. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23154>
- Gopinath, G., & Stein, J. C. (2021). Banking, trade, and the making of a dominant currency. *The Quarterly Journal of Economics*, 136(2), 783–830. <https://doi.org/10.1093/qje/qjaa036>
- Hariyani, N. (2022). Efektivitas pelatihan literasi keuangan bagi rumah tangga petani. *Jurnal AgroSainTa*, 6(2), 37–44. <https://doi.org/10.51589/ags.v6i2.3134>
- Hardana, A., et al.. (2025). Syariah-compliant financing models and their strategic contribution to the agricultural sektor and the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). *Perspectives on Advanced New Generations of Global and Local Economic Horizons*, 1(2), 12–20. <https://doi.org/10.69855/panggaleh.v1i1.250>
- Hasan, Z., & Haron, S. (2021). Green banking practices in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 512–529.
- Hasanawi, M. T., et al.. (2021). Peran lembaga keuangan mikro pertanian bagi ketahanan pangan petani Indonesia. *Jurnal AGRIBIS*, 14(1), 1669–1680.

- Hasmawati, H. (2025). Principles of justice and riba-free practice in Islamic financial management. *Journal of Sharia Economics*, 6(2), 250–257. <https://doi.org/10.35896/jse.v6i2.1077>
- Hidayat, R., & Nurhasanah, N. (2022). Implementasi akad mudharabah dalam pembiayaan usaha. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 101–112. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/elmaslahah/article/view/5643>
- Hendrarini, H., & Soedarto, T. (2022). Mengukur literasi keuangan petani tanaman pangan di Madura. *Jurnal SEMAGRI*, 3(1), 71–83.
- Kamali, M. H. (2021). Maqasid al-shariah and sustainable development: The environmental dimension. *Islamic Quarterly*, 65(3), 221–240.
- Khasanah, U. (2022). Innovation and Islamic financial fatwa improving agricultural productivity. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(2), 143–158. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/17434>
- Khan, F. U., et al.. (2024). Constraints to agricultural finance in underdeveloped and developing countries: A systematic literature review. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 22(1), 2329388. <https://doi.org/10.1080/14735903.2024.2329388>
- Khanal, A. R., & Omobitan, O. (2020). Rural finance, capital constrained small farms, and financial performance: Findings from a primary survey. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, 52(2), 288–307. <https://doi.org/10.1017/aae.2019.45>
- Kristiantono, P., & Yuliawati, Y. (2022). Dampak perubahan struktur ekonomi terhadap tingkat kemaslahatan petani dan tenaga kerja sektor pertanian. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 18(2), 141–158.
- Mas'ut, M., & Soim, S. (2025). Akad *musyarakah* dalam pembiayaan perdagangan dan pertanian di LKMA Syariah Barokah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 7(2), 193–204. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.88>

- Munawar, T. A. (2025). Risk analysis of *musyarakah* financing at Bank Aceh Syariah, Indonesia. *AL-MUDHARABAH: Journal of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 113–131. <http://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v6i1.7748>
- Nabil, M., & Herianingrum, S. (2022). Financial Inclusion of Sharia Banking and Poverty 33 Province in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1549–1554. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5755>
- Nasrullah, A. (2023). Tantangan implementasi pembiayaan syariah pada sektor pertanian di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(2), 145–158. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/38152>
- Nasution, R. A., & Kamilah, K. (2025). Evaluasi Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 80–89. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.348>
- Novel, T. A., Zarliani, W. O. A., & Ajo, A. (2025). Pengaruh modal terhadap tingkat kemaslahatan petani di Desa Lakapera, Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 24(2), 225–398. <https://doi.org/10.35965/eco.v24i2.4000>
- Osiemo, J., et al. (2021). Farmer perceptions of agricultural risks; Which risk attributes matter most for men and women. *Sustainability*, 13(23), 12978. <https://doi.org/10.3390/su132312978>
- Pratama, G., Inayah, I., & Haida, N. (2023). Penetapan margin dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah. *EcoBankers: Journal of Economy and Banking*, 4(1), 70–77. <https://doi.org/10.47453/ecobankers.v4i1.1147>
- Puryantoro et al.. (2024). Does credit access affect decision-making within farmer groups? Evidence from smallholder coffee farmers in Indonesia. *Asian Journal of Dairy and Food Research*, 43(3), 594–599. <https://arccjournals.com/journal/asian-journal-of-dairy-and-food-research/DRF-380>
- Putri, et al.. (2025). Penerapan prinsip pembiayaan dalam penilaian kredit kepada petani cabai di Kecamatan Parakansalak

- Kabupaten Sukabumi. *Agricore: Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpa*, 10(1), 46–55.
- Rahman, A., & Rochman, F., (2022). Peran keuangan syariah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 6(1), 45–60. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/almashrafiyah/article/view/25687>
- (2023). Akad Istishna sebagai alternatif pembiayaan produksi berbasis pesanan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 15(1), 41–54. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-amwal/article/view/19876>
- Rahman, A., & Susanto, H. (2021). Climate change and agricultural challenges in Indonesia. *Journal of Environmental and Agricultural Studies*, 6(3), 145–160.
- Rahman, A., & Widodo, T. (2021). Pembiayaan mudharabah pada sektor pertanian: Peluang dan tantangan. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 1–15. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-muzaraah/article/view/20148>
- (2022). Pembiayaan salam sebagai instrumen penguatan modal petani. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 145–158. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-muzaraah/article/view/25987>
- Ramadhani, N. F. (2025). Peran koperasi syariah dalam meningkatkan kemaslahatan petani. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 23–38.
- Rizali, M., & Kamalia, S. N. (2025). Analisis pendapatan dan tingkat kemaslahatan rumah tangga petani padi di Desa Pasar Jati, Kalimantan Selatan. *Urplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 114–125. <https://doi.org/10.71456/sur.v1i2.372>
- Rosida, I. N., et al.. (2022). Model pembiayaan syariah untuk sektor pertanian. *EL DINAR: Jurnal Ilmu Ekonomi & Perbankan Syariah*, 10(1), 16–31. <https://doi.org/10.18860/ed.v10i1.13303>
- Sandy, R., et al.. (2025). Farmer Welfare Factors and Access to Financial Institutions Influence Green Financing.

- AGRIBIOS: Jurnal Agribisnis*, 23(2), 447–455.
<https://unars.ac.id/ojs/index.php/agribios/article/view/6636>
- Satriani, R., et al. (2021). Nilai tukar petani padi di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pertanian Peradaba*, 1(2), 28–35.
<https://doi.org/10.30812/jpp.v1i2.974>
- Sari, L. K., et al. (2023). Dinamika harga pangan dunia dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. *IPB University Repository*.
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/116909>
- Setiawati, R., & Permana, R. (2025). Dampak sistem pembayaran pembiayaan usahatani terhadap produktivitas usahatani padi sawah lahan rawa. *Jurnal Agriovet*, 7(2), 227–244.
- Setiawan, B., Astina, R., & Pramita, C. (2025). Sosialisasi penerapan akad istishna sebagai alternatif pembiayaan syariah bagi petani padi di Desa Sugih Waras. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 115–119.
<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm/article/view/7117/5426>
- Setiawan, R. (2022). Bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* dan mudharabah di bank syariah sesuai syariah Islam. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, 2, 133–143.
<https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408>
- Sholihah, F., & Kusnadi, N. (2019). Dampak pengembangan biofuels terhadap volatilitas harga beberapa komoditas pangan di pasar dunia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(2), 157–170. <http://dx.doi.org/10.21082/jae.v37n2.2019.157-170>
- Subekti, S., Rondhi, M., & Utami, A. Y. (2025). Preferensi risiko dan faktor penentu keputusan pembiayaan usahatani cabai rawit (*Capsicum frutescens* L.) di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Agribest*, 9(2), 47–58.
<https://doi.org/10.32528/agribest.v9i2.4002>
- Syafitri, & Sari. (2023). Optimasi pengelolaan keuangan pertanian dan peternakan berkelanjutan di Perdesaan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 616–628.
- Syafa'at, I. A. S. (2025). Pengaruh inflasi dan PDRB terhadap nilai tukar petani di Provinsi Jawa Barat. *Agricore: Jurnal Agribisnis & Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 10(1), 222–232. <https://doi.org/10.24198/agricore.v10i1.59907>

- Syaputri, F. D., et al.. (2024). Determinants of the level of farmer welfare in Indonesia. **Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 8*(3), 954–966. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v8i3.22846>
- Tiasa, I. T., Sudrajat, I. S., & Astuti, A. (2020). Analisis pendapatan dan tingkat kemaslahatan rumah tangga petani bawang merah di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. *Jurnal Ilmiah Agritas*, 3(2), 21–32. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/agritas/article/view/7180>
- Usni, M. (2025). Systematic literature review (SLR): Analisis risiko pertanian di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan dan Pendidikan Vokasi Pertanian*, 6(1), 1459–1472. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v6i1.1886>
- Wahyuni, S., et al.. (2020). Dinamika kredit program dan perspektif skema baru kredit usaha rakyat untuk pembiayaan pertanian 2020–2024. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(2), 103–117. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/fae/article/view/1098>
- Wahyudi, & Agustian, A. (2025). Kajian kritis pengukuran kemaslahatan petani melalui metode nilai tukar petani dan indeks kemaslahatan petani. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, 2(1), 44–60. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/index.php/jp3/article/view/3968>
- Widi, R. H., et al.. (2025). Innovative agricultural financing models to enhance farmers' access to sustainable credit and investment. *Journal of International Finance*, 13(5), 3791–3802. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3577>
- Yasin, M. (2020). Keragaman sumber pembiayaan usaha tani padi ditinjau dari perspektif Islam. *Jurnal Ekonobis*, 6(1), 147–167.
- Yusuf, M., & Anwar, M. K. (2022). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap pendapatan dan produktivitas petani. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 14(1), 85–102. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/21234>

- Yusuf, M., & Karim, A. (2022). Islamic banking and agricultural finance: A sustainable development approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(2), 221–239.
- Zuhelmi, Z., et al.. (2025). Pengaruh kredit usaha tani dalam pembangunan Perdesaan: Studi kasus program PUAP. *Jurnal Niara*, 17(3), 146–154.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian

Provinsi	Tahun	Pembiayaan Sektor pertanian (Ribu Rupiah)	Nilai Tukar Petani (NTP) Poin	Pendapatan Petani (Ribu Rupiah)	Kemiskinan Perdesaan (%)
Aceh	2019	536,52	98,38	1.490,24	18,03
Aceh	2020	2.384,15	98,74	1.407,50	17,46
Aceh	2021	1.644,78	101,2	1.348,60	17,78
Aceh	2022	1.983,55	107,46	1.691,20	16,87
Aceh	2023	2.780,59	114,35	1.372,50	16,92
Aceh	2024	3.971,03	119,26	2.078,60	16,75
Sumatera Utara	2019	1.630,23	104,39	1.277,73	9,14
Sumatera Utara	2020	1.360,69	109,83	1.347,30	8,77
Sumatera Utara	2021	499,99	119,06	1.224,10	8,84
Sumatera Utara	2022	691,77	121,73	1.556,30	7,98
Sumatera Utara	2023	843,42	125,32	1.439,00	8,03
Sumatera Utara	2024	1.006,48	136,23	1.604,00	8,08
Sumatera Barat	2019	1.101,75	100,05	1.268,57	7,88
Sumatera Barat	2020	816,67	100,59	1.156,90	7,43
Sumatera Barat	2021	303,44	107,61	1.165,60	7,91
Sumatera Barat	2022	565,68	110,37	1.379,40	6,86
Sumatera Barat	2023	842,30	110,28	1.490,10	7,23
Sumatera Barat	2024	1.158,85	123,74	1.370,40	7,28
Riau	2019	1.670,93	106,39	1.821,78	7,62
Riau	2020	2.173,14	118,79	1.784,90	7,29

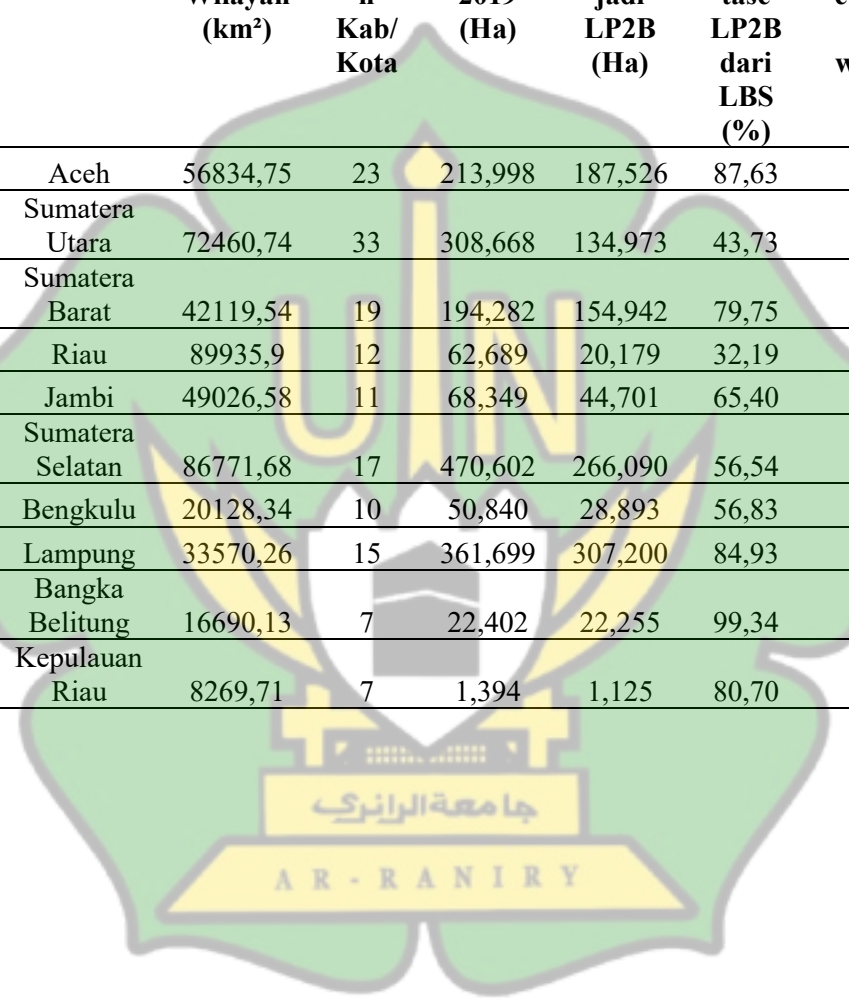
Riau	2021	1.676,22	138,72	1.863,10	7,51
Riau	2022	8.411,25	144,19	2.174,30	7,08
Riau	2023	9.426,08	152,93	1.621,40	6,65
Riau	2024	10.321,29	173,22	2.358,20	6,61
Jambi	2019	1.291,57	101,75	1.702,78	6,53
Jambi	2020	775,14	107,62	1.456,30	6,23
Jambi	2021	873,80	126,89	1.564,30	6,42
Jambi	2022	1.052,97	135,08	2.069,10	6,19
Jambi	2023	1.342,78	138,11	1.432,40	6,28
Jambi	2024	1.883,02	156,14	2.433,60	5,9
Sumatera Selatan	2019	610,41	98,92	1.387,02	13,02
Sumatera Selatan	2020	445,23	95,37	1.325,00	12,96
Sumatera Selatan	2021	617,97	107,8	1.467,50	13,12
Sumatera Selatan	2022	930,64	107,7	1.807,00	12,31
Sumatera Selatan	2023	1.499,43	105,10	1.379,00	12,21
Sumatera Selatan	2024	2.421,70	120,84	2.120,10	11,53
Bengkulu	2019	627,38	104,83	1.255,89	15,49
Bengkulu	2020	608,13	114,1	1.217,30	15,16
Bengkulu	2021	711,44	132,6	1.216,60	15,28
Bengkulu	2022	950,04	134,01	1.584,70	14,49
Bengkulu	2023	1.182,45	146,91	1.367,00	13,96
Bengkulu	2024	1.331,59	181,90	1.944,00	13,56
Lampung	2019	382,43	96,96	1.254,64	14,27
Lampung	2020	273,25	94,73	1.195,10	13,83
Lampung	2021	58,72	101,23	1.177,50	14,18
Lampung	2022	161,31	104,3	1.473,30	13,14
Lampung	2023	282,62	109,36	1.391,70	12,65
Lampung	2024	324,77	124,98	1.591,20	11,97
Bangka Belitung	2019	1.137,49	102,35	1.747,66	6,79
Bangka Belitung	2020	1.419,84	103,95	1.586,40	6,33
Bangka Belitung	2021	1.343,27	125,71	1.650,10	6,63
Bangka	2022	2.888,04	125,95	2.111,00	6,26

Belitung					
Bangka Belitung	2023	2.804,36	118,32	1.688,50	5,85
Bangka Belitung	2024	2.564,89	133,8	2.360,70	6,17
Kepulauan Riau	2019	268,85	101,11	1.764,01	11,04
Kepulauan Riau	2020	231,96	99,19	1.719,40	10,43
Kepulauan Riau	2021	216,33	104,38	1.548,50	11,10
Kepulauan Riau	2022	2.338,73	106,79	1.976,50	10,68
Kepulauan Riau	2023	4.011,34	104,49	2.400,30	10,69
Kepulauan Riau	2024	951,94	104,81	2.198,70	9,94



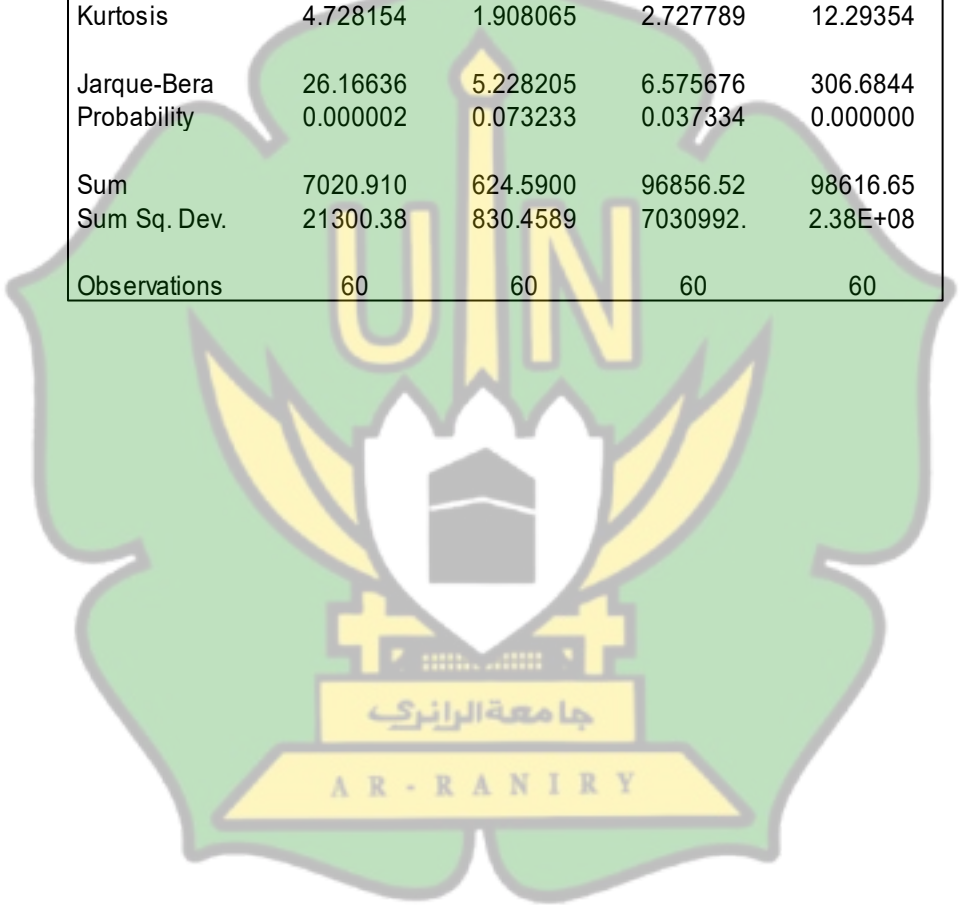
Lampiran 2. Luas Wilayah, Serta Data Lahan Baku Sawah (LBS) dan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) per-Provinsi

No	Provinsi	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kab/Kota	LBS 2019 (Ha)	LBS jadi LP2B (Ha)	Persentase LP2B dari LBS (%)	Persentase LP2B, Total wilayah (%)
1	Aceh	56834,75	23	213,998	187,526	87,63	3,30
2	Sumatera Utara	72460,74	33	308,668	134,973	43,73	1,86
3	Sumatera Barat	42119,54	19	194,282	154,942	79,75	3,68
4	Riau	89935,9	12	62,689	20,179	32,19	0,22
5	Jambi	49026,58	11	68,349	44,701	65,40	0,91
6	Sumatera Selatan	86771,68	17	470,602	266,090	56,54	3,07
7	Bengkulu	20128,34	10	50,840	28,893	56,83	1,44
8	Lampung	33570,26	15	361,699	307,200	84,93	9,15
9	Bangka Belitung	16690,13	7	22,402	22,255	99,34	1,33
10	Kepulauan Riau	8269,71	7	1,394	1,125	80,70	0,14



Lampiran 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	NTP	KP	PP	PSP
Mean	117.0152	10.40983	1614.275	1643.611
Median	109.5950	9.540000	1552.400	1077.361
Maximum	181.9000	18.03000	2433.600	10321.29
Minimum	94.73000	5.850000	1156.900	58.71753
Std. Dev.	19.00062	3.751743	345.2092	2006.450
Skewness	1.367482	0.474067	0.799402	3.012636
Kurtosis	4.728154	1.908065	2.727789	12.29354
Jarque-Bera	26.16636	5.228205	6.575676	306.6844
Probability	0.000002	0.073233	0.037334	0.000000
Sum	7020.910	624.5900	96856.52	98616.65
Sum Sq. Dev.	21300.38	830.4589	7030992.	2.38E+08
Observations	60	60	60	60



Lampiran 4. Regresi Panel Nilai Tukar Petani (NTP)

a. Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: LNTP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/14/26 Time: 11:25
 Sample: 2019 2024
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.227385	0.123472	34.23747	0.0000
LPSP	0.075425	0.017627	4.278894	0.0001
R-squared	0.239932	Mean dependent var		4.750649
Adjusted R-squared	0.226827	S.D. dependent var		0.150203
S.E. of regression	0.132074	Akaike info criterion		-1.178145
Sum squared resid	1.011724	Schwarz criterion		-1.108333
Log likelihood	37.34435	Hannan-Quinn criter.		-1.150838
F-statistic	18.30894	Durbin-Watson stat		0.517659
Prob(F-statistic)	0.000071			

b. Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: LNTP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/14/26 Time: 20:22
 Sample: 2019 2024
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.219056	0.159170	26.50668	0.0000
LPSP	0.076626	0.022852	3.353143	0.0015

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.555281	Mean dependent var	4.750649
Adjusted R-squared	0.464522	S.D. dependent var	0.150203
S.E. of regression	0.109913	Akaike info criterion	-1.414111
Sum squared resid	0.591963	Schwarz criterion	-1.030148
Log likelihood	53.42334	Hannan-Quinn criter.	-1.263922
F-statistic	6.118202	Durbin-Watson stat	0.891579
Prob(F-statistic)	0.000006		

c. Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: LNTP

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/14/26 Time: 20:28

Sample: 2019 2024

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.222559	0.140687	30.01389	0.0000
LPSP	0.076121	0.019826	3.839419	0.0003

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.082039	0.3578
Idiosyncratic random		0.109913	0.6422

Weighted Statistics			
R-squared	0.205471	Mean dependent var	2.279690
Adjusted R-squared	0.191772	S.D. dependent var	0.121203
S.E. of regression	0.108963	Sum squared resid	0.688634
F-statistic	14.99923	Durbin-Watson stat	0.763929
Prob(F-statistic)	0.000276		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.239911	Mean dependent var	4.750649
Sum squared resid	1.011751	Durbin-Watson stat	0.519957

Lampiran 5. Uji Pemilihan Model Nilai Tukar Petani (NTP)

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.860651	(9,49)	0.0009
Cross-section Chi-square	32.157984	9	0.0002

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: LNTP
Method: Panel Least Squares
Date: 01/14/26 Time: 20:24
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 10
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.227385	0.123472	34.23747	0.0000
LPSP	0.075425	0.017627	4.278894	0.0001
R-squared	0.239932	Mean dependent var		4.750649
Adjusted R-squared	0.226827	S.D. dependent var		0.150203
S.E. of regression	0.132074	Akaike info criterion		-1.178145
Sum squared resid	1.011724	Schwarz criterion		-1.108333
Log likelihood	37.34435	Hannan-Quinn criter.		-1.150838
F-statistic	18.30894	Durbin-Watson stat		0.517659
Prob(F-statistic)	0.000071			

b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.001975	1	0.9646

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LPSP	0.076626	0.076121	0.000129	0.9646

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LNTP

Method: Panel Least Squares

Date: 01/14/26 Time: 20:29

Sample: 2019 2024

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.219056	0.159170	26.50668	0.0000
LPSP	0.076626	0.022852	3.353143	0.0015

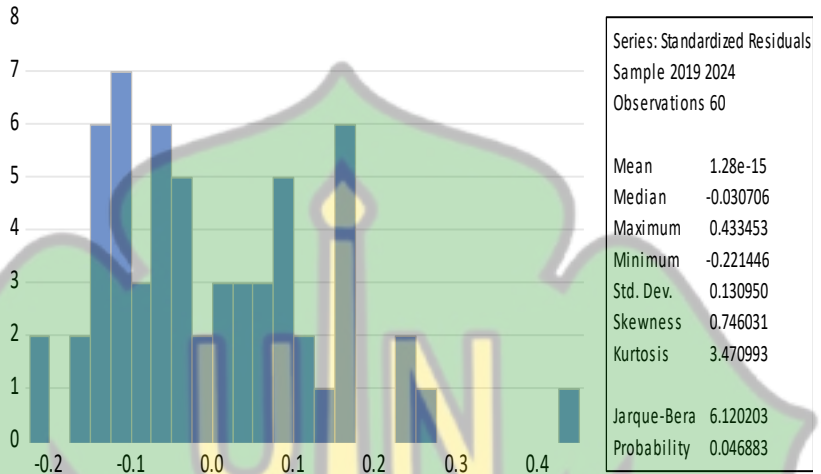
AR - Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

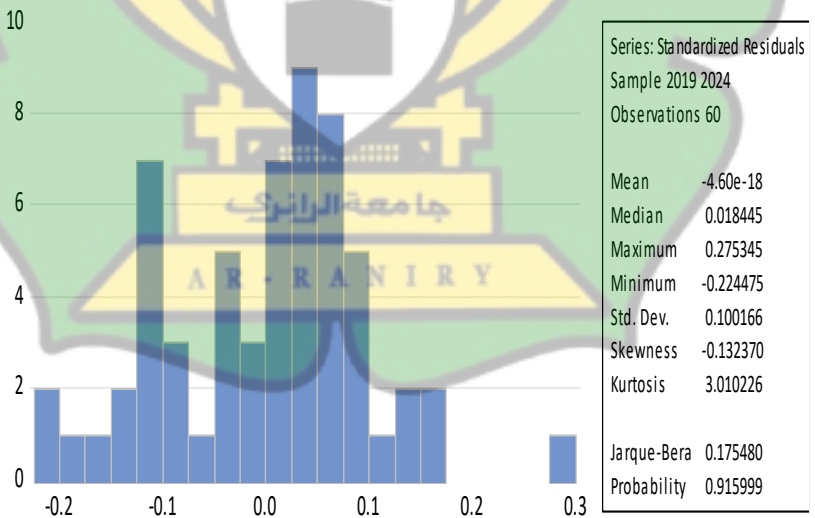
R-squared	0.555281	Mean dependent var	4.750649
Adjusted R-squared	0.464522	S.D. dependent var	0.150203
S.E. of regression	0.109913	Akaike info criterion	-1.414111
Sum squared resid	0.591963	Schwarz criterion	-1.030148
Log likelihood	53.42334	Hannan-Quinn criter.	-1.263922
F-statistic	6.118202	Durbin-Watson stat	0.891579
Prob(F-statistic)	0.000006		

Lampiran 6. Uji Asumsi dan Diagnostik Model (NTP)

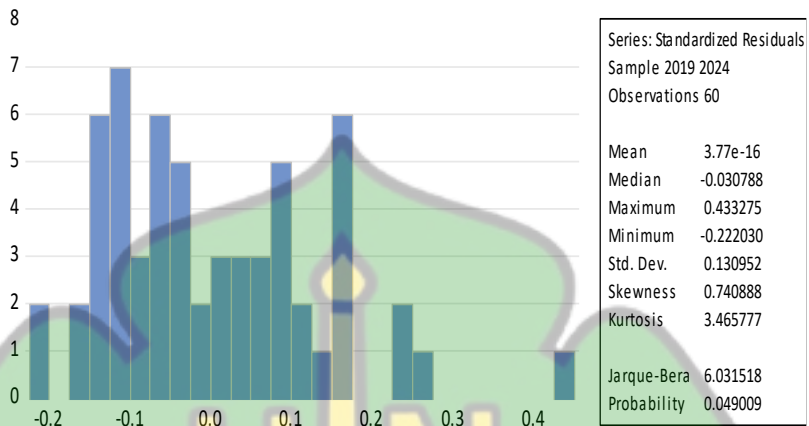
a. Uji Normalitas *Residual Model Common Effect* (NTP)



b. Uji Normalitas *Residual Model Fixed Effect* (NTP)



c. Uji Normalitas Residual Model Random Effect (NTP)



d. Uji Ketergantungan Cross-Section Residual Model Random Effect (LNTP)

Residual Cross-Section Dependence Test

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals

Equation: Untitled

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel observations: 60

Note: non-zero cross-section means detected in data

Cross-section means were removed during computation of correlations

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	152.6312	45	0.0000
Pesaran scaled LM	11.34532		0.0000
Pesaran CD	9.571335		0.0000

Lampiran 7. Regresi Pendapatan Petani (PP)

a. Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: LPP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/14/26 Time: 20:34
 Sample: 2019 2024
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.540873	0.158307	41.31755	0.0000
LPSP	0.118875	0.022600	5.259878	0.0000

R-squared	0.322954	Mean dependent var	7.365573
Adjusted R-squared	0.311281	S.D. dependent var	0.204046
S.E. of regression	0.169335	Akaike info criterion	-0.681104
Sum squared resid	1.663122	Schwarz criterion	-0.611293
Log likelihood	22.43313	Hannan-Quinn criter.	-0.653797
F-statistic	27.66632	Durbin-Watson stat	1.346925
Prob(F-statistic)	0.000002		

b. Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: LPP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/14/26 Time: 20:37
 Sample: 2019 2024
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.536609	0.198429	32.94180	0.0000
LPSP	0.119490	0.028488	4.194334	0.0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.625476	Mean dependent var	7.365573
Adjusted R-squared	0.549043	S.D. dependent var	0.204046
S.E. of regression	0.137023	Akaike info criterion	-0.973188
Sum squared resid	0.919995	Schwarz criterion	-0.589225
Log likelihood	40.19565	Hannan-Quinn criter.	-0.822999
F-statistic	8.183288	Durbin-Watson stat	2.435438
Prob(F-statistic)	0.000000		

c. Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: LPP
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/14/26 Time: 20:39
 Sample: 2019 2024
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.538232	0.178512	36.62635	0.0000
LPSP	0.119256	0.025098	4.751514	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.111141	0.3968
Idiosyncratic random		0.137023	0.6032

Weighted Statistics			
R-squared	0.283711	Mean dependent var	3.311456
Adjusted R-squared	0.271361	S.D. dependent var	0.159134
S.E. of regression	0.135837	Sum squared resid	1.070203
F-statistic	22.97285	Durbin-Watson stat	2.093435
Prob(F-statistic)	0.000012		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.322951	Mean dependent var	7.365573
Sum squared resid	1.663130	Durbin-Watson stat	1.347100

Lampiran 8. Uji Pemilihan Model Pendapatan Petani (PP)

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.397758	(9,49)	0.0003
Cross-section Chi-square	35.525028	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LPP

Method: Panel Least Squares

Date: 01/14/26 Time: 20:38

Sample: 2019 2024

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.540873	0.158307	41.31755	0.0000
LPSP	0.118875	0.022600	5.259878	0.0000

R-squared	0.322954	Mean dependent var	7.365573
Adjusted R-squared	0.311281	S.D. dependent var	0.204046
S.E. of regression	0.169335	Akaike info criterion	-0.681104
Sum squared resid	1.663122	Schwarz criterion	-0.611293
Log likelihood	22.43313	Hannan-Quinn criter.	-0.653797
F-statistic	27.66632	Durbin-Watson stat	1.346925
Prob(F-statistic)	0.000002		

b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000301	1	0.9861

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LPSP	0.119490	0.119256	0.000182	0.9861

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LPP

Method: Panel Least Squares

Date: 01/14/26 Time: 22:35

Sample: 2019 2024

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.536609	0.198429	32.94180	0.0000
LPSP	0.119490	0.028488	4.194334	0.0001

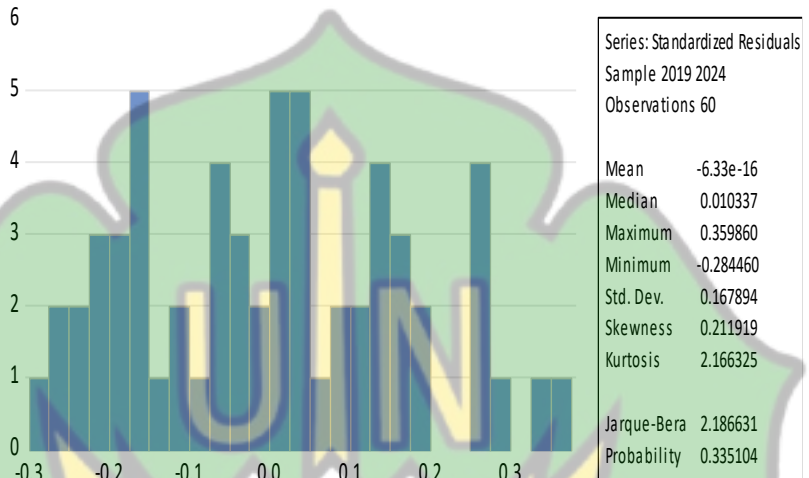
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

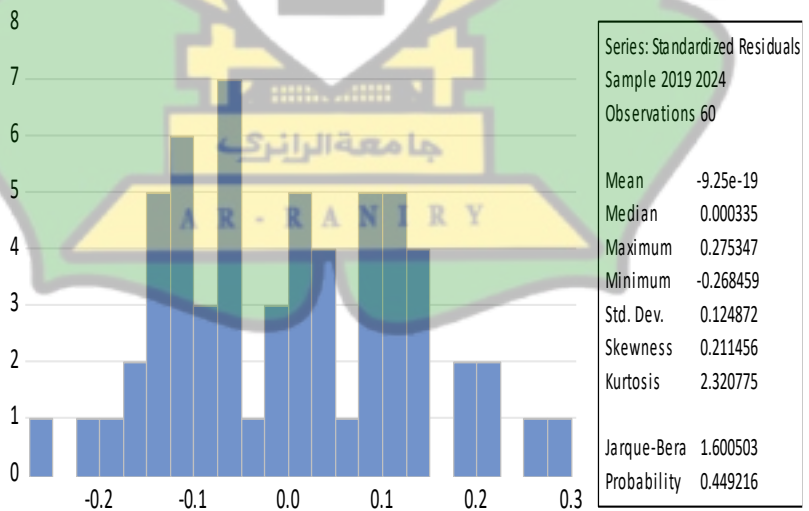
R-squared	0.625476	Mean dependent var	7.365573
Adjusted R-squared	0.549043	S.D. dependent var	0.204046
S.E. of regression	0.137023	Akaike info criterion	-0.973188
Sum squared resid	0.919995	Schwarz criterion	-0.589225
Log likelihood	40.19565	Hannan-Quinn criter.	-0.822999
F-statistic	8.183288	Durbin-Watson stat	2.435438
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 9. Uji Asumsi dan Diagnostik Model (PP)

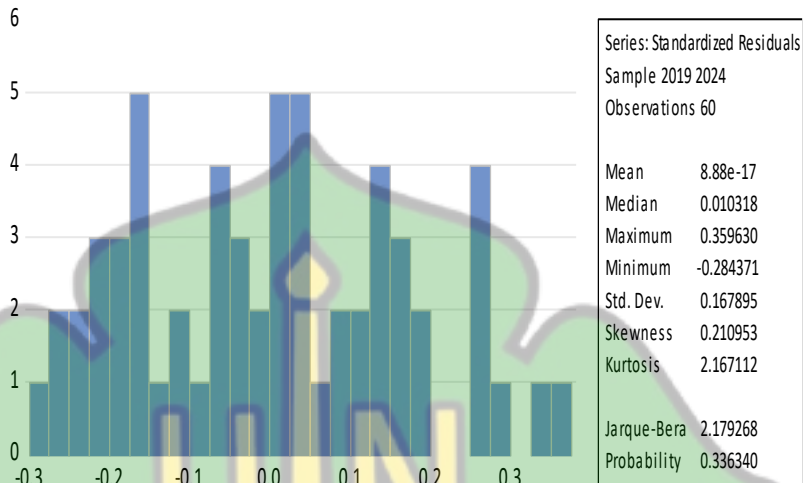
a. Uji Normalitas Residual Model Common Effect (PP)



b. Uji Normalitas Residual Model Fixed Effect (PP)



c. Uji Normalitas Residual Model Random Effect (PP)



d. Uji Ketergantungan Cross-Section Residual Model Random Effect (PP)

Residual Cross-Section Dependence Test

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals

Equation: Untitled

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel observations: 60

Note: non-zero cross-section means detected in data

Cross-section means were removed during computation of correlations

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	98.81371	45	0.0000
Pesaran scaled LM	5.672463		0.0000
Pesaran CD	7.447820		0.0000

Lampiran 10. Regresi Kemiskinan di Perdesaan (KP)

a. Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: LKP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/14/26 Time: 19:45
 Sample: 2019 2024
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.065508	0.321056	9.548217	0.0000
LPSP	-0.113294	0.045835	-2.471794	0.0164
R-squared	0.095302	Mean dependent var		2.279528
Adjusted R-squared	0.079703	S.D. dependent var		0.357984
S.E. of regression	0.343421	Akaike info criterion		0.733047
Sum squared resid	6.840410	Schwarz criterion		0.802858
Log likelihood	-19.99141	Hannan-Quinn criter.		0.760354
F-statistic	6.109763	Durbin-Watson stat		0.047590
Prob(F-statistic)	0.016400			

b. Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: LKP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 01/14/26 Time: 19:52
 Sample: 2019 2024
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.530339	0.066986	37.77416	0.0000
LPSP	-0.036153	0.009617	-3.759200	0.0005

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986134	Mean dependent var	2.279528
Adjusted R-squared	0.983304	S.D. dependent var	0.357984
S.E. of regression	0.046257	Akaike info criterion	-3.145085
Sum squared resid	0.104844	Schwarz criterion	-2.761122
Log likelihood	105.3525	Hannan-Quinn criter.	-2.994896
F-statistic	348.4717	Durbin-Watson stat	1.228162
Prob(F-statistic)	0.000000		

c. Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: LKP

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/14/26 Time: 19:54

Sample: 2019 2024

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.533746	0.134087	18.89624	0.0000
LPSP	-0.036644	0.009599	-3.817406	0.0003

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.367545	0.9844
Idiosyncratic random		0.046257	0.0156

Weighted Statistics			
R-squared	0.201643	Mean dependent var	0.116966
Adjusted R-squared	0.187878	S.D. dependent var	0.051195
S.E. of regression	0.046135	Sum squared resid	0.123452
F-statistic	14.64922	Durbin-Watson stat	1.045172
Prob(F-statistic)	0.000320		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.051679	Mean dependent var	2.279528
Sum squared resid	7.170241	Durbin-Watson stat	0.017995

Lampiran 11. Uji Pemilihan Model (KP)

a. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	349.771989	(9,49)	0.0000
Cross-section Chi-square	250.687893	9	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LKP

Method: Panel Least Squares

Date: 01/14/26 Time: 20:10

Sample: 2019 2024

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.065508	0.321056	9.548217	0.0000
LPSP	-0.113294	0.045835	-2.471794	0.0164
R-squared	0.095302	Mean dependent var		2.279528
Adjusted R-squared	0.079703	S.D. dependent var		0.357984
S.E. of regression	0.343421	Akaike info criterion		0.733047
Sum squared resid	6.840410	Schwarz criterion		0.802858
Log likelihood	-19.99141	Hannan-Quinn criter.		0.760354
F-statistic	6.109763	Durbin-Watson stat		0.047590
Prob(F-statistic)	0.016400			

b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.696592	1	0.4039

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LPSP	-0.036153	-0.036644	0.000000	0.4039

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: LKP

Method: Panel Least Squares

Date: 01/14/26 Time: 20:12

Sample: 2019 2024

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.530339	0.066986	37.77416	0.0000
LPSP	-0.036153	0.009617	-3.759200	0.0005

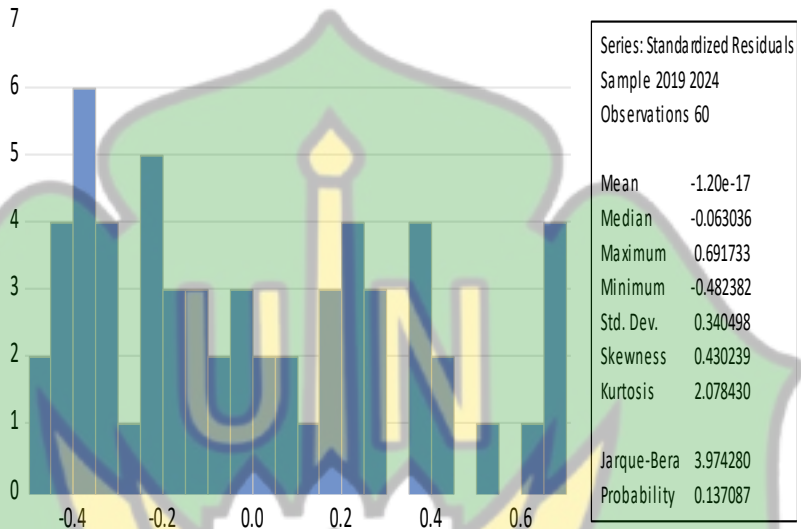
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

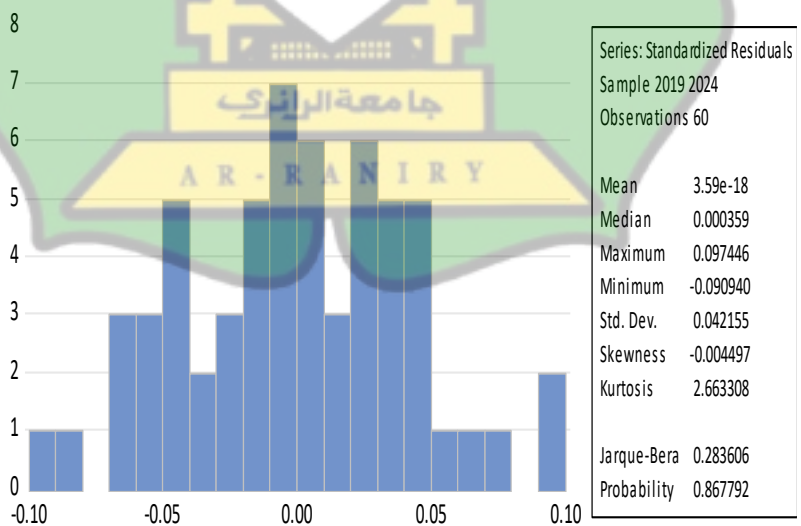
R-squared	0.986134	Mean dependent var	2.279528
Adjusted R-squared	0.983304	S.D. dependent var	0.357984
S.E. of regression	0.046257	Akaike info criterion	-3.145085
Sum squared resid	0.104844	Schwarz criterion	-2.761122
Log likelihood	105.3525	Hannan-Quinn criter.	-2.994896
F-statistic	348.4717	Durbin-Watson stat	1.228162
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 12. Uji Asumsi dan Diagnostik Model (KP)

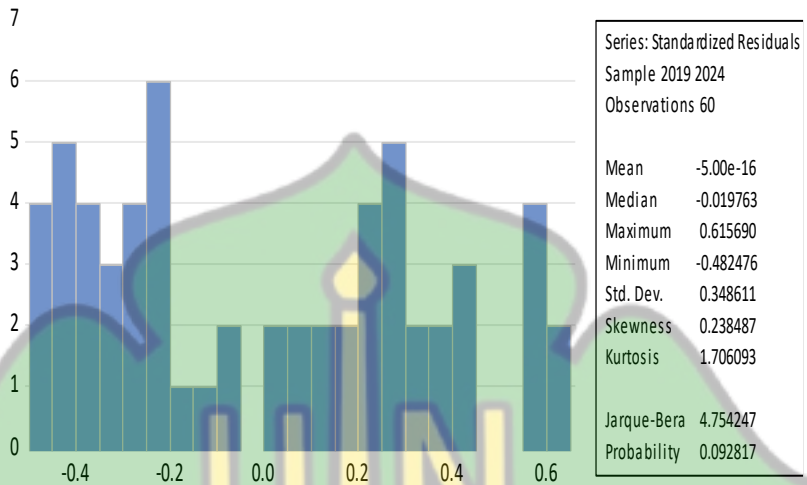
a. Uji Normalitas Residual Model Common Effect (KP)



b. Uji Normalitas Residual Model Fixed Effect (KP)



c. Uji Normalitas Residual Model Random Effect (KP)



d. Uji Ketergantungan Cross-Section Residual Model Random Effect

Residual Cross-Section Dependence Test

Null hypothesis: No cross-section dependence (correlation) in residuals

Equation: Untitled

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel observations: 60

Note: non-zero cross-section means detected in data

Cross-section means were removed during computation of correlations

Test	Statistic	d.f.	Prob.
Breusch-Pagan LM	99.48973	45	0.0000
Pesaran scaled LM	5.743722		0.0000
Pesaran CD	7.802362		0.0000